

anri

Arsip Nasional Republik Indonesia

EDISI 66/MEI-AGUSTUS/2015

ARSIP

Media Kearsipan Nasional

**DUNIA KEARSIPAN MENYONGSONG
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015**





**PUSAT
JASA
KEARSIPAN**

Arsip Nasional Republik Indonesia

Mitra Terpercaya dalam Pengelolaan Arsip



Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selain sebagai pembina kearsipan nasional juga ditugaskan untuk memberikan bantuan teknis secara langsung kepada pencipta arsip dalam melaksanakan kewajiban mengelola arsipnya. Bantuan teknis tersebut tidak bersifat hibah melainkan melalui pembiayaan dengan mekanisme penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Untuk itu dibentuklah Pusat Jasa Kearsipan yang memiliki tugas memberikan pelayanan jasa di bidang kearsipan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia, jenis pelayanan jasa kearsipan meliputi: (a) Pembuatan pedoman kearsipan untuk organisasi atau lembaga; (b) Pembuatan program aplikasi sistem kearsipan; (c) Pembenahan arsip; (d) Pemeliharaan dan perawatan arsip; (e) Penyimpanan arsip.


Arsip Nasional Republik Indonesia

Informasi Lebih Lanjut
Hubungi Pusat Jasa Kearsipan ANRI:
Jl. Ampera Raya No. 7 Jakarta
12560 - Indonesia
Telp : +62 21 780 5851 / +62 21 781 5157 Ext. 403/506
Fax : +62 21 7810280 / +62 21 7805812
Email : pusat.jasa@gmail.com
www.jasakearsipan.anri.go.id

DAFTAR ISI



5 DUNIA KEARSIPAN DALAM MENGHADAPI MEA

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), topik ini menjadi bahasan dalam berbagai bidang pada tahun ini. MEA yang notabene merupakan hasil dari perjanjian antar pemimpin negara-negara ASEAN dalam rangka meningkatkan kerjasama dan kompetisi dalam lingkup negara ASEAN akan diberlakukan di penghujung tahun 2015

| | |
|---|-----------|
| DARI REDAKSI | 4 |
| Artikel Laporan Utama / Adhie Gesti Pambudi : | 17 |
| KESIAPAN GENERASI MUDA KEARSIPAN DALAM MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN | |
| Wawancara Eksklusif : | 19 |
| DR. MUSTARI IRAWAN, MPA MEMIMPIN SARBICA MENYONGSONG MEA | |
| Profil : | 22 |
| ARSIPARIS TELADAN: BAMBANG PARJONO WIDODO MENGABDI PADA NEGARA DENGAN MENJADI ARSIPARIS | |
| Khazanah / Widhi SP : | 24 |
| MENELUSURI REKAM JEJAK SEJARAH DIPLOMASI INDONESIA MELALUI GUIDE ARSIP DIPLOMASI INDONESIA 1945-2009 | |
| Khazanah / R. Suryagung SP : | 29 |
| 60 TAHUN HUBUNGAN INDONESIA - VIETNAM DALAM ARSIP | |



9 Azmi : STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING TENAGA KERJA KEARSIPAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Di penghujung 2015 masyarakat Asia Tenggara memasuki era baru, yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN *Economic Community* (AEC), yang merupakan era pasar bebas di wilayah Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara anggota ASEAN dengan jumlah penduduk terbanyak dan wilayah terluas, tentunya akan merasakan dampak langsung atas pemberlakuan MEA.

| | |
|--|-----------|
| Daerah : | 31 |
| BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA BARAT : MENGAWAL PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DENGAN PERATURAN DAERAH KEARSIPAN | |
| Daerah : | 37 |
| BERWISATA ARSIP DI BARPUSDA JATENG | |
| Manca Negara / Krihanta : | 39 |
| KEMAJUAN PESAT PENGELOLAAN ARSIP DI NATIONAL ARCHIVES OF AUSTRALIA | |
| Varia / Ghesa Ririan Mitalia : | 42 |
| MENEMBUS KEBAKUAN: PENGEMBANGAN KEAHLIAN ARSIPARIS SEBAGAI SDM KREATIF | |
| Cerita Kita / Yuanita Utami | 45 |
| SENJA DESEMBER DI TANAH RENCONG | |



13 Sumrahyadi : KEBIJAKAN ANRI DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Data secara internasional menunjukkan bahwa Indonesia masih belum menggembirakan dan perlu kerja keras dalam kesiapan untuk menghadapi berbagai kendala, karena dalam banyak hal kita ketinggalan dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Selain Rasio Gini yang semakin melebar, yaitu 0,41 pada tahun 2013, juga tingkat daya saing Indonesia masih pada ranking 38 pada tahun 2013 masih jauh di bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand.

| | |
|---|-----------|
| Cerita Kita / R. Yovi Mega P | 47 |
| SELYANG PANDANG KEGIATAN KEARSIPAN DI KERAJAAN MAJAPAHIT DALAM KITAB NAGARAKRETAGAMA | |
| LIPUTAN | 50 |



KETERANGAN COVER

Visualisasi mengenai dunia kearsipan menghadapi MEA yang digambarkan dengan simbol kertas-kertas terbang masuk menuju ke arah logo ASEAN dengan latar belakang peta ASEAN dan tempat penyimpanan arsip.

Pembina:

Kepala Arsip Nasional RI,
Sekretaris Utama Arsip Nasional RI,
Deputi Bidang Konservasi Arsip,
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan,
Deputi Bidang Informasi &
Pengembangan Sistem Kearsipan

Penanggung Jawab:

Dra. Multi Siswati, MM

Pemimpin Redaksi:

Eli Ruliawati, S.Sos., MAP

Wakil Pemimpin Redaksi:

Adhie Gesit Pambudi, S.Sos., MA.,

Dewan Redaksi:

Drs. Azmi, M.Si., Drs. Hilman Rosmana,

M. Ihwan, S.Sos., M.Si.,

Drs. Bambang Parjono Widodo, M.Si.,

Drs. Langgeng Sulistyio B,

Redaktur Pelaksana:

Bambang Barlian, S.AP.,

Susanti, S.Sos., M.Hum.,

Editor:

Tiara Kharisma, S.I.Kom.,

Rayi Darmagara, SH.,

R. Suryagung Sudibyo P., S.S., M.Hum.,

Achmad Dedi Faozi, S.Hum.,

Raistiwar Pratama, S.S

Fotografer:

Hanif Aulia Rahman, A.Md.,

Farida Aryani, S.Sos

Desain Grafis:

Beny Oktavianto, A.Md

Isanto, A.Md

Sekretariat:

Khoerun Nisa Fadillah, S.IP.,

Yuanita Utami, S.IP.,

Octavia Syafarwati, S.Si.,

Majalah ARSIP menerima artikel dan berita tentang kegiatan kearsipan dan cerita-cerita menarik yang merupakan pengalaman pribadi atau orang lain. Jumlah halaman paling banyak tiga halaman atau tidak lebih dari 500 kata. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut, tanpa mengurangi maksud isinya. Artikel sebaiknya dikirim dalam bentuk *hard* dan *soft copy* ke alamat Redaksi: Subbag. Publikasi dan Dokumentasi, Bagian Humas, Arsip Nasional RI, Jalan Ampera Raya No. 7 Cilandak, Jakarta 12560, Telp.: 021-780 5851 Ext. 404, 261, 111, Fax.: 021-781 0280, website: www.anri.go.id, email: info@anri.go.id



Pada akhir tahun 2015, konstelasi perekonomian di regional Asia Tenggara mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini diakibatkan oleh pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pembentukan MEA dilakukan 12 tahun lalu ketika para pemimpin ASEAN melakukan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang berlangsung di Bali pada 2003. Ketika itu, para petinggi ASEAN mendeklarasikan pembentukan MEA yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. MEA merupakan sebuah konsepsi pasar bebas terpadu di wilayah Asia Tenggara di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja. Sisi lain dari diberlakukannya MEA adalah menciptakan peluang Indonesia untuk melakukan penetrasi ke luar Indonesia.

Salah satu bidang yang terkena dampak dari pemberlakuan MEA adalah bidang kearsipan. Dalam sektor SDM, tenaga kerja kearsipan di Indonesia harus mampu bersaing dengan tenaga kerja kearsipan dari mancanegara khususnya di wilayah ASEAN. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan kompetensi secara substansi dan juga bahasa. Selain itu, tenaga kerja kearsipan di Indonesia harus mendapatkan pengakuan dalam bentuk sertifikasi yang dilakukan oleh organisasi yang berwenang sehingga kemampuannya diakui.

Sektor lain di bidang kearsipan yang terkena dampak adalah layanan jasa kearsipan. Persaingan usaha di bidang kearsipan menuntut penyelenggara jasa kearsipan untuk meningkatkan mutu dan kualitas layanannya sesuai dengan standar yang diharapkan konsumen di Asia Tenggara. Penetrasi penyedia jasa kearsipan dari luar negeri harus dapat diantisipasi dengan strategi yang responsif agar penyedia jasa kearsipan Indonesia dapat bersaing dengan baik.

Salah satu faktor pendukung keberhasilan dunia kearsipan Indonesia dalam menyongsong MEA adalah kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang kearsipan yang harus mendukung peningkatan daya saing kearsipan Indonesia. Selain itu keterlibatan asosiasi profesi di bidang kearsipan menjadi faktor determinan dalam peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kearsipan di Indonesia. Di sisi lain, penyedia jasa kearsipan di Indonesia juga harus bisa memanfaatkan peluang dengan adanya MEA untuk melakukan penetrasi bisnis di dalam dan luar negeri.

Majalah ARSIP Edisi 66 ini mengajak pembaca untuk mengetahui kesiapan dunia kearsipan Indonesia dalam menyongsong MEA dari berbagai dimensi yang dimuat dari artikel yang diturunkan di edisi ini. Laporan Utama edisi ini berisi analisis dan wawancara dengan Kepala ANRI, Ketua Asosiasi Arsiparis Indonesia, dan Direktur Utama PT Indo Arsip. Edisi ini juga menampilkan wawancara eksklusif dengan Dr. Mustari Irawan, MPA selaku *Chairman dari South East Asia Regional Branch of International Council on Archives (SARBICA)*.

Semoga dengan terbitnya majalah ARSIP edisi kali ini, dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi para peminat, pemerhati, pemangku kepentingan, dan komunitas kearsipan di Indonesia. Di sisi lain, kami juga mengharapkan kritik dan saran dari pembaca dalam rangka perbaikan majalah ini di masa yang akan datang.



DUNIA KEARSIPAN DALAM MENGHADAPI MEA

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), topik ini menjadi bahasan dalam berbagai bidang pada tahun ini. MEA yang notabene merupakan hasil dari perjanjian antar pemimpin negara-negara ASEAN dalam rangka meningkatkan kerjasama dan kompetisi dalam lingkup negara ASEAN akan diberlakukan di penghujung tahun 2015. MEA merupakan salah satu cara sebagai upaya untuk mencapai visi ASEAN pada tahun 2020. Nama MEA sendiri sebenarnya telah dicetuskan pada tahun 2003 dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. MEA dapat diartikan sebagai pasar bebas yang muncul di Asia Tenggara dimana mereka yang masuk dalam lingkup negara ASEAN dapat melakukan ekspansi dalam bentuk

persaingan yang fair /kompetisi dalam berbagai bidang baik dalam bentuk produk/barang, jasa dan sumber daya manusia. Dalam hal ini, kawasan ASEAN akan menjadi satu kesatuan wilayah pasar dan produksi; kompetisi yang tinggi dalam masyarakat ASEAN; MEA diarahkan untuk menciptakan pemerataan ekonomi diantara negara-negara ASEAN; dan menjadikan wilayah ASEAN sebagai integrasi pasar global.

Berbagai persiapan dilakukan guna menghadapi MEA, mulai dari mempelajari pangsa pasar dan kebutuhan masyarakat, meningkatkan mutu/kualitas produk agar bisa bersaing di Asia Tenggara bahkan dunia, menyediakan jasa sesuai kebutuhan masyarakat, menambah keterampilan dan kualitas SDM melalui

pendidikan dan latihan.

Kearsipan sebagai salah satu bidang, dituntut untuk bersiap diri dalam menghadapi MEA. Lembaga Kearsipan sebagai “poros” pembinaan, pemeliharaan dan penyajian arsip sebagai bentuk layanan kepada masyarakat harus membekali diri guna menghadapi persaingan bebas dalam MEA. MEA akan memberikan dampak dalam bidang kearsipan, sebagaimana dikatakan oleh Kepala ANRI bahwa “Secara substantif kearsipan, kemungkinan dengan adanya MEA kita bisa membangun suatu kerjasama, satu integrasi, satu koordinasi diantara negara-negara ASEAN karena negara-negara ASEAN itu mempunyai kondisi kearsipan yang berbeda-beda dan ini juga harus diketahui oleh semua negara. Oleh karena itu diharapkan

“ harus ada standar kompetensi arsiparis baik nasional maupun internasional ”

perbedaan itu nanti akan semakin berkurang sehingga kita semua di negara ASEAN itu mempunyai suatu kemampuan dibidang kearsipan yang relatif sama”. Untuk dapat mewujudkan kondisi tersebut, berbagai persiapan telah dilakukan, khususnya oleh lembaga kearsipan. Salah satu yang dilakukan adalah peningkatan kemampuan sumber daya manusia kearsipan, dilakukan dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan bidang kearsipan, dan sebagai quality control dari diklat tersebut adalah dengan dilakukannya sertifikasi terhadap pengelola arsip/arsiparis. Sertifikasi dapat menjadi salah satu bukti profesionalitas dari sebuah profesi. Dalam hal ini, peningkatan kemampuan tidak hanya dalam bidang kearsipan, namun arsiparis juga harus meningkatkan pengetahuan umum dengan mengikuti perkembangan yang terjadi dan kemampuan dalam berbahasa, khususnya bahasa Inggris. Bukan menjadi hal yang mustahil jika nanti arsiparis di Indonesia diminta untuk membantu dalam mengelola arsip di negara Brunei Darussalam atau sebaliknya. Dalam wawancara

dengan Mustari Irawan dikatakan bahwa “SDM kearsipan memainkan peranan yang sangat penting dalam hal ini dimana kita bisa mengembangkan arsiparis itu sebagai suatu profesi yang memiliki suatu kualitas dan kalau kita mau bersaing maka yang paling utama adalah bahwa seluruh profesi itu harus mempunyai kualitas. Kualitas itu artinya bahwa dia bisa bersaing dengan

kemungkinan datangnya profesi profesi yang sama ke negara kita. Jadi ini memang harus kita siapkan dengan baik. Oleh karena itu, memang Arsip Nasional sangat berkepentingan sekali dan ada beberapa yang sudah kita lakukan jadi kita menyiapkan beberapa program untuk bisa menegaskan kembali fungsi dari arsiparis. Nah ini memang diwujudkan didalam proses sertifikasi sumber daya manusia. Inti dari sertifikasi arsiparis itu adalah bagaimana arsiparis bisa memiliki peranan bukan hanya di Indonesia tetapi di negara-negara ASEAN”. Artinya harus ada standar kompetensi arsiparis baik nasional maupun internasional. Arsiparis di Indonesia perlu juga melihat kompetensi yang dimiliki oleh arsiparis negara lain, untuk kemudian berusaha memiliki kompetensi yang sama.. Arsiparis sebagai profesi yang mandiri,



Kepala ANRI Mustari Irawan

diharapkan para pemangku profesi tersebut berusaha secara mandiri guna meningkatkan kualitas dirinya sendiri, berperan aktif dalam meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Mengenai hal ini, Kepala ANRI menginginkan agar arsiparis yang sudah disertifikasi di Indonesia juga bisa bekerja dimanapun, "itu keinginan saya sesungguhnya, ini hampir sama saya menginginkan seperti di Amerika ada yang disebut CRM (Certified Records Manager). Sertifikasi bukan hanya semata-mata formalitas tetapi benar-benar untuk menguatkan kualitas dari para arsiparis itu, karena kalau tidak kita akan terus ketinggalan kita hanya menjadi penonton di rumah sendiri".

Arsiparis yang dimaksud disini, bukan hanya arsiparis sebagai PNS namun juga tenaga kearsipan dalam perusahaan swasta. Arsiparis ataupun pengelola arsip diharapkan juga mempelajari sistem penyelenggaraan kearsipan yang digunakan oleh negara lain, khususnya ASEAN. Sehingga dapat menguasai berbagai system kearsipan dan memiliki kesiapan untuk dapat berperan aktif dalam dunia kearsipan di ASEAN. Peningkatan kemampuan ini juga membutuhkan wadah untuk saling berbagi informasi mengenai perkembangan dunia kearsipan. Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) sebagai organisasi profesi tingkat nasional diharapkan mampu menjadi wadah berbagi informasi antar arsiparis. Menanggapi ini, Ketua AAI periode - mengatakan "sampai 2015 dan ini juga kelengkapan administrasinya sudah kita daftarkan sebagai organisasi profesi baik di pengadilan termasuk di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Ketua Asosiasi Arsiparis Indonesia Andi Kasman

Kementerian Dalam Negeri itu sudah terdaftar dengan nomer notaris 773. Peran strategis asosiasi arsiparis Indonesia ini sebagai organisasi profesi itu adalah selain mewadahi komunitas profesional kearsipan Indonesia yang beranggotakan baik dari pemerintah maupun BUMN dan polri, lembaga swasta maupun pejabat struktural bidang kearsipan, juga bertujuan atau berfungsi mempertinggi mutu sdm di bidang kearsipan sehingga tercipta tenaga kearsipan yang handal dan mandiri, ini yang diatur dalam anggaran dasarnya, anggaran rumah tangga. Kedua adalah mempertinggi mutu penyelenggaraan dan pemanfaatan kearsipan ini ada dua yang digariskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sehingga fungsi strategis AAI ada dua, pertama adalah mempertinggi mutu kualitas sdm di bidang kearsipan, kedua adalah mempertinggi mutu penyelenggaraan dan pemanfaatan".

AAI merupakan organisasi tingkat

profesi yang bertingkat vertikal susunannya adalah tingkat nasional, tingkat wilayah, tingkat cabang kabupaten kota, jadi ini bersifat hierarki. Apa yang diputuskan di tingkat nasional wajib dilakukan sampai tingkat daerah sebagai organisasi vertikal. Menurut Andi Kasman, Ketua AAI yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan "AAI di Indonesia baru terbentuk sekitar 19 wilayah provinsi dan ada 10 cabang kabupaten kota. Pembentukan AAI di daerah tersendat karena kebanyakan menganggap bahwa asosiasi ini tidak hanya bagi pejabat fungsional arsiparis padahal tidak begitu, pengertian arsiparis oleh AAI ini adalah sesuai dengan undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan bahwa arsiparis itu adalah sumber daya yang profesional yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan melalui pendidikan bahkan dengan pendidikan dan pelatihan kearsipan. Kira-kira begitu jadi tidak dikotomi antara pemerintah dengan non pemerintah baik yang

LAPORAN UTAMA

bekerja di pemerintah maupun di non pemerintah itu disebut dengan arsiparis, ini lah yang dikiblatkan oleh AAI. Jadi anggota AAI itu banyak sekali apakah dia sebagai pegawai negeri, bukan pegawai negeri maupun perkerja swata di BUMN - BUMD di POLRI dan TNI, serta tercermin kepada pengurusan AAI di tingkat nasional”.

Dalam sektor jasa kearsipan, pemberlakuan MEA ditangkap sebagai sebuah peluang besar guna memperluas jangkauan pemasaran terhadap jasa yang ditawarkan. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini ada beberapa perusahaan swasta yang bergerak dibidang jasa kearsipan mulai dari penataan, penyimpanan sampai pada penyusutan arsip. Indonesia sebagai Negara yang memiliki penduduk dengan jumlah besar merupakan pangsa pasar yang cukup menjanjikan bagi negara lain, khususnya negara - negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Filipina, Laos, Myanmar dan Kamboja. .Pasar bebas yang timbul dari pemberlakuan MEA di Indonesia membuka kesempatan besar bagi negara-negara tersebut salah satunya untuk memasarkan produk mereka dan menanamkan investasi di negara kita. Kondisi ini harus ditanggapi dengan positif, bahwa kita juga bisa melakukan hal yang sama di negara mereka. Kita harus dapat membuktikan bahwa kualitas yang kita miliki baik dalam kualitas produksi maupun sdm tidak kalah dengan mereka, bahkan mungkin lebih baik dari mereka. Dalam sektor jasa kearsipan juga demikian, kita



Praktisi bisnis kearsipan Didi Andries

“
**makin banyak
aktifitas tentu
makin banyak
arsip, artinya
peluang kami
untuk mendapat
bisnis**
”

harus melihat bahwa selain dengan masuknya perusahaan-perusahaan asing ke Negara kita artinya banyak pekerjaan yang dapat dilakukan khususnya dalam bidang kearsipan., banyak dokumen/arsip yang perlu

ditangani. Sebagaimana dikatakan oleh Direktur Utama salah satu perusahaan swasta bidang kearsipan, PT. Indoarsip dalam wawancara dengan Media Kearsipan Nasional “yang saya lihat kalau mengenai MEA, yaitu mereka (negara ASEAN lainnya) lebih siap , sekarang kita harus akui ini mereka lebih siap daripada kita , sehingga mereka akan lebih dahulu masuk ke negara kita , bukan kita masuk ke negara mereka. Mereka akan lebih dulu ekspansi , lebih agresif atau lebih aktif di Indonesia, sehingga bagi kami , perusahaan asing khususnya merupakan peluang untuk kami, makin banyak aktifitas tentu makin banyak arsip, artinya peluang kami untuk mendapat bisnis, dapat dokumennya”. Perusahaan jasa kearsipan yang telah memulai usahanya sejak tahun 1997, telah melakukan berbagai persiapan dalam menghadapi pasar bebas ASEAN. Lembaga Kearsipan menjadi pihak yang diharapkan terkait dengan sosialisasi kebijakan bidang kearsipan, pembinaan kearsipan serta akreditasi dan sertifikasi kearsipan. Lembaga Kearsipan diharapkan dapat menyentuh juga pembinaan kearsipan pada sektor perusahaan jasa kearsipan sehingga ada kesamaan persepsi mengenai metode pengelolaan arsip. Sertifikasi dan akreditasi juga diharapkan oleh pihak pengelola kearsipan swasta. Karena pemberian sertifikasi dan akreditasi dapat menjadi point lebih bagi mereka. Tingkat kepercayaan *customer* juga akan meningkat. Oleh sebab itu sertifikasi dan akreditasi harus dilakukan dengan baik dan benar.

Azmi :

STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING TENAGA KERJA KEARSIPAN INDONESIA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Di penghujung 2015 masyarakat Asia Tenggara memasuki era baru, yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN *Economic Community* (AEC), yang merupakan era pasar bebas di wilayah Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara anggota ASEAN dengan jumlah penduduk terbanyak dan wilayah terluas, tentunya akan merasakan dampak langsung atas pemberlakuan MEA.

Dampak kebijakan MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, akan tetapi pada pasar tenaga kerja profesional, seperti

dokter, perawat, pengacara, akuntan, tenaga kerja kearsipan, dan lain-lain. Intinya, MEA akan lebih membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang semula tertutup atau minim tenaga asingnya. Namun demikian, pada sisi lain MEA juga memberikan peluang bagi Indonesia untuk bisa menguasai pasar tenaga kerja kearsipan di Asia Tenggara, sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan di bidang kearsipan Indonesia.

Prinsip *free flow of skilled labor and professionals* untuk melancarkan

arus bebas jasa tenaga terampil dan professional regional ASEAN telah membuat tantangan kualitas tenaga kerja kearsipan semakin nyata. Kehadiran MEA telah menyadarkan otoritas kearsipan di Indonesia tentang kualitas tenaga kerja kearsipan Indonesia (selanjutnya dalam tulisan ini disebut TKKI), sehingga memunculkan satu pertanyaan penting apakah TKKI sudah siap menghadapi MEA?.

A. Kesiapan

Dalam pasar bebas, kompetisi dipandang sebagai sesuatu yang wajar, bahkan ditanggapi sebagai tantangan sekaligus peluang. Pemberlakuan



Para arsiparis sedang mengikuti sertifikasi arsiparis bidang kompetensi pengelolaan arsip dinamis. Uji kompetensi sangat penting dalam rangka meningkatkan profesionalitas arsiparis

MEA merupakan atmosfer persaingan yang menantang bangsa Indonesia untuk bisa berprestasi lebih baik. Oleh karena itu, persaingan yang ada di lingkungan MEA harus dianggap sebagai dinamika yang senantiasa mendorong perubahan bangsa Indonesia untuk semakin maju lagi.

Namun demikian, dari banyak sumber informasi dan pendapat pakar terkait pemberlakuan MEA menunjukkan ada keraguan atas kesiapan Indonesia menghadapinya. Banyak kalangan dari berbagai profesi, termasuk profesi kearsipan di tanah air lebih pesimis daripada optimis menghadapi MEA. Menurut penulis, hal ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu minimnya pengetahuan tentang MEA dengan segala aspeknya, kemampuan berbahasa negara-negara ASEAN, dan kompetensi.

MEA merupakan keniscayaan, jika TKKI tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka akan kesulitan bersaing dengan tenaga kerja kearsipan dari negara-negara ASEAN lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi persaingan yang tepat untuk merebut lapangan kerja sektor kearsipan di pasar kerja ASEAN, sehingga pemberlakuan MEA menjadi berkah tersendiri bagi para TKKI.

B. Strategi

Bagaimana cara menyusun strategi peningkatan daya saing TKKI dalam menghadapi MEA? Untuk hal ini dapat digunakan konsep strategi kebudayaan C.A. van Peursen (1988). Menurut van Peursen budaya adalah strategi untuk bertahan hidup dan menang. Inti dari budaya bukanlah budaya itu sendiri, melainkan strategi kebudayaan. Peursen melihat sejarah kebudayaan manusia ini dapat dipilah menjadi tiga tahap, yakni tahap mitis,

ontologis, dan fungsional.

Tahap mitis menggambarkan sikap manusia yang merasakan dirinya terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib di sekitarnya. Tahap ontologis menggambarkan sikap manusia yang mengambil untuk meneliti dan menyusun suatu teori mengenai dasar hakikat segala sesuatu. Tahap fungsional menggambarkan sikap manusia ketika sudah keluar dari dua tahap sebelumnya dan kemudian menentukan suatu relasi baru atas lingkungannya.

Dalam konteks strategi menghadapi MEA, ketiga tahapan dalam strategi kebudayaan Van Peursen tersebut dapat dikaitkan dengan tiga hal yang terdapat dalam diri seorang TKKI, yakni penguasaan informasi tentang MEA, kemampuan berbahasa negara-negara ASEAN, dan kompetensi.

1. Penguasaan informasi tentang MEA

Globalisasi dalam dunia perekonomian, industri, dan perdagangan telah menjadikan informasi sebagai salah satu sumber daya yang langka sehingga mempunyai nilai di mata pihak yang membutuhkannya. Hal ini disebabkan oleh informasi yang menjadi elemen yang penting bagi semua pihak untuk meraih dan memenangkan peluang baru bagi beberapa kegiatan operasional dan bisnis dalam persaingan global. Untuk itu informasi merupakan aset strategis bagi semua pihak untuk memenangkan persaingan.

Informasi merupakan pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran dan pengalaman yang penting untuk membantu mengurangi rasa

cemas seseorang. Semakin banyak informasi yang dapat diterima, hal itu menambah pengetahuan seseorang. Dengan pengetahuan juga dapat menimbulkan kesadaran seseorang sehingga ia berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.

Meningkatnya keberhasilan TKKI tergantung pada kemampuan tenaga kerja kearsipan yang bersangkutan untuk mengumpulkan, menghasilkan, memelihara, dan menyebarkan pengetahuannya tentang MEA. Manajemen pengetahuan itu merupakan proses yang sistematis dan aktif dalam pengelolaan dan penggalan simpanan pengetahuan dalam diri seorang TKKI.

Kenalilah lingkungan yang bernama MEA itu dengan tepat (akurat dan relevan). Bagaimana kondisi penduduk, sosial, budaya, pemerintahan, dan dunia usaha di Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Brunei, Kamboja, Myanmar, dan Timor Leste. TKKI harus mencari informasi selengkap mungkin dan pelajari secara mendalam informasi terkait MEA di negara-negara tersebut.

Jika hari ini TKKI masih merasa khawatir terhadap MEA, Hal itu disebabkan TKKI sudah lama kurang mendapat informasi dan bahkan mengabaikan segala hal terkait negara-negara ASEAN. Selama itu TKKI lebih memprioritaskan informasi internasional dari negara-negara lain di luar negara ASEAN.

Berapa banyak TKKI yang ahli mengenai sistem penyelenggaraan kearsipan Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Brunei, Kamboja, Myanmar, dan Timor Leste?. Jika kita bangga mengapa masih banyak tenaga kerja kearsipan asing

yang meneliti masalah kearsipan Indonesia dan mencoba memahami segala dinamikanya, seberapa banyakkah TKKI yang melakukan hal sebaliknya?.

Jika TKKI sudah melakukan perubahan terhadap kondisi tersebut, maka gambaran MEA sebagai sesuatu yang menakutkan, mencemaskan, membuat tidak percaya diri, dan lain-lain dengan sendirinya akan hilang, karena semua hal terkait MEA sudah diketahui. Dengan demikian, TKKI dapat menentukan strategi apa yang harus dilakukan selanjutnya.

2. Penguasaan bahasa negara-negara ASEAN

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan sarana untuk berinteraksi dengan manusia lainnya di masyarakat. Untuk kepentingan interaksi sosial itu, maka dibutuhkan suatu wahana komunikasi yang disebut bahasa. Bahasa merupakan alat pengantar dalam berkomunikasi, bahasa untuk setiap wilayah, bagian, dan negara memiliki perbedaan yang sangat kompleks.

Bahasa memiliki sifat unik dan kompleks, yang hanya dapat dimengerti oleh pengguna bahasa itu. Maka keunikan dan kompleksitas bahasa ini harus dipelajari dan dipahami agar komunikasi terjalin baik dan efektif dengan memperoleh nilai empati dan simpati dari orang lain. Bahasa merupakan alat untuk mengekspresikan diri, alat komunikasi, dan sarana untuk kontrol sosial. Setiawan (2015), mengatakan bahasa adalah kunci, menguasai bahasa berarti mampu mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, politik, dan budaya suatu bangsa.

Secara umum fungsi bahasa

sebagai alat komunikasi: lisan maupun tulisan. Menurut Hallyday (1992), salah satu fungsi bahasa sebagai alat komunikasi untuk keperluan interaksional, yakni bahasa digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kawasan MEA yang multietnis, multiagama, dan multibahasa, kefasihan satu bahasa saja tidak cukup (misalnya bahasa Inggris yang sudah menjadi bahasa pemersatu kawasan ASEAN) untuk berkomunikasi dengan seluruh masyarakat ASEAN.

Secara *de facto* masih banyak masyarakat ASEAN yang belum fasih dalam bahasa Inggris, sehingga bahasa akan menjadi hambatan yang jelas dalam berinteraksi dalam MEA. Oleh karena itu, untuk mengetahui banyak hal tentang MEA apakah informasi atau pengetahuan mengenai penduduk, sosial, budaya, pemerintahan, dan dunia usaha di negara-negara Asia Tenggara, maka kuncinya adalah penguasaan bahasa negara-negara ASEAN.

Kita mungkin tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa ada beberapa *outlet retail* di beberapa kota besar Indonesia yang telah memperkejakan sejumlah anak muda asal Thailand yang fasih berbahasa Indonesia. Tidak sedikit orang-orang Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, dan Myanmar saat ini sedang serius mempelajari bahasa Indonesia agar dapat berinteraksi dengan masyarakat Indonesia, sehingga mereka dapat bekerja di perusahaan-perusahaan nasional dan multi nasional yang berada di wilayah Indonesia untuk berbagai profesi pekerjaan termasuk profesi kearsipan.

Sebaliknya, apakah ada cukup banyak TKKI yang bisa berbahasa Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Myanmar, dll. Dengan demikian tenaga

kerja kearsipan Indonesia dapat berinteraksi dengan orang-orang di negara-negara tersebut, sehingga dapat bersaing dalam merebut lapangan kerja kearsipan pada perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional yang ada di wilayah negara-negara yang bergabung dalam ASEAN.

Dengan banyaknya TKKI yang menguasai bahasa negara-negara ASEAN (selain Malaysia dan Brunei), bahkan dapat menerbitkan buku-buku kearsipan negara Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Myanmar, dan Timor Leste dengan menggunakan bahasa negara setempat, sehingga tercipta kondisi masyarakat negara-negara tersebut belajar kepada TKKI untuk mengetahui kearsipan negaranya masing-masing.

3. Kompetensi

Tuntutan dunia kerja yang semakin tinggi dan kompetitif, menuntut kemampuan profesional yang semakin baik bagi para pekerja. Hanya tenaga kerja yang selalu mau dan berusaha meningkatkan kemampuannya yang mampu bertahan dan maju terus, karena mereka mampu memenuhi harapan yang senantiasa berubah yang diarahkan kepadanya.

Seluruh dunia kerja, apapun pekerjaan itu, menuntut kemampuan profesionalitas yang semakin baik. Profesionalitas seorang tenaga kerja dalam hal ini ia memiliki kepandaian khusus di bidangnya yang diakui oleh asosiasi profesi melalui sertifikasi. Pasar kerja menuntut tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikasi di setiap bidang. Pasalnya, sertifikasi akan memberikan beberapa manfaat bagi tenaga kerja, antara lain meningkatkan mobilitas,

ARTIKEL LAPORAN UTAMA

daya saing, pengakuan kompetensi, prospek karier, rasa percaya diri, dan kebanggaan.

Sertifikasi berguna bagi pribadi, perusahaan, dan negara. Bagi pribadi, seorang tenaga kerja yang sudah tersertifikasi akan lebih mudah untuk berkariyer. Bagi perusahaan, mereka akan lebih mudah untuk merekrut karyawan yang sesuai kriteria. Sedangkan bagi negara, sertifikasi akan berdampak pada kemajuan ekonomi. Selain itu, negara akan lebih mudah melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak lain, khususnya dalam hal perekrutan tenaga kerja.

Profesionalitas TKKI dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi dari lembaga sertifikasi kompetensi yang didirikan oleh asosiasi atau organisasi profesi arsiparis tingkat nasional maupun internasional. Jenis bidang kompetensi kearsipan yang harus mendapat sertifikasi, yakni kompetensi dalam pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip menjadi informasi.

Dalam persaingan global, organisasi tidak boleh dalam suasana vakum, melainkan senantiasa dituntut dinamis sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang begitu kompleks dan kompetitif. Dalam hubungan ini, maka eksistensi tenaga kerja kearsipan mempunyai peranan yang strategis dalam pencapaian keberhasilan suatu organisasi. Agar TKKI dapat memiliki daya saing, maka kompetensinya harus diakui oleh organisasi profesi arsiparis nasional maupun internasional. Hal ini merupakan prasyarat yang tidak dapat ditawar lagi, karena melalui kompetensi inilah akan ditunjukkan kemampuan sebagaimana yang dipersyaratkan.

Daya saing TKKI akan semakin tinggi dalam MEA jika TKKI memiliki empat jenis kompetensi, yaitu kompetensi teknis di bidang kearsipan, kompetensi manajerial, dan kompetensi intelektual. Hal ini penting, mengingat posisi jabatan pekerjaan kearsipan pada perusahaan tidak hanya tenaga teknis kearsipan (*clerk, records officer*), tapi juga bisa sebagai manajer pusat arsip (*records center manager*), koordinator kelompok kerja (*task force coordinator*), supervisor program (*programe supervisor*).

Kompetensi manajerial (*managerial competence*), yakni kompetensi yang berhubungan dengan berbagai kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam menangani tugas-tugas organisasi, seperti kematangan merencanakan pekerjaan, kemampuan mengkoordinir tim kerja, kemampuan pengawasan, serta kemampuan memecahkan persoalan kearsipan. Kompetensi ini diperlukan untuk posisi memimpin pusat arsip (*records center*) pada suatu perusahaan.

Kompetensi sosial (*social competence*), yakni kemampuan melakukan komunikasi yang dibutuhkan oleh organisasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, bernegosiasi, berinteraksi, dan bersosialisasi. Kompetensi ini diperlukan untuk posisi sebagai kelompok kerja (*task force coordinator*).

Kompetensi intelektual (*intetlectual atau strategic competence*), yakni kemampuan untuk berpikir secara strategis dengan visi jauh ke depan, seperti kemampuan menganalisa masalah, mengantisipasi, merespon dan membaca isu-isu aktual, mencapai target tugas dan tanggung jawab

kearsipan secara efektif dan efisien. Kompetensi ini diperlukan untuk posisi sebagai supervisor program (*programe supervisor*)

Penerapan strategi kebudayaan C.A. van Peursen untuk meningkatkan daya saing TKKI dalam MEA harus mengacu kepada kebijakan pemerintah yang terkait dengan urusan ketenagaakerjaan, kearsipan, dan pendidikan di tanah air. Dalam hal ini, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI), dan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan kearsipan.

C. Epilog

Mengacu strategi kebudayaan C.A. van Persen, upaya TKKI untuk menguasai informasi tentang MEA, menguasai bahasa negara-negara ASEAN, dan meningkatkan kompetensi adalah upaya mencoba menggeser tahap mitis menuju tahap ontologis. Setelah itu, TKKI akan bisa mengambil posisi yang lebih jelas, kepentingan apa yang hendak ditunjukkan, dan hal ini merujuk pada tahap fungsional dengan strategi tertentu yang akan diambil.

Melalui penguasaan atas tiga hal tersebut, TKKI sudah meletakkan dasar yang kuat dalam menghadapi MEA. Dengan demikian, TKKI akan mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja kearsipan skala regional, yang pada akhirnya bisa merebut lapangan kerja kearsipan di negara-negara ASEAN.

Sumrahyadi :

KEBIJAKAN ANRI DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

ASEAN merupakan kelompok negara-negara Asia Tenggara berdiri sejak tahun 1967, sebagai wujud reaksi terhadap perang dingin antara dua kekuatan besar pada saat itu yaitu Blok Barat (Amerika Serikat dan sekutunya) serta Blok Timur (Uni Soviet dan kelompoknya). Selain itu, juga adanya rasa ketakutan dari negara-negara Asia Tenggara terhadap paham komunisme, dan sekaligus sebagai alat promosi untuk menunjukkan kiprahnya di bidang pembangunan ekonomi. Sudah banyak yang telah dilakukan oleh ASEAN untuk mencapai tujuan bersama, salah satu diantaranya adalah dengan terbentuknya komunitas ASEAN untuk memperkokoh dan menunjukkan eksistensinya kepada dunia luar. Adapun bentuk konkritnya adalah masyarakat ASEAN yang menjadi satu kesatuan tanpa adanya batas hambatan negara, khususnya pada bidang politik keamanan, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya. Dari 3 bidang tersebut, penulisan artikel ini akan lebih fokus dalam

bidang ekonomi, terutama dalam perdagangan bebas antar sesama negara ASEAN, yang rencananya akan diberlakukan pada akhir tahun 2015.

Dari hasil kesepakatan, telah disetujui beberapa profesi yang bebas masuk diantara sesama anggota ASEAN, antara lain adalah *engineering services, nursing, architectural, dental practitioner, accountancy services, good manufacturing practices*, dan *tourism professional*.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, maka tinggal sebulan lebih untuk menghadapi pasar bebas tersebut, pertanyaannya adalah bagaimana kesiapan Indonesia khususnya arsiparis dalam menghadapi tantangan tersebut. Banyak hal yang harus disiapkan baik dari segi infra struktur, dasar hukum dan aturan main secara nasional, serta tentu saja sumber daya manusia. Walaupun profesi arsiparis atau profesi bidang kearsipan belum termasuk kesepakatan beberapa bidang yang akan dilakukan secara bebas, tetapi tentunya sudah harus

dipersiapkan sejak dini agar jangan sampai tenaga profesional asing bidang kearsipan masuk dengan bebas ke negara tercinta.

Tantangan dan Peluang

Data secara internasional menunjukkan bahwa Indonesia masih belum menggembirakan dan perlu kerja keras dalam kesiapan untuk menghadapi berbagai kendala, karena dalam banyak hal kita ketinggalan dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Selain Rasio Gini yang semakin melebar, yaitu 0,41 pada tahun 2013, juga tingkat daya saing Indonesia masih pada ranking 38 pada tahun 2013 masih jauh di bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Pada tahun 2014 pada ranking 34, memang ada kenaikan tetapi belum terlalu signifikan dan juga masih berada di bawah beberapa negara ASEAN lainnya.

Produktivitas kerja juga masih menjadi kendala yaitu 36 % dibandingkan Amerika Serikat (AS),

maksudnya adalah jam kerja Indonesia baru mencapai 36 % dari jam kerja AS, sementara Kamboja sudah 46 %, Malaysia 43 %, dan Thailand 37 %. Bandingkan juga dengan prosentase tenaga terampil (2012) Indonesia yang masih pada kisaran 4,6 % dari 1000 orang tenaga kerja, Singapura 34,7 %, Malaysia 32,6 %, atau bahkan Filipina sebesar 8,3 %. Hal lain yang juga masih mengkhawatirkan adalah Human Development Index dengan nilai 0,629 masih jauh di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Sementara dari lama pendidikan Indonesia masih rata-rata 5,8 tahun yang relatif sangat rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya, ditambah lagi kualitas pendidikan yang belum sepenuhnya mendukung, misalnya dari segi kurikulum, tenaga pendidik, dan infrastruktur.

Dengan melihat data-data tersebut di atas, maka secara garis besar dapat dikemukakan beberapa kendala antara lain adalah : (a) Masih tingginya jumlah pengangguran yang terselubung; (b) Rendahnya jumlah wirausaha baru; (c) Pekerja Indonesia masih didominasi oleh tenaga kerja yang tidak terdidik, sekitar 50 % adalah tenaga lulusan SD; (d) Mulai meningkatnya jumlah pengangguran tenaga terdidik karena keterbatasan lapangan pekerjaan serta tidak ada kesesuaian antara lulusan dengan kebutuhan pasar; (e) Masih didominasi oleh sektor informal; (f) Masih adanya tuntutan dari pekerja untuk upah minimum, tenaga kontrak dan jaminan sosial tenaga kerja yang belum tuntas; (g) Masalah TKI yang kurang terdidik dan kurang terampil yang tersebar di luar negeri;

Demikian beberapa kendala Sumber Daya Manusia Indonesia secara nasional, kemudian secara khusus di bidang kearsipan juga masih mengalami beberapa kendala jika dikaitkan dengan peraturan perundangan yang berlaku

Dalam peraturan perundangan disebutkan bahwa yang dimaksud

dengan SDM Kearsipan pada dasarnya meliputi arsiparis, pimpinan unit kearsipan dan lembaga kearsipan dan pejabat fungsional umum pengelola kearsipan. Kemudian lebih lanjut lagi pada Pasal 29 UU Nomor 43 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan harus dipimpin oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan. Dengan demikian jelas bahwa profesionalisme SDM kearsipan menjadi hal yang sangat penting sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan.

Terkait dengan masalah Sumber Daya Manusia (SDM), pada prinsipnya tidak terlepas dari masalah kuantitas dan kualitas. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Soekidjo Notoatmodjo dalam bukunya "Pengembangan Sumber Daya Manusia" mengemukakan bahwa kalau bicara masalah SDM maka tidak dapat terlepas dari dua aspek yaitu kuantitas dan kualitas. Yang dimaksudkan dengan kuantitas adalah jumlah pegawai, yang relative tidak begitu penting dibandingkan dengan kualitas. Adapun kualitas SDM juga menyangkut dua aspek yaitu aspek kualitas fisik dan kualitas nonfisik yang berhubungan dengan kemampuan bekerja, berpikir dan keterampilan lainnya, sehingga upaya meningkatkan kualitas SDM ini juga dapat diarahkan pada dua aspek tersebut. Notoatmodjo lebih tegas lagi mengatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas fisik dapat diupayakan melalui program kesehatan dan gizi. Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan kualitas nonfisik maka upaya pendidikan dan pelatihan adalah yang paling diperlukan.

Kemudian kalau dikaitkan pengertian kuantitas SDM Indonesia memang tidak diragukan karena merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat.

Jumlah penduduk (SDM) yang besar ini menjadi potensi, peluang dan kekuatan ekonomi jika dapat didayagunakan secara optimal.

Sementara secara kualitas, beberapa ahli mengemukakan pendapat misalnya, Buchari Zainun lebih khusus mengatakan bahwa "Sumber daya manusia yang bermutu adalah kerja yang dikerjakannya akan menghasilkan sesuatu yang memang dikehendaki dari pekerjaan tersebut. Bermutu bukan hanya pandai tetapi memenuhi semua syarat kualitas yang dituntut pekerjaan tersebut sehingga pekerjaan itu dapat benar-benar diselesaikan menurut yang dikehendaki. Syarat-syarat kualitatif yang dikehendaki itu umpamanya kemampuan, kecakapan, keterampilan, kepribadian, sikap dan prilaku".

Suyadi Prawiro Sentono, mengatakan bahwa "Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan sumber daya manusia yang produktif dan mampu bekerja secara efisien disamping potensial mempunyai keunggulan kompetitif"

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, secara kuantitas tenaga profesional kearsipan dalam hal ini arsiparis yang merupakan bagian dari SDM kearsipan dirasakan masih sangat terbatas baru sekitar 3.300 orang dari seluruh Indonesia baik instansi pusat maupun daerah, jumlah ini relatif sangat jauh dari kebutuhan arsiparis keseluruhan yang diperkirakan mencapai 130.000 lebih. Ini baru kebutuhan arsiparis yang PNS, sementara arsiparis dalam pengertian Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, yaitu seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau diklat kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan, kebutuhannya lebih banyak lagi karena mereka yang bekerja termasuk pada perusahaan dan BUMN. Sementara persyaratan untuk diangkat menjadi arsiparis tingkat terampil

adalah minimal D3 umum yang harus mengikuti diklat pengangkatan arsiparis dan persyaratan lainnya, sedangkan untuk D3 Kearsipan dapat diusulkan langsung untuk diangkat menjadi fungsional arsiparis. Untuk tingkat arsiparis ahli, syarat minimal penganagkatannya adalah S1 umum atau S1(D4) Kearsipan. Permasalahannya adalah belum banyaknya perguruan tinggi yang menawarkan program D3 (vokasi) dan D4 atau S1 Kearsipan, sehingga ada ketimpangan antara supply and demand. Beberapa perguruan tinggi yang menawarkan program kearsipan misalnya baru UGM, Undip, UI, Unpad, Unhas khususnya untuk program D3, sementara untuk program D4 baru UT, kondisi ini tentu sangat memprihatinkan karena kebutuhan begitu besar sementara tenaga terampil yang diciptakan perguruan tinggi masih terbatas. Sedangkan kemampuan instansi dan ANRI untuk menciptakan tenaga arsiparis melalui diklat juga relatif sangat sedikit dan tidak seimbang dengan kebutuhan ril.

Secara kualitas juga masih cukup memprihatinkan, arsiparis banyak yang belum siap untuk menghadapi tantangan perkembangan jaman dan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang begitu pesat. Bahkan untuk pimpinan lembaga kearsipan khususnya untuk daerah maupun perguruan tinggi lebih memprihatinkan lagi, karena banyak mereka yang diangkat sebagai pimpinan unit kearsipan maupun lembaga kearsipan tidak mempunyai kompetensi di bidang kearsipan dan kurang mempunyai profesionalisme. Banyak diantara mereka yang diangkat karena tim suksesnya kepala daerah atau nuansa politis lainnya sehingga mereka tidak memahami kegiatan kearsipan dan tidak profesional. Dampaknya adalah kegiatan pengelolaan kearsipan tidak berfungsi secara optimal, hal ini yang perlu mendapat perhatian khusus dan tantangan buat ANRI untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Bisa dibayangkan apa yang

akan terjadi jika profesi kearsipan termasuk bidang kegiatan yang akan diberlakukan perdagangan secara bebas pada akhir tahun 2015 ini, tenaga asing baik tingkat terampil maupun tingkat ahli atau bahkan pimpinan unit dan lembaga kearsipan akan dikuasai oleh tenaga asing yang memang mempunyai keahlian dan kompetensi.

Kebijakan ANRI

Berdasarkan data tersebut di atas dan serta kendala yang dihadapi, ada beberapa kebijakan yang harus dilakukan dalam mempersiapkan SDM pada MEA yang akan datang, antara lain yakni pertama, perlu pengembangan standar kompetensi dari profesi kearsipan serta pembentukan lembaga sertifikasi yang mempunyai kewenangan dalam memberikan sertifikasi profesi berskala regional dan internasional. Dalam hal ini ANRI dapat berfungsi sebagai lembaga yang dapat mengeluarkan sertifikasi untuk profesi arsiparis sesuai kompetensi.

Kedua, SDM kearsipan juga perlu mendapatkan peningkatan kemampuan dan keahlian melalui diklat teknis kearsipan agar dapat memudahkan mereka dalam

implementasi kearsipan. Diklat ini bukan saja diperuntukkan arsiparis, tetapi juga bagi SDM kearsipan lainnya misalnya pimpinan unit kearsipan atau lembaga kearsipan. Lebih khusus bagi pimpinan lembaga kearsipan daerah yang memang tidak mempunyai latar belakang kearsipan dan tidak mempunyai kompetensi yang memadai, sehingga pembekalan buat mereka sangat diperlukan

Ketiga, adanya perubahan paradigma dari perguruan tinggi yang tidak hanya menciptakan SDM dari segi keilmuan tetapi juga SDM yang terampil serta mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan pasar global, sehingga pembukaan program kearsipan khususnya untuk tingkat terampil sangat dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan minimal pengangkatan arsiparis. Kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dilakukan untuk mengantisipasi pemenuhan kebutuhan arsiparis.

Keempat, Untuk penambahan jumlah arsiparis juga dilakukan dengan kebijakan in passing bagi pengangkatan pertama arsiparis terampil dengan persyaratan pendidikan dari SLTA ditambah dengan beberapa persyaratan



Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Kearsipan, ANRI juga turut mengundang pakar kearsipan internasional untuk berbagi pengetahuan mengenai perkembangan kearsipan di berbagai belahan dunia.



Kerja Sama ANRI dengan Universitas Indonesia di bidang penyelenggaraan kearsipan. ANRI terus melaksanakan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia dalam rangka pengembangan kualitas penyelenggaraan kearsipan

teknis lainnya. Masa in passing ini akan berlaku selama 2 tahun dan akan berakhir pada akhir tahun 2016;

Kelima, untuk menambah animo seseorang untuk menjadi arsiparis, ANRI juga sedang memperjuangkan kenaikan tunjangan jabatan fungsional arsiparis. Informasi terakhir disebutkan bahwa ijin prinsip dari Kementerian Keuangan sudah disetujui tinggal menunggu Peraturan Presidennya. Dalam waktu yang sama juga telah diajukan tunjangan profesi sesuai amanat undang-undang.

Keenam, pengembangan pusat latihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar yang berbasis kompetensi perlu dibuka secara lebih banyak serta mengoptimalkan pusat diklat kearsipan ANRI untuk dapat memberikan keterampilan bagi arsiparis dan pengelola kearsipan dalam usaha menjalankan kegiatan sehari-hari;

Ketujuh, kebijakan bantuan dana dekosentrasi khususnya bagi daerah propinsi untuk melakukan diklat pengangkatan arsiparis yang rencananya akan dimulai lagi tahun depan dengan biaya sepenuhnya dari ANRI. Sebetulnya program ini pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu, dan diselingi program Arsip Masuk Desa dengan pembekalan kearsipan khususnya bagi sekretaris kelurahan atau juga sekretaris desa. Hanya program beberapa tahun yang lalu dirasakan kurang berhasil, karena ternyata peningkatan kuantitas arsiparis pada lingkungan pemerintah daerah tidak mengalami kenaikan secara signifikan. Berdasarkan pengalaman beberapa tahun yang lalu, maka untuk program mendatang nampaknya perlu untuk terus dipantau agar peserta yang telah mengikuti diklat kearsipan betul-betul diangkat menjadi pejabat fungsional arsiparis.

Kesimpulan

Dengan akan diberlakukannya MEA pada akhir tahun 2015, yaitu dengan ditetapkan pasar perdagangan bebas tanpa ada batas negara diantara negara-negara ASEAN merupakan suatu tantangan yang harus segera diantisipasi oleh Indonesia agar negara kita tidak hanya dijadikan pasar bagi produk negara ASEAN lainnya. Peluang ini harus diciptakan agar Indonesia juga dapat menjadi produsen yang memasarkan produk unggulannya ke negara ASEAN lainnya. Khusus bidang kearsipan, untuk menghadapi tantangan global dan regional tersebut, sekali lagi perlu disiapkan SDM kearsipan yang berkualitas dan kompeten agar dapat bersaing secara profesional dan dapat bersaing pada pasar regional serta mencegah masuknya tenaga asing.



Adhie Gesit Pambudi :

KESIAPAN GENERASI MUDA KEARSIPAN INDONESIA DALAM MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Jika kita mengamati kata mutiara Presiden Pertama Indonesia diatas, terdapat makna yang sangat mendalam tentang kekuatan yang dimiliki generasi muda (*youth*). Mereka memegang peranan penting dalam keberlangsungan di masa kini dan menentukan masa depan bangsa di tangan mereka. Salah satu generasi muda di negeri ini adalah Generasi Muda di bidang Kearsipan (selanjutnya penulis sebut Generasi Muda Kearsipan Indonesia). Mereka adalah generasi yang menggenggam masa depan kemajuan dunia kearsipan Indonesia. Generasi Muda Kearsipan Indonesia adalah generasi muda yang berkecimpung di dunia kearsipan yang mencakup para pelajar, para mahasiswa, ataupun para praktisi di bidang kearsipan yang berusia muda baik yang duduk di pemerintahan (struktural ataupun fungsional) ataupun di sektor swasta. Tulisan ini akan menitikberatkan pada “Generasi

“Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia”. (Soekarno)

Muda Kearsipan Indonesia” yang bekerja di bidang kearsipan dengan usia yang masih muda serta relatif masih baru dengan pengetahuan di bidang kearsipan.

Tugas Generasi Muda Kearsipan Indonesia adalah membawa dunia kearsipan Indonesia menuju kelas dunia baik di level internasional ataupun regional. Indonesia nantinya harus setara dengan negara-negara maju yang memiliki budaya kearsipan yang maju seperti Amerika Serikat,

Kanada, Belanda, Australia, dan berbagai negara lainnya di masa yang akan datang. Namun demikian, ujian terbesar yang berada di depan mata bagi Generasi Muda Kearsipan Indonesia di tahun ini adalah di level regional khususnya ASEAN dengan pemberlakuan *Asean Economic Community* (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang sering disebut dengan MEA yang akan diberlakukan pada akhir tahun 2015.

Dalam sejarahnya, pembentukan

ARTIKEL LAPORAN UTAMA

MEA dilakukan 12 tahun lalu ketika para pemimpin ASEAN melakukan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang berlangsung di Bali pada tahun 2003. Pada saat itu, para petinggi ASEAN mendeklarasikan pembentukan MEA yang akan diberlakukan pada tahun 2015. MEA merupakan sebuah konsepsi pasar bebas terpadu di wilayah Asia Tenggara di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja. Salah satu bidang yang terkena dampak dari pemberlakuan MEA adalah bidang kearsipan khususnya dalam bidang tenaga kerja kearsipan dan layanan jasa kearsipan. Pemberlakuan MEA membuat praktisi kearsipan Indonesia harus mampu meningkatkan daya saing termasuk bagi mereka yang masih berusia muda dan merupakan Generasi Muda Kearsipan Indonesia.

Perkuat Substansi dengan Belajar Ilmu Kearsipan Secara Lebih Mendalam

Modal utama daya saing Generasi Muda Kearsipan Indonesia adalah memiliki substansi ilmu kearsipan yang kuat. Generasi Muda Kearsipan Indonesia adalah kader pemimpin Indonesia di bidang kearsipan yang nantinya akan dapat mengambil keputusan dan kebijakan yang tidak hanya bersifat *strategic* (strategis), tetapi juga *scientific* (ilmiah). Generasi muda adalah generasi penerus. Namun demikian tidak ada yang bisa diteruskan jika mereka tidak dididik menjadi lebih baik dari generasi sebelumnya. Aspek fundamental dalam bidang kearsipan adalah ilmu kearsipan yang kuat dan mendalam.

Pendekatan terbaik dalam memperkuat substansi ilmu kearsipan bagi Generasi Muda Kearsipan Indonesia adalah dengan

mempelajari kearsipan sebagai ilmu (*science*). Selama ini, pendekatan yang digunakan oleh Generasi Muda Kearsipan Indonesia dapat dikatakan kurang tepat, karena minimnya pengetahuan dalam dunia kearsipan baik dalam ilmu maupun kebijakan kearsipan. Hal ini membuat Generasi Muda Kearsipan Indonesia menjadi terjebak pada konsep praktis dan umum (*general*). Oleh karena itu, kebanyakan Generasi Muda Kearsipan Indonesia hanya mengetahui kearsipan di kulit luarnya. Hal ini mengakibatkan, ketika terlibat pada diskusi kearsipan yang mendalam, Generasi Muda Kearsipan Indonesia yang tidak mengetahui ilmu kearsipan secara lebih mendalam hanya bisa berbicara hal-hal yang umum. Ilmu kearsipan adalah sesuatu yang terus berkembang. Di sisi lain, kebijakan kearsipan menyesuaikan perkembangan ilmu kearsipan. Generasi Muda Kearsipan Indonesia harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan ilmu kearsipan baik secara nasional, namun utamanya secara internasional.

Ilmu kearsipan lebih bersifat universal, berbeda dengan kebijakan kearsipan yang pada umumnya hanya berlaku secara nasional. Oleh karena itu, ilmu kearsipan dapat diaplikasikan di berbagai negara. Dalam kaitannya dengan MEA, Generasi Muda Kearsipan Indonesia yang menguasai ilmu kearsipan lebih memiliki daya saing yang tinggi sehingga kemampuan mereka akan dapat diaplikasikan di negara-negara anggota MEA.

Aspek Fundamental Kemampuan Bahasa Inggris dan Aspek Lainnya

Kemampuan utama lain yang harus dimiliki Generasi Muda Kearsipan Indonesia adalah aspek bahasa. Pengetahuan bahasa asing mutlak

diperlukan dalam menyongsong MEA. Salah satu bahasa yang menjadi dasar adalah Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang paling umum digunakan termasuk di Asia Tenggara. Bagi Generasi Muda Kearsipan Indonesia, kemampuan berbahasa Inggris merupakan aspek fundamental. Hal ini berkaitan dengan proses komunikasi pada MEA yang tidak lagi melibatkan satu bangsa, namun antar bangsa dari negara yang berbeda.

Generasi Muda Kearsipan Indonesia mau tidak mau dan suka tidak suka, harus belajar berbahasa Inggris dengan baik. Score TOEFL ataupun IELTS di atas rata-rata dapat menjadi ukuran bagi kemampuan Generasi Muda Kearsipan Indonesia dalam menghadapi MEA. Peningkatan kemampuan ini dapat dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Inggris yang intensif bagi Generasi Muda Kearsipan Indonesia.

Kemampuan dan kesiapan Generasi Muda Kearsipan Indonesia dalam ilmu kearsipan dan bahasa Inggris merupakan modal utama dalam menyongsong MEA. Namun demikian, terdapat berbagai aspek lainnya selain kedua aspek tersebut seperti penguatan internal Generasi Muda Kearsipan Indonesia seperti profesional dan visioner. Selain itu, Generasi Muda Kearsipan Indonesia harus memiliki jiwa petarung dan berkompetisi yang tinggi agar dapat bersaing di level ASEAN. Aspek tersebut menjadi penting khususnya dalam menghadapi MEA. Mari kita songsong MEA dengan Generasi Muda Kearsipan Indonesia yang berkualitas!

DR. MUSTARI IRAWAN, MPA MEMIMPIN SARBICA MENYONGSONG MEA



Pemberlakuan *Asean Economic Community/Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)* pada akhir tahun 2015 memberikan dampak yang besar terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Salah satu bidang yang terkena dampak baik secara langsung ataupun tidak langsung adalah bidang kearsipan. Organisasi yang memegang peranan penting dalam dunia kearsipan di Asia Tenggara adalah *South East Asia Regional Branch of International Council on Archives (SARBICA)*. Organisasi ini merupakan cabang Dewan Kearsipan Internasional/ *International Council on Archives (ICA)* untuk regional Asia Tenggara.

Pada September 2014, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan Dr. Mustari Irawan, MPA., terpilih sebagai Chairman/Presiden SARBICA. Sebuah pretasi yang membanggakan bagi dunia kearsipan Indonesia, ketika Indonesia kembali memimpin organisasi kearsipan di Asia Tenggara. Rubrik ini akan mengupas peran SARBICA sebagai organisasi kearsipan di Asia Tenggara dan strategi yang digunakan dalam menyongsong MEA di mata Chairman SARBICA dalam bentuk Wawancara Eksklusif.

Bagaimana sejarah, peran, dan fungsi SARBICA sebagai organisasi kearsipan di kawasan Asia Tenggara?

SARBICA berdiri pada 1968 yang sebenarnya sudah dibicarakan sejak 1965 di level ASIA untuk membentuk suatu asosiasi lembaga kearsipan di wilayah masing-masing regional.

SARBICA itu sendiri sebetulnya adalah cabang ICA di Asia Tenggara. Tujuan yang paling utama dari SARBICA adalah menguatkan hubungan antar negara-negara ASEAN, antar lembaga kearsipan, dan organisasi yang peduli pada masalah kearsipan. Kedua, adalah membangun dan meningkatkan seluruh substansi yang terkait dengan

masalah kearsipan termasuk perlindungan dan penyelamatan arsip warisan budaya di wilayah Asia Tenggara. Ketiga, adalah memberikan kesempatan/hak akses terhadap arsip yang terdapat di masing-masing negara di wilayah Asia Tenggara. Keempat, adalah bagaimana kita bisa mengatur, mengkoordinasikan, mensinergikan kegiatan kearsipan di negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Kelima, membangun kerjasama dengan organisasi yang berhubungan dengan proses atau kegiatan dokumentasi dari kebudayaan manusia seperti perpustakaan, museum, dan sebagainya. Tentu saja, tidak bisa dilepaskan bahwa SARBICA adalah cabang dari ICA. Oleh karena itu, SARBICA harus bisa menjalankan sebagian tugas dari fungsi atau tujuan yang ada di ICA.

Apa arti penting keberadaan Indonesia di SARBICA?

Keberadaan Indonesia di SARBICA sangat penting sekali karena Indonesia mempunyai politik luar negeri bebas aktif. Artinya kita dapat berperan aktif di daerah regional tertentu dan kita bebas memilih asosiasi atau organisasi internasional yang sejauh itu menguntungkan negara kita. Jadi saya melihat bahwa SARBICA itu menjadi sangat penting sekali karena Indonesia berada di wilayah regional Asia Tenggara.

Bagaimana proses yang dilalui Bapak sehingga terpilih menjadi Chairman SARBICA?

Iya, waktu itu tahun lalu, ketika itu adalah proses pemilihan. Pada awalnya saya menjagokan Filipina, namun justru Filipina memilih Indonesia. Sebenarnya ada ketertarikan juga dari Brunei, namun akhirnya mereka juga memilih Indonesia dalam hal ini diwakili oleh saya. Setelah terpilih, saya kemudian harus memimpin rapat. Saya menggantikan Chairman SARBICA sebelumnya dari Vietnam untuk memimpin rapat. Hal ini merupakan pengalaman pertama bagi saya memimpin rapat SARBICA. Di forum ini, saya menyampaikan rancangan kegiatan yang akan



The 19th SARBICA General Conference, The 20th Executive Board Meeting, Vietnam, 2014.

dilaksanakan di masa depan.

Apakah benar ketika itu Bapak dipertemukan dengan Wakil Perdana Menteri Vietnam setelah terpilih sebagai Chairman?

Iya, hal ini yang membuat surprise bagi saya. Saya dan seluruh delegasi anggota SARBICA dipertemukan dengan Wakil Perdana Menteri Vietnam. Pertemuan ini dilakukan di sebuah tempat yang menunjukkan gambaran yang luar biasa tentang rasa hormat bangsa Vietnam terhadap Ho Chi Minh (Pemimpin Revolusioner Vietnam) dengan adanya patung figurinya di ruangan tersebut. Saya duduk di bersebelahan dengan Wakil Perdana Menteri Vietnam dengan bantuan penerjemah Vietnam – Inggris. Jadi saya berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris untuk kemudian diterjemahkan ke bahasa Vietnam. Di sini, saya menyampaikan kegiatan Seminar dan tentang SARBICA. Hal inilah yang membuat saya sangat surprise, karena di Indonesia sendiri saya belum pernah mengalami hal seperti ini.

Langkah-langkah apa yang kemudian diambil setelah Bapak terpilih?

Yang saya lakukan setelah terpilih adalah membuat program selama 2 tahun (sesuai dengan masa jabatan

Chairman SARBICA yaitu 2 tahun). Jadi saya membuat program tahun ini dan tahun yang akan datang. Kemudian, saya membahas program tersebut dengan Sekretaris Jenderal SARBICA. Saat ini Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, dan Treasurer SARBICA, ketiganya berasal dari Malaysia. Saya memadukan kegiatan yang sudah ada dan usulan saya, karena 2 tahun memang bukan waktu yang panjang. Jadi program ini lebih kepada pembangunan dan penguatan kerjasama di antara negara-negara Asia Tenggara. Sebagai awal, saya ingin membuat MoU di antara negara-negara tersebut.

Apa saja bentuk dari program yang tengah Bapak susun?

Program-program yang saya susun tahun ini, diantaranya Pameran untuk arsip-arsip negara. Sebagian kegiatan ini sudah dilaksanakan yaitu pada peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) di Jakarta dan Bandung. Tahun 2015 ini akan ada juga kerjasama pameran arsip dengan Vietnam.

Selain pameran adakah program lainnya?

Beberapa kegiatan lain yang sudah menjadi program dari negara lain. Salah satunya adalah Malaysia yang menyelenggarakan *Training* atau

pelatihan kearsipan. Hal ini belum bisa dilakukan Indonesia. Sebenarnya, saya menginginkan *training* ini juga bisa dilakukan di Indonesia dengan peserta dari negara-negara di Asia Tenggara. Tahun depan, saya ingin membuat suatu semacam naskah sumber yang berisi tentang hubungan diplomatik diantara negara-negara di Asia Tenggara. Kita akan menghimpun arsip di negara-negara tersebut untuk kemudian diterbitkan dalam bentuk buku seperti buku *Exclusive Heritage of the Archipelago* milik ANRI.

Bagaimana dengan perkembangan kearsipan di Asia Tenggara dengan adanya SARBICA?

Sebenarnya fungsi saya sebagai Chairman adalah bagaimana membangun kerjasama antar negara. Hal ini disebabkan karena negara-negara di Asia Tenggara itu berbeda-beda. Yang paling menonjol barangkali adalah Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Singapura sebenarnya juga bagus, namun Singapura adalah negara kecil sehingga penyelenggaraan kearsipannya tidak terlalu rumit, ditambah Teknologi Informasi mereka yang relatif maju. Namun demikian, Singapura memang tidak sekompleks Indonesia.

Bagaimana dengan negara-negara lainnya?

Di Asia Tenggara, banyak negara – negara yang masih harus kita bantu untuk meningkatkan penyelenggaraan kearsipannya seperti Laos, Kamboja, dan Myanmar. Sebagai Ketua SARBICA, saya harus melihat kondisi ini. Kerjasama dengan Indonesia juga dilakukan dengan Myanmar ketika Indonesia mengajukan nominasi *Memory of the World* (MoW) untuk arsip Konferensi Asia Afrika. Mereka sangat mendukung penominasian ini. Hal ini merupakan dampak dari kerjasama dalam asosiasi yang kita namakan SARBICA.

Terkait dengan MEA, bagaimana strategi SARBICA untuk menghadapinya?

Pada dasarnya MEA lebih menyangkut sektor Ekonomi seperti barang, jasa, modal, investasi dan sumber daya manusia (SDM). Hal yang paling relevan adalah SDM. Hal ini dikarenakan substansi kearsipan saya rasa hampir sama, hanya perkembangannya yang berbeda-beda. Seminar di Malaysia pada Agustus 2015 lalu yang bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang proses preservasi yang benar. Hal ini sudah dilakukan Indonesia dan beberapa negara lain seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Kita ingin membangun pemahaman yang sama diantara negara-negara anggota sekaligus mengetahui penyelenggaraan kearsipan di masing-masing negara. Dengan adanya MEA, kita dapat mengetahui negara mana saja yang tertinggal sehingga kita dapat memberikan dukungan dan bantuan. Indonesia masih bisa bersaing dengan negara seperti Malaysia karena Indonesia sangat besar penduduknya.

Bagaimana dengan sektor Sumber Daya Manusia?

Terkait dengan SDM, memang sampai saat ini belum ada sinyal. Hal ini bukan berarti kita belum siap, Indonesia harus siap. Hingga saat ini Malaysia juga belum siap. Jika kita sudah bisa mempersiapkan hal ini, berarti kita sudah siap bersaing. SDM Kearsipan Indonesia harus berkualitas dan profesional. Jadi, mereka bukan hanya bisa bekerja di Indonesia atau pemerintahan, tetapi juga di sektor swasta. Dengan demikian mereka juga bisa bekerja ke luar Indonesia. Namun demikian hal ini perlu dibicarakan secara fokus di dalam forum SARBICA terkait dengan dampak dari MEA

terhadap dunia kearsipan terutama pada bidang layanan jasa kearsipan dan SDM.

Bagaimana agar MEA menjadi isu strategis di forum SARBICA?

Sampai saat ini, kita masih berputar dengan masalah masalah substansi kearsipan. Hal ini disebabkan karena kondisi yang berbeda di satu negara dan negara lain. Oleh karena itu, kita lebih mengutamakan untuk bisa meningkatkan peran lembaga. Fungsi dari SARBICA adalah mengurangi kesenjangan perkembangan kearsipan antar negara-negara anggota. Dengan adanya MEA, Asia Tenggara menjadi pangsa pasar yang besar dimana batas wilayah antar negara semakin menghilang secara ekonomi.

Apakah ada dukungan bagi negara-negara tertinggal ?

Pada dasarnya, dukungan yang paling mudah adalah dengan mengadakan seminar dan pelatihan. Pelatihan ini sudah bisa dilakukan oleh Malaysia. Mereka memiliki anggaran khusus karena pelaksanaan pelatihan ini cukup lama, sekitar 2 minggu. Dahulunya sampai tiga bulan. Tujuannya adalah saling berbagi pengetahuan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Kearsipan di Asia Tenggara. Indonesia juga melakukan hal tersebut dalam bentuk Seminar. Dalam hal Disaster Management on Archives, Indonesia memiliki banyak pengalaman sehingga dapat dibagikan ke negara lain. Indonesia dapat menyelenggarakan *Training* untuk *Disaster Management on Archives*. Sebenarnya banyak negara tertinggal mengajukan permintaan pembiayaan menghadiri seminar di Indonesia. Namun, kita masih sulit untuk membiayainya.

Apa langkah yang diambil oleh Bapak sebagai Chairman SARBICA?

Sebagai Chairman, saya harus mampu membangun kesadaran di berbagai negara. Namun, hal ini bukanlah merupakan hal yang mudah karena perbedaan kondisi di masing-masing negara. Seperti halnya pada saat pameran. Saya sudah mengajukan permintaan ke semua negara. Namun, hanya beberapa negara yang memberikan respon. Khazanah yang diberikan dalam rangka pameran juga masih sangat terbatas sekali.

Terakhir, apa harapan Bapak

sebagai Chairman SARBICA untuk kedepannya dalam menyongsong MEA?

Pertama, saya menginginkan Indonesia dapat menjadi leader di dalam SARBICA. Indonesia harus menjadi suatu kekuatan di bidang kearsipan yang lebih di antara negara-negara lain. Dengan demikian, kita bisa mengambil peluang pangsa pasar di Asia Tenggara terutama terkait Sumber Daya Manusia Kearsipan. Namun demikian, saya harus melihat kepada kondisi internal di Indonesia. Alasan saya menjadi Chairman SARBICA adalah karena dahulu Indonesia mempunyai peranan yang besar sekali di ASEAN. Indonesia dikenal sebagai pemimpin ASEAN yang dituakan dan dihormati. Oleh karena itu, kita perlu membangun kesatuan untuk bersama-sama membangun kersiapan Indonesia jauh lebih baik dan lebih kuat.

Kedua, saya ingin membuat dan meningkatkan kondisi kearsipan yang relatif sama diantara negara-negara ASEAN. Negara-negara yang sudah relatif maju diharapkan bisa mendukung negara-negara yang masih tertinggal di bidang kearsipan. Satu hal yang tak kalah pentingnya adalah dimana negara-negara ASEAN bisa membangun kerjasama di bidang kearsipan tanpa dibatasi sekat-sekat tertentu. Hal ini membutuhkan adanya trust dari masing-masing negara anggota. Kita tidak bisa membangun kebersamaan jika trust itu tidak ada. Hal ini sudah harus diwujudkan pada level yang terkait dengan kerjasama politik dan ekonomi.

Ketiga, saya menginginkan agar SARBICA dapat masuk dalam tataran ICA. Pada nantinya harus ada seseorang dari Asia Tenggara yang bisa menjadi Presiden atau Chairman ICA. Hal ini membuat SARBICA dapat menjadi satu asosiasi yang diperhitungkan di level internasional. Jika hal ini dapat dicapai, kita akan dapat lebih mudah membangun SARBICA untuk menjadi lebih baik. Seperti kita ketahui, terdapat perbedaan diantara cabang-cabang regional ICA (regional branches) seperti SARBICA di Asia Tenggara, EASTICA di Asia Timur, CARBICA di Kepulauan Karibia, serta cabang-cabang lainnya. Dengan demikian, negara-negara ASEAN dapat memiliki peranan di tingkat global khususnya di bidang kearsipan yang terkait dengan Sumber Daya Manusia dan Layanan Jasa Kearsipan. (AGP)

ARSIPARIS TELADAN: BAMBANG PARJONO WIDODO MENGABDI PADA NEGARA DENGAN MENJADI ARSIPARIS

Lahir di Jakarta 48 Tahun yang lalu, Bambang Parjono Widodo lulusan S2 Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia ini mengawali sebagai karir sebagai CPNS ANRI ditahun 1993 dan kemudian menjadi arsiparis tingkat ahli di tahun 1994. Sempat berfikir apa itu arsiparis, apakah profesi dengan jargon mempelajari arsip yang ada di paris celotehnya. Angkatan ke 2 dalam rekrutmen arsiparis ini jatuh cinta kepada arsiparis karena merupakan profesi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip yang saat waktu itu lebih kepada arsip statis dan pembinaan kearsipan dinamis yang ada di luar lembaga kearsipan.

“Arsiparis adalah profesi terpilih, karena banyak orang tidak tau dengan profesi ini”

Arsiparis merupakan pilihan ketika beliau ingin mengabdikan kepada negara. Walaupun

sekarang orang menganggap arsiparis itu terpilih karena dari sekian banyak formasi yang tersisa dari pilihan orang adalah arsiparis. Menjadi arsiparis merupakan pilihan terakhir, tentu ini berdasarkan karena ketidak tahuan, keheranan beliau tersibak dengan gambaran hampir 21 tahun profesi ini ada, ternyata masih belum ada perkembangan. Setali tiga uang masalahnya tidak semua orang merasakan bahwa arsiparis merupakan pekerjaan bergengsi ujar beliau, Bambang Parjono Widodo memberikan semangat dengan mengajarkan secara terbalik dengan menghadapkan uraian tugas arsiparis yang memiliki pekerjaan yang berat. Dengan begitu akan timbul motivasi dan energi yang positif bahwa dengan bermodalkan menguasai dan memahami arsip, Arsiparis dapat membina urusan kearsipan kepelosok nusantara. Sampai saat ini tinggal 3 provinsi saja yang beliau belum injak.

Bambang Parjono Widodo adalah sosok yang optimis b a h w a

arsiparis akan maju, harapannya bahwa arsiparis jangan sebagai obat sesaat. artinya orang mengenal arsiparis hanya karena ada arsip yang hilang, ada arsip yang menumpuk. Tidak pernah jika ada informasi yang bagus, informasi yang cerdas merujuk kepada kinerja arsiparis, tetapi selalu jika ada permasalahan maka kita butuh arsiparis.

Ada cerita menarik yang dituturkan ketika beliau pernah mengikuti 2 kali uji kelayakan dan kepatuhan (*fit and proper test*) sebagai anggota Komisi Informasi Pusat (KIP), ternyata banyak orang penting yang di DPR tidak mengetahui profesi Arsiparis. Hal ini menjadi cambuk bahwa seharusnya terdapat peran pembina kearsipan terhadap calon anggota KIP yang harus mengetahui tentang arsip, karena sengketa informasi berawal dari arsip. Walaupun gagal, pria yang akrab dipanggil Bambang ini memiliki kebanggaan bahwa profesi Arsiparis dalam rangka *fit and proper test* sebagai anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) pernah diberitakan dalam media nasional kurun waktu tahun 2009 dan 2013.

Karir Bambang Parjono Widodo memuncak dengan ditetapkannya sebagai Pemenang Arsiparis Teladan Nasional Tahun 2015 dalam kategori Jabatan Fungsional Arsiparis Tingkat Keahlian melalui Keputusan Kepala ANRI Nomor 227 Tahun 2015.



Bambang Parjono Widodo

Menjadi arsiparis berprestasi dan teladan dengan merendahkan beliau menyatakan merupakan kegiatan yang menunggu waktu saja, karena ada ruang dan kesempatan menjadi juara dilingkungan ANRI dan kemudian tingkat nasional.

Harapan beliau ketika telah menjadi teladan adalah dipercaya dalam mengerjakan hal yang besar dibidang kearsipan dan diperdagangkan. Dalam rangka menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN, bagi fungsional arsiparis tidak berdampak langsung, karena jabatan ini disandang oleh PNS, berbeda dengan arsiparis diluar PNS yang akan bersaing dengan pegawai dari luar.

“Arsiparis di lingkungan pusat jasa harus mempersiapkan datangnya MEA”

Kedepan, butuh dialog antara arsiparis PNS dengan Non PNS dalam rangka menyamakan persepsi dan membangun persiapan terhadap MEA, mereka butuh penguatan dalam bentuk regulasi. Ketua IAA periode 2014-2017 menuturkan ketika pemilihan menjadi arsiparis teladan nasional bahwa dari 70% peserta yang ikut merupakan binaan beliau. Hal itu terungkap secara tidak sengaja beberapa pesaing pada saat pemilihan adalah merupakan murid beliau.

Ikatan Arsiparis ANRI merupakan forum bagi arsiparis, ketika ada arsiparis diangkat menjadi pejabat struktural, ia bukan menjadi IAA. Hal ini merupakan komitmen supaya arsiparis konsern dengan jabatannya. Forum yang memiliki kenaikan pada jumlah anggota yang sebelumnya 127 menjadi 148, beberapa senior sudah mau mendaftar.

Visinya adalah menjadikan IAA sebagai penggerak perubahan, dan IAA harus mandiri. Berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh arsiparis juga menjadi tantangan bagi



Bambang PW menerima penghargaan dari Kepala ANRI Mustari Irawan sebagai Pemenang Arsiparis Teladan Nasional Tahun 2015 dalam Kategori Jabatan Fungsional Arsiparis Tingkat Keahlian

beliau untuk memberikan solusi yang terbaik, misal saja ketika arsiparis mengalami kendala pada saat mengumpulkan angka kredit, maka solusi terhadap permasalahan tersebut sangat dibutuhkan untuk dipecahkan oleh IAA. “Mereka sebetulnya sudah optimal bekerja tetapi tidak diakui pekerjaannya.”

Bambang PW sapaan akrab beliau, memiliki slogan yaitu *control your record before they control you*. Saat ini berada pada pijakan 4 (empat) kaki, yaitu berada pada IAA, sebagai Arsiparis ANRI, sebagai arsiparis SDM Kearsipan, dan AAI. Dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, masih belum optimal karena baru satu saja yaitu mengenai *impassing* yang menjadi pelaksanaan Permenpan tersebut tetapi beberapa peraturan lain yang menjadi pelaksanaan Permenpan tersebut masih belum ditetapkan. Hal ini berdampak kepada nasib arsiparis yang akan tertunda kenaikan pangkatnya satu tahun karena

setiap naik jenjang jabatan harus uji kompetensi, nah itu yang belum kita siapkan walaupun saat ini sedang digarap, ujannya.

Kedepan beliau menginginkan pembinaan arsiparis yang baik, karena “Pembinaan arsiparis yang paling baik adalah mensejahterakan arsiparis. Beliau juga *flashback* ke belakang pada era kepemimpinan Bapak Noerhadi Magetsari bahwa Jabatan arsiparis adalah jabatan terhormat, sangat terhormat, dahulu arsiparis diberi kesempatan dan tempat untuk hadir. Betapa bangganya menjadi arsiparis saat itu.

Arsiparis harus juga memiliki pengetahuan yang komplit, artinya pengetahuan dibidang lainpun harus dikuasai. “arsiparis tidak akan maju kalau tidak memiliki wawasan tentang teknologi informasi. Arsiparis tidak akan maju kalau tidak memiliki wawasan mengenai regulasi.” Profesi arsiparis diharapkan banyak mengisi jabatan-jabatan publik dan juga diharapkan kreatifitas arsiparis dalam menulis di media nasional.

Widhi SP :

MENELUSURI REKAM JEJAK SEJARAH

DIPLOMASI INDONESIA MELALUI *GUIDE* ARSIP

DIPLOMASI INDONESIA 1945-2009

Pendahuluan

Aristoteles, seorang filsuf dari Yunani Kuno berpendapat bahwa manusia adalah hewan sosial. Pada setiap tahap perkembangannya manusia mempunyai kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri, oleh karena itu mereka bekerjasama dan membentuk kelompok-kelompok sosial. Begitu juga sebuah bangsa di dunia, mereka saling membutuhkan dan bekerjasama dengan bangsa lainnya. Hal ini diamini oleh Mochtar Kusumaatmaja yang menjelaskan bahwa hubungan dan kerjasama antar bangsa itu timbul karena adanya kebutuhan yang disebabkan oleh pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia. Fenomena inilah yang sering disebut dengan hubungan internasional.

Dalam melaksanakan hubungan internasional, setiap negara dipengaruhi oleh politik luar negerinya. Politik luar negeri adalah perwujudan dari kepentingan nasional suatu negara terhadap negara lain. Untuk dapat menjalankan politik luar negeri tersebut dibutuhkan sebuah keahlian yang disebut dengan diplomasi. Kata 'diplomasi' sendiri berasal dari bahasa Yunani '*diploin*' yang berarti 'melipat' dan 'diplomas' yaitu sebuah surat jalan yang dicetak pada piringan logam double, dilipat dan dijahit. Kumpulan surat jalan tersebut kemudian disimpan dan dimasukkan dalam arsip terkait

hubungan internasional. (Roy, 1991: 1-2).

Di dalam bukunya yang berjudul *The Principle and Practice of Diplomacy*, K. Panikkar menjelaskan pengertian diplomasi yaitu seni yang mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain (Roy, 1991: 3). Dapat dikatakan pula bahwa tujuan dari diplomasi adalah untuk mengamankan kepentingan nasional dalam kancah internasional. Kepentingan nasional ini dapat dilihat dari aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan.

Diplomasi Indonesia dari Masa ke Masa

Pasca memproklamasikan ke-

merdekaannya, Indonesia segera menjalankan praktik diplomasi. Periode 1945-1949, diplomasi Indonesia terarah pada upaya mendapatkan pengakuan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat di forum internasional. Upaya tersebut telah berhasil mempengaruhi opini dunia yang turut mendukung Indonesia dalam menyelesaikan konflik dengan Belanda. Pada periode ini, dimulai pula praktik diplomasi ekonomi dan diplomasi sosial untuk mendukung perjuangan diplomasi politik. Salah satu caranya yaitu dengan membuka kerjasama perdagangan dan memberikan bantuan kepada negara di kawasan Asia seperti Singapura, Malaysia dan India.

Periode selanjutnya disebut



Upacara pembukaan Konferensi Asia-Afrika di Gedung Merdeka, Bandung, 1955.
Sumber: Arsip Kempen Wilayah Jawa Barat, JB 5501-508 (550420 FP 38)



Kunjungan Presiden Soeharto ke Markas PBB di New York, AS, 28 Mei 1970
 Sumber: Inventaris Arsip Foto Setneg 1966-1989, No. 1808

dengan Demokrasi Liberal (1950-1959) ditandai sebuah prestasi dalam diplomasi Indonesia yaitu keberhasilan menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung. KAA merupakan wujud keberhasilan Indonesia dalam diplomasi politik. Melalui KAA, Indonesia memperoleh dukungan dalam usahanya merebut Irian Barat dari Belanda. Pada periode ini diplomasi ekonomi Indonesia lebih banyak diwarnai dengan usaha menasionalisasi beberapa perusahaan milik Belanda.

Memasuki periode Demokrasi Terpimpin (1959-1967), diplomasi politik-pertahanan Indonesia diwarnai konfrontasi dengan Belanda dalam usaha merebut Irian Barat dan dengan Malaysia. Pada periode ini pula Indonesia bersama Yugoslavia, Mesir, India dan Ghana turut serta dalam pembentukan Gerakan Non Blok (GNB). Gerakan ini selain bertujuan meredakan ketegangan dunia akibat Perang Dingin juga berjuang untuk penghapusan total dari sisa-sisa kolonialisme dan imperialisme. Di bidang ekonomi dan kebudayaan, politik mercusuar ala Soekarno

berperan besar dalam mempengaruhi praktik diplomasi Indonesia. Khusus di bidang ekonomi, Soekarno berhasil memperoleh bantuan modal dan ahli untuk pembangunan sejumlah proyek seperti Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, dan Jembatan Semanggi. Sementara itu,



Berkas-berkas delegasi Indonesia ke KTT Non Blok di Kairo, Juni 1961.
 Sumber: Inventaris Arsip Mohammad Yamin, No. 477.

penyelenggaraan Asian Games IV di Jakarta 1962 dan *Games of New Emerging Forces* (Ganefo) 1963 merupakan puncak keberhasilan Indonesia dalam diplomasi kebudayaan dari aspek olahraga.

Pada era kepemimpinan Soeharto (1967-1998), diplomasi Indonesia lebih mengarah pada normalisasi hubungan dengan Malaysia. Di bidang politik-pertahanan, diplomasi Indonesia ditandai dengan pengiriman sejumlah pasukan keamanan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berperan dalam penyelesaian konflik di negara tetangga, salah satunya konflik di Kamboja. Di bidang ekonomi dan budaya, Indonesia mulai meningkatkan kerjasama khususnya kerjasama regional seperti pembentukan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Selain itu, Indonesia juga semakin aktif dalam organisasi-organisasi internasional seperti *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC), *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) dan lain sebagainya.

Khazanah Arsip Diplomasi Indonesia



ANRI banyak menyimpan rekam jejak dari aktivitas diplomasi Indonesia yang telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, dalam rangka mempermudah akses bagi pengguna maka ANRI menerbitkan *Guide*

KHAZANAH

Arsip Diplomasi Indonesia 1945-2009. *Guide* arsip tersebut berisi uraian deskripsi yang terkait dengan diplomasi Indonesia dari berbagai macam media baik konvensional/kertas, foto, film maupun video. Deskripsi tersebut merupakan hasil penelusuran khazanah arsip terhadap seluruh daftar arsip dan inventaris arsip yang tersedia di unit layanan arsip. Secara keseluruhan terdapat 597 nomor arsip konvensional, 239 nomor arsip foto, 80 nomor arsip film dan video. Informasi tersebut kemudiandikelompokkan menjadi 3 jenis diplomasi, yaitu: diplomasi politik-pertahanan, diplomasi ekonomi dan diplomasi kebudayaan.

hubungan sistem internasional agar mengakomodasi kepentingan suatu negara (Diamond, 1996: 26). Salah satu instrumen yang digunakan untuk mewujudkan hal tersebut adalah politik dan militer. Lebih khusus pengertian diplomasi pertahanan adalah upaya yang dilakukan suatu negara untuk mendukung kebijakan keamanan dan luar negeri dengan menggunakan kekuatan persenjataan dan infrastruktur yang mendukung. Diplomasi pertahanan biasanya dilakukan dalam bentuk kerjasama pertahanan dan bantuan militer. Konsep ini kemudian berubah semenjak berakhirnya Perang Dingin di mana

Praktik diplomasi politik-pertahanan yang dilakukan Indonesia sejak tahun 1945 terekam dalam setiap arsip yang ditampilkan pada bab II *Guide* Arsip Diplomasi Indonesia 1945-2009. Terdapat 339 nomor arsip dari 36 daftar dan inventaris arsip konvensional, 124 nomor arsip dari 13 daftar dan inventaris arsip foto, 19 nomor arsip dari 2 daftar dan inventaris arsip film dan video yang memiliki informasi mengenai diplomasi politik-pertahanan. Informasi tersebut antara lain berupa perundingan dengan Belanda terkait pengakuan kedaulatan (1945-1949) yang banyak terdapat di Inventaris Arsip Sekretariat Negara 1945-1949,



Sutan Sjahrir dan Schermerhorn membubuhi paraf naskah persetujuan Linggarjati, 1947
Sumber: Inventaris Arsip Foto IPPHOS 1945-1950, No. II. 1-1

Diplomasi Politik-Pertahanan

Diplomasi itu sendiri adalah proses politik damai antar negara dengan tujuan membentuk sebuah struktur dan mengatur

diplomasi pertahanan merupakan pendayagunaan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata sebagai cara untuk membangun hubungan kerjasama dengan negara lain (Cottey dan Forster, 2004: 5-6).

Djogja Documenten 1945-1949 dan Delegasi Indonesia 1947-1951 (arsip konvensional), Inventaris Arsip Foto IPPHOS 1945-1950 dan Inventaris Arsip Film PFN (arsip foto dan film).

Selain itu, tema mengenai persoalan Irian Barat banyak terdapat di Inventaris Arsip Setneg Kabinet Perdana Menteri 1950-1959 (arsip konvensional) dan Daftar Arsip Kempen Wilayah Irian Barat 1957-1964 (arsip foto). Tema mengenai keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional seperti PBB, KAA dan GNB terdapat di Inventaris Arsip Dewan Pertimbangan Agung RI 1977-1999, Setwapres Umar Wirahadi K, Pidato Presiden RI 1958-1967, Kenegaraan Presiden Soeharto 1983-1998, Inventaris Arsip Roeslan Abdoelgani, LN. Palar, Mohammad Yamin (arsip konvensional) dan Inventaris Arsip Foto Kempen Yogyakarta 1950-1965 (arsip foto).

Mengenai kunjungan kenegaraan ke berbagai negara banyak terdapat di Inventaris Arsip Pidato Presiden RI 1958-1967, Setwapres Adam Malik dan Marzuki Arifin 1945-1984 (arsip konvensional), Inventaris Arsip Foto Setneg 1966-1989 dan Kempen Wilayah DKI Jakarta 1950-1953 (arsip foto). Ada pula tema mengenai KAA banyak terdapat di Daftar Arsip Foto Kempen Wilayah Jawa Barat (arsip foto) dan mengenai kerjasama militer dengan Uni Soviet di Inventaris Arsip Angkatan Laut 1960-1964 (arsip konvensional).

Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi adalah upaya dari suatu negara untuk menjalin hubungan dengan negara lain, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta dengan mengambil manfaat secara ekonomi sebagai implementasi dari kepentingan nasional melalui penarikan investasi asing, hubungan perdagangan dan bentuk-bentuk hubungan lainnya. Informasi mengenai diplomasi ekonomi Indonesia terdapat di dalam 140 nomor arsip dari 21 daftar dan inventaris



Pembicaraan Presiden Soeharto dengan Para Delegasi OPEC di Jakarta, 18 Oktober 1984.

Sumber: Inventaris Arsip Foto Setneg 1966-1989, No. 2549

arsip konvensional, 40 nomor arsip dari 7 daftar dan inventaris arsip foto, 29 nomor arsip dari 4 inventaris arsip film serta video. Beberapa tema terkait diplomasi ekonomi antara lain kerjasama perdagangan dengan Singapura pada masa revolusi terdapat di Inventaris *Djogja Documenten* 1945-1949 (arsip konvensional), perundingan urusan ekonomi di KMB dan setelah pengakuan kedaulatan (periode RIS) terdapat di Inventaris Arsip Delegasi Indonesia 1947-1951 dan Arsip Kabinet Presiden Republik Indonesia Serikat 1949-1950 (arsip konvensional). Tema terkait peranan Indonesia dalam forum ekonomi ASEAN, *Economic Commission for Asia and the Far East* (ECAFE), *Inter-Governmental Group on Indonesia* (IGGI) dan OPEC terdapat dalam Inventaris Arsip Departemen Keuangan 1950-1969 dan Setwapres Adam Malik (arsip konvensional), Inventaris Arsip Foto Setneg 1966-1989 dan Kempen Wilayah Yogyakarta 1950-1965 (arsip foto), Inventaris Arsip PFN dan Inventaris Arsip Video TVRI (arsip film dan video).

Tema mengenai pelaksanaan misi ekonomi dan perundingan ekonomi dengan Eropa, Amerika

Serikat, Jepang, RRC, India di Inventaris Arsip Kabinet Perdana Menteri 1950-1959, Menko Hubra 1963-1966 dan Inventaris Arsip Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri 1967-1973 (arsip konvensional), Inventaris Arsip Foto Kempen Wilayah DKI Jakarta 1950-1953 (arsip foto). Selain itu ada pula informasi mengenai perjanjian beberapa perusahaan pemerintah dengan perusahaan asing yang banyak terdapat di Daftar Arsip Eks Asisten Menteri/Sekretaris Negara Urusan Administrasi Pemerintahan (Asmin) Jilid 1 1967-1989, khusus kerjasama ekonomi PT Aneka Tambang dan *Garuda Indonesia Airways* (GIA) terdapat di Inventaris PT. Aneka Tambang 1950-2006 dan Wiweko Soepono 1943-1984 (arsip konvensional).

Diplomasi Kebudayaan

Diplomasi kebudayaan adalah usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga dan kesenian maupun secara makro melalui propaganda dan lain-lain (Warsito,

KHAZANAH

2007: 4). Cumming berpendapat bahwa diplomasi kebudayaan menekankan pada pertukaran ide, informasi, seni dan aspek budaya lainnya antar bangsa untuk mengembangkan rasa pengertian (Cumming, 2003: 1). Salah satu tujuan diplomasi kebudayaan adalah untuk menciptakan dan memperkuat citra positif negara yang diperoleh dari opini publik.

Informasi mengenai diplomasi

(arsip konvensional) dan Daftar Arsip Kempen Wilayah Jawa Barat (arsip foto).

Tema tentang pameran kebudayaan, pertukaran pelajar, seminar-seminar internasional dan keikutsertaan Indonesia dalam bidang kesehatan dunia melalui WHO dan Palang Merah Internasional terdapat di Inventaris Arsip Kabinet Presiden 1950-1959, PMI 1948-2002 (arsip konvensional) dan Inventaris Arsip

film) dan Inventaris Arsip TVRI (arsip video).

Penutup

Pada era globalisasi terlihat semakin jelas bahwa setiap bangsa dan negara di dunia tidak mungkin dapat berdiri sendiri. Setiap negara saling tergantung dengan negara lain baik dalam sektor politik, keamanan, ekonomi maupun sosial-budaya. Hubungan antar bangsa dan negara tersebut dilaksanakan melalui cara yang disebut dengan diplomasi. Hal itu dialami pula oleh bangsa Indonesia dalam eksistensinya sejak Proklamasi tahun 1945 hingga kini. Bahkan jika kita berbicara bangsa Indonesia dalam hal ini Nusantara, praktik-praktik diplomasi juga sudah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan.

Indonesia tentu mengalami pasang surut dalam melakukan hubungan internasional dengan kata lain meningkat atau menurun pula kegiatan diplomasi, baik dalam hubungan bilateral, regional maupun ketika berperan dalam lembaga-lembaga internasional. Pasang surut tersebut tidak lain dipengaruhi oleh perubahan konstelasi politik yang terjadi khususnya di dalam negeri yang ikut mempengaruhi kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia.

Sejarah mengenai diplomasi Indonesia selalu menarik untuk dikaji lebih dalam terutama dari sudut pandang ilmu politik, hubungan internasional, sosiologi, hukum dan ilmu sejarah sendiri. Oleh karena itu dengan terbitnya *Guide Arsip Diplomasi Indonesia 1945-2009* diharapkan dapat membantu para peneliti dalam mengungkap kembali rekam jejak diplomasi negara kita.



Rombongan kesenian tari Bali mengadakan pertunjukan di London, 21 Agustus 1952
Sumber: Inventaris Arsip Foto Kempen Wilayah DKI Jakarta 1950-1953, No. 5204-825 (520821 FH 3)

kebudayaan Indonesia terdapat di dalam 118 nomor arsip dari 25 (duapuluh lima) daftar dan inventaris arsip konvensional, 75 nomor arsip dari 10 (sepuluh) daftar dan inventaris arsip foto, 32 nomor arsip dari 3 inventaris arsip film serta arsip video. Informasi yang terkait diplomasi kebudayaan antara lain mengenai kerjasama kebudayaan dengan Belanda pada awal kemerdekaan terdapat di Inventaris Arsip Delegasi Indonesia 1947-1951 (arsip konvensional). Kerjasama kebudayaan yang dihasilkan dalam KAA banyak terdapat di Inventaris Arsip M. Yamin

IPPHOS 1945-1050 (arsip foto). Keikutsertaan Indonesia dalam Festival Film Internasional terdapat di Inventaris Arsip Menko Hubra 1963-1966 (arsip konvensional) dan Inventaris Arsip Setneg 1966-1989 (arsip foto). Kiprah Indonesia di bidang olahraga seperti Sea Games, Asian Games dan Olympiade banyak ditemukan di Inventaris Arsip Setwapres Umar Wirahadi K, KONI 1989-2005 dan Pidato Presiden RI 1958-1967 (arsip konvensional), Inventaris Arsip Kempen DKI 1950-1953 dan Daftar Arsip LIN 1966 (arsip foto), Inventaris Arsip PFN (arsip



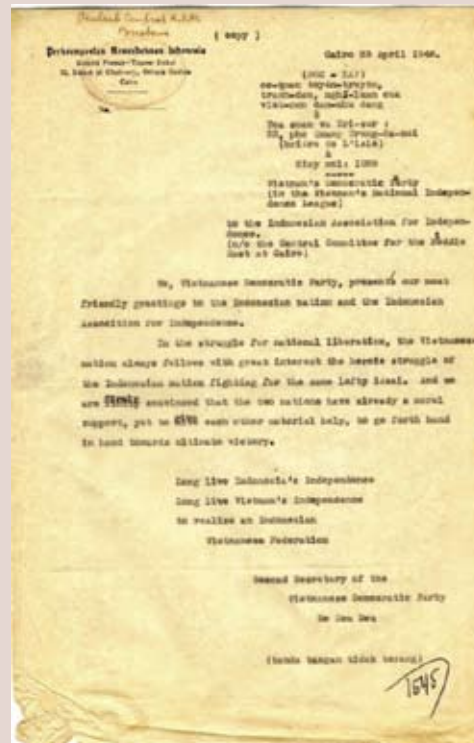
R. Suryagung SP :

60 TAHUN HUBUNGAN INDONESIA-VIETNAM DALAM ARSIP

Saat media ramai mem-beritakan tentang pengungsi Myanmar dan Bangladesh yang terdampar dan mencari suaka di Indonesia. Kita jadi teringat akan peristiwa lebih 35 tahun lalu ketika para pengungsi Vietnam terdampar di Indonesia. Dimana saat itu mereka kemudian ditampung di Pulau Galang, Kepulauan Riau hingga bertahun-tahun (1979-1996) sebelum akhirnya mereka kembali ke negeri asalnya.

Hubungan Indonesia dengan Vietnam sebenarnya sudah berlangsung lama, yaitu saat Indonesia baru merdeka dan butuh pengakuan bangsa lain. Hal ini dapat dilihat dalam Khasanah Arsip Mohammad Bondan No.519 tentang salam persahabatan kepada bangsa Indonesia dan dorongan untuk memerdekakan Indonesia dari Pemuda Vietnam kepada Pemuda Indonesia, 23 April 1946.

Sedangkan secara diplomatik Hubungan Indonesia-Vietnam dimulai pada tahun 1955. Dimana saat itu, Pemerintah RI menunjuk dan mengangkat **Mr. Soedibjo Wirjowerdojo** sebagai Konsul Jenderal Republik Indonesia yang menempati pos perwakilan perintisan dalam level Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk Vietnam yang masih berkedudukan di Hanoi. Situasi kedua negara yang pada saat itu baru saja merdeka, kedekatan geografis serta sama sama mengalami ancaman yang datang dari luar turut membantu mempererat hubungan keduanya. Bukti kedekatan hubungan Indonesia dan Vietnam



Surat Pemuda Vietnam kepada Pemuda Indonesia tentang salam persahabatan kepada bangsa Indonesia dan dorongan untuk memerdekakan Indonesia, 23 April 1946 (Mohammad Bondan No.519)

dapat dijelaskan dengan mesranya hubungan antara pemimpin kedua negara, yakni Soekarno dan Ho Chi Minh yaitu saat Ho Chi Minh sebagai pemimpin Vietnam mengunjungi Indonesia pada tahun 1959. Kota yang dikunjungi, antara lain Jakarta, Surabaya, Medan dan Bandung. Saat di Bandung Presiden Ho Chi Minh diundang oleh Presiden Soekarno untuk meresmikan Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 4 Maret 1959, sambutan rakyat Bandung saat itu sangat meriah, (Kempen Jabar

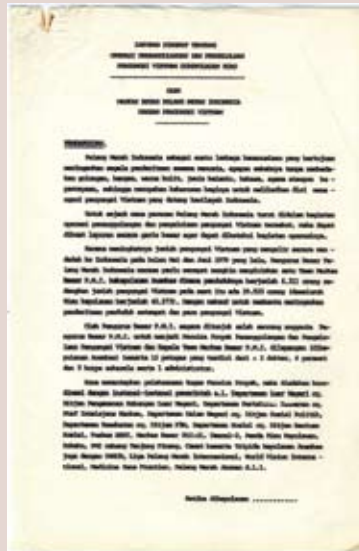
JB5901-297). Pada hari yang sama, Presiden Ho Chi Minh juga mendapat gelar Doktor Honoris Causa (Dr. H.C.) dari Universitas Padjadjaran. Kunjungan Presiden Ho Chi Minh tersebut kemudian dibalas dengan kedatangan Presiden Soekarno ke Vietnam di tahun yang sama. Pada saat Indonesia menyelenggarakan GANEFO I (*Games of Nation Emerging Forces*) di Jakarta pada 10-22 November 1963, yang diikuti oleh 2.700 atlet dari 51 negara, Vietnam Utara juga mengirimkan atlitnya. (Pidato Presiden No.647)



Sambutan rakyat Bandung sepanjang jalan ketika kunjungan Presiden Ho Chi Minh ke Bandung, 4 Maret 1959 (Kempen Jabar JB5901-297)

Indonesia juga menjadi inspirasi bagi perjuangan bangsa Vietnam. Buku *Strategy of Guerrilla Warfare* karangan A.H. Nasution, berpengaruh besar terhadap taktik bertempur tentara Vietnam Utara dalam perang melawan Vietnam Selatan yang dibantu Amerika. Perang ini kemudian dimenangkan pasukan Vietnam Utara. Selanjutnya, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang ikut memberikan bantuan pangan kepada Vietnam saat negeri ini mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Tidak hanya itu, Indonesia juga turut mengirimkan pasukan perdamaian Kontingen Garuda (Konga) IV dan V ke Vietnam untuk menjaga Perdamaian pada tahun 1973.

Dalam era perang penyatuan kembali Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, Indonesia menyediakan sebuah pulau, yakni Pulau Galang di Batam untuk menampung para pengungsi Vietnam sebelum mereka dialihkan ke negara ketiga sebagai tempat tinggal tetap mereka.



Laporan singkat tentang Operasi penanggulangan dan pengelolaan pengungsi Vietnam di Kepulauan Riau, 17 Mei 1980 (PMI THN 1948-2002 No. 264)

Selain itu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, hubungan Indonesia-Vietnam juga terjalin mesra. Selain pengiriman Kontingen Garuda dan menyediakan

pulau untuk pengungsi, juga tradisi pengiriman duta besar masih terjalin. Hal ini terlihat dari foto pengiriman Duta Besar Vietnam, Tran Huy, 12 November 1984.

Pada bulan Juni 2003, Presiden Indonesia Megawati Sukarnoputri, juga mengunjungi Vietnam. Kemudian pada bulan Mei 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengunjungi Vietnam dalam rangka penandatanganan "Deklarasi tentang Kerangka Kerjasama Ramah dan Komprehensif Memasuki Abad 21". Sedangkan puncak hubungan diplomatik ke-50 tahun kedua negara diadakan pada bulan Desember 2005 di ibukota masing-masing negara. Saat ini 60 tahun sudah hubungan diplomatik Indonesia-Vietnam (1955-2015). *Happy Anniversary 60th Indonesia-Vietnam.* (agg)

BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA BARAT : MENGAWAL PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DENGAN PERATURAN DAERAH KEARSIPAN

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip baik di pusat maupun di daerah menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan. Tanggung jawab pengawasan kearsipan merupakan tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggaraan kearsipan nasional.

Dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud di atas ANRI dibantu oleh lembaga dan/atau unit kearsipan bekerja



Kantor Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat
Jalan Pramuka V No. 2 Khatib Sulaiman Padang

sama dengan lembaga atau unit yang menyelenggarakan fungsi pengawasan sesuai dengan wilayah kewenangannya sesuai Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. Selanjutnya Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pengawasan di lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan secara terkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor

79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa Inspektorat Jenderal Departemen dan Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen melakukan pengawasan terhadap: pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; pinjaman dan hibah luar negeri; dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Tidak banyak lembaga kearsipan daerah yang telah melakukan program pengawasan kearsipan, di tingkat provinsi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Sumatera Barat telah memulainya sejak tahun 2012 silam.

DAERAH

Sedangkan di tingkat kabupaten/kota, Badan arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya juga mengeluarkan program pengawasan dengan sebutan "Gerebek Arsip." Sementara Badan arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Timur baru pada tahun 2015 ini akan menerapkan Perda Kearsipan.

Program pengawasan kearsipan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Sumatera Barat. Pengawasan kearsipan ini sebagai salah satu usaha yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat dalam rangka lebih menyadarkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk memelihara dan menjaga arsipnya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Program pengawasan kearsipan ini dalam pelaksanaannya melibatkan arsiparis, inspektorat daerah dan satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP).

Sebelum adanya Perda Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, sebenarnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memiliki Perda Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, namun Perda ini dianggap tak mampu mengatasi permasalahan kearsipan yang ada di Sumatera Barat, karena kurang sosialisasi dan nyaris tidak diketahui oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pencipta Arsip. Selain itu direvisinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Pokok-Pokok Kearsipan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 menyebabkan Perda Nomor 3 Tahun 2005 tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan undang-undang kearsipan tersebut.



Depo dan labor Arsip Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat Jalan Pramuka V Khatib Sulaiman Padang



Gedung Layanan Baru Perpustakaan Jalan Diponegoro No. 4 Padang

Sejarah Lembaga

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat adalah instansi Pembina bidang Perpustakaan dan Kearsipan di Sumatera Barat, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 pada 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat. Peraturan Daerah tersebut merupakan tindak lanjut

dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk lembaga kearsipan diawali dengan berdirinya **Kantor Arsip Daerah Tingkat I Sumatera Barat** berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 16 Tahun 1994, pada 5 Maret 1994 tentang Pedoman



Mobil Sadar Arsip

Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kantor Arsip Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Kemudian ditindaklanjuti Gubernur Sumatera Barat Hasan Basri Durin dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Tingkat I Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Sesuai Perda tersebut, Kantor Arsip Daerah bertugas menyusun rencana dan program kerja di bidang kearsipan daerah, melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan arsip in aktif, pembinaan kearsipan terhadap unit serta penilaian dan penyerahan arsip statis daerah kepada Arsip Nasional (ANRI).

Seiring dengan terbentuknya Kantor Arsip daerah Tingkat I Sumatera Barat, sebenarnya atas permintaan Gubernur Sumatera Barat Drs. Hasan Basri Durin kepada Kepala Arsip Nasional RI yang ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 045/2782/Umum-90, tanggal 19 Oktober 1990 tentang Pembukaan

Cabang Arsip Nasional Daerah telah ada keinginan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk membentuk lembaga kearsipan. Selanjutnya dibentuklah **Arsip Nasional Wilayah Sumatera Barat**, pada tahun 1997 melalui Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor OT.00/04/1997 tanggal 1 April 1997 tentang Pembentukan Arsip Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan terbentuknya Arsip Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Barat, maka pengelolaan arsip aktif dan terutama arsip statis lembaga negara/ badan pemerintah Sumatera Barat diharapkan dapat diselamatkan. Ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. Setelah resmi berdiri, Kantor Arsip Nasional Wilayah Sumatera Barat dipimpin oleh Drs. H. Manzarni yang dilantik pada tanggal 6 Oktober 1997 di aula Kantor Gubernur. Dengan demikian, ada 2 (dua) lembaga kearsipan di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera barat saat itu, yaitu Kantor Arsip Daerah yang mengelola

arsip-arsip di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta Arsip Nasional Wilayah sebagai instansi vertikal yang bertanggungjawab dalam penyelamatan arsip-arsip statis.

Namun, lahirnya otonomi daerah juga ikut merubah status kelembagaan arsip di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, karena dengan pelaksanaan otonomi daerah, kedua lembaga arsip ini dilebur menjadi **Badan Arsip Provinsi Sumatera Barat** pada tahun 2001. Sebanyak 28 pegawai yang tadinya berstatus pegawai pusat beralih menjadi pegawai pemerintah provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya mengingat adanya kesamaan aktivitas antara perpustakaan dan kearsipan, maka berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008, pada tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, lembaga Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat digabung dengan Badan Arsip Provinsi Sumatera Barat menjadi **Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat**. Organisasi ini akhirnya menjalankan 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi perpustakaan dan fungsi kearsipan, oleh karena itu, **visinya** pun mencakup kedua fungsi dimaksud, yaitu “ *Menjadikan Perpustakaan dan Kearsipan Sebagai Pusat Informasi Terdepan untuk Mencerdaskan Masyarakat Dan Menyelamatkan Memori Daerah*”.

Program Kerja, Tantangan dan Kendala

Gempa bumi pada tahun 2009



Hancurnya Bangunan Depo Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat Akibat Gempa 30 September 2009



Hancurnya Bangunan Layanan Perpustakaan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat Akibat Gempa 30 September 2009

yang lalu menyebabkan banyak kerugian termasuk di bidang kearsipan. Robohnya record centre dan depo arsip Badan Perpustakaan dan Kearsipan menyebabkan beberapa khasanah arsip tertimbun reruntuhan gedung, sehingga banyak arsip yang hilang dan rusak. Arsip-arsip tersebut perlu ditata ulang karena boksnya sudah tidak dikenali lagi. Disamping itu besarnya biaya pemulihan pasca gempa, menyebabkan alokasi anggaran pengelolaan arsip di SKPD belum menjadi prioritas, sehingga Badan Perpustakaan dan Kearsipan nyaris

memulai lagi dari awal pembinaan pengelolaan arsip di SKPD.

Walaupun cukup banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi, Lembaga Kearsipan Provinsi Sumatera Barat tetap menyelenggarakan kegiatan kearsipan sesuai dengan Program-program kerja yang telah direncanakan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 - 2015. Program kerja yang telah dilaksanakan antara lain pembinaan kearsipan ke SKPD dalam bentuk Sosialisasi Kearsipan, Bimbingan Teknis

Kearsipan, Pembinaan Langsung di SKPD, Penempatan arsiparis di SKPD, Peningkatan kualitas wawasan arsiparis dan pengelola arsip SKPD. Juga dilakukan pendataan dan penataan arsip inaktif SKPD, menyusun petunjuk teknis pengelolaan arsip, melakukan penilaian arsip inaktif, dan melakukan pengawasan kearsipan ke SKPD dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota. Di bidang akuisisi dilakukan akuisisi terhadap arsip tokoh-tokoh yang berasal dari Sumatera Barat, baik yang berdomisili di Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat, seperti para mantan gubernur Sumatera Barat, Emil Salim, Syafei Ma'arif, Taufik Ismail, AA. Navis, Buya Hamka, dll. Penyimpanan dan pelestarian arsip statis dilakukan, serta layanan informasi arsip statis dan jaringan informasi kearsipan statis.

Sebagai hasil dari program tersebut berbagai capaian telah diraih oleh lembaga kearsipan Sumatera Barat ini. Seperti program bimbingan teknis kearsipan bagi Sekretaris Nagari/Desa yang telah menjadikan sektor kearsipan menjadi salah satu kriteria bagi Sekretaris Desa/Nagari "Berprestasi" yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dimana Tim Jurinya juga berasal dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan. Kemudian dilihat dari alokasi anggaran, sudah cukup banyak instansi yang menyediakan anggaran untuk melakukan pembenahan arsip yang dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Perpustakaan dan Kearsipan. Sebagai puncaknya pada tahun 2015 ini Badan Perpustakaan dan Kearsipan Sumatera Barat meraih predikat Lembaga Kearsipan Daerah Teladan nomor III Tingkat Nasional Tahun 2015.

Penerapan Pengawasan Kearsipan

Pengawasan kearsipan adalah pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Pengawasan penyelenggaraan kearsipan meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip. Sedangkan pengawasan terhadap penegakan peraturan perundangan adalah ketaatan dan kepatuhan pencipta arsip dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan kearsipan.

Fungsi pengawasan merupakan salah satu unsur manajemen yang mampu berperan sebagai *Quality Assurance*, untuk menjamin agar pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga kearsipan dan/atau unit kearsipan dapat berjalan dengan baik. Peran pengawasan akan lebih bermakna dan dapat memberikan nilai tambah, jika pihak yang diawasi merasa terbantu sehingga dapat mewujudkan visi dan misi organisasi secara lebih efisien dan efektif.

Untuk memudahkan penerapannya di lapangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan beberapa kegiatan seperti sosialisasi Perda Kearsipan Nomor 17 Tahun 2012 untuk semua SKPD dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota, dikeluarkan Instruksi Gubernur No.7/INST-2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang isinya antara lain menginstruksikan agar semua Kepala SKPD mengalokasikan anggaran

untuk Pengelolaan Kearsipan dalam usulan Rencana Kerja Anggaran masing-masing, menyediakan ruangan khusus untuk penyimpanan arsip dan menyediakan 2 (dua) orang staf pengelola arsip. Disamping itu, lahirnya Perda juga diikuti dengan revisi terhadap Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Petunjuk Pengelolaan Arsip Dinamis dan Jadwal Retensi Arsip (JRA).

Dalam implementasinya pengawasan dilakukan oleh tim pengawas yang terdiri dari arsiparis atau pejabat dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan, auditor Inspektorat dan Satpol PP. Dalam melaksanakan tugasnya tim ini bekerja secara bersama-sama ke satu SKPD yang nantinya masing-masing anggota

dan bagi SKPD yang tidak tertib arsip akan diberi sanksi administratif seperti yang terdapat dalam Perda Kearsipan. Sementara Satpol PP memberikan sanksi administratif bagi SKPD ataupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak melakukan tertib arsip melalui Penyidik PNS sebagai salah satu upaya penegakan Perda.

Penerapan Perda Kearsipan ini tentunya memiliki banyak hambatan dan tantangan antara lain : SKPD umumnya tidak punya anggaran khusus untuk kearsipan, adanya petugas pengelola arsip yang tidak terlatih, adanya anggapan bahwa pekerjaan sebagai petugas kearsipan tidak menarik, sehingga tidak ada yang mau ditempatkan sebagai petugas pengelola arsip. Selain



Penilaian arsip yang dilaksanakan oleh arsiparis

tim (Satpol PP, BPA dan Inspektorat) memiliki cara pandangnya masing-masing dalam menyampaikan hasil pengawasan. Untuk penerapan hasil, bagi Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan internal rutin, ketersediaan arsip secara lebih cepat dan tepat menjadi unsur penilaian,

sulitnya merubah kebiasaan tata cara pengurusan dan penyimpanan arsip yang sudah terpolo dengan sistem buku agenda. Gempa bumi yang melanda kota Padang pada tahun 2009 juga menyebabkan banyaknya instansi yang lebih fokus pada upaya perbaikan gedung ketimbang



Pengelolaan Arsip Inaktif di ruang pengelolaan arsip inaktif pasca gempa



Tempat Penyimpanan Arsip Media Baru

memikirkan kegiatan pengelolaan arsip.

Menarik untuk diikuti apa yang telah dilakukan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat untuk mengawal penyelenggaraan kearsipannya dengan program pengawasan kearsipan, karena belum

banyak daerah yang berani mengambil terobosan untuk mengeluarkan suatu program yang bisa memecah kebuntuan penyelenggaraan kearsipan di tingkat daerah, maupun ditingkat nasional. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sendiri baru pada tahun 2015 ini akan memulai

pengawasan kearsipan sebagai kontrol terhadap penyelenggaraan kearsipan nasional, sebagaimana amanat undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Hal ini juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain menyatakan bahwa Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah (pasal 7 ayat 1). Semoga apa yang telah dilakukan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat menjadi inspirasi bagi lembaga kearsipan lainnya, tidak ada kata terlambat untuk memulai hal yang baik. (MI)

BERWISATA ARSIP DI BARPUSDA JATENG

Berkunjung ke Provinsi Jawa Tengah tentu banyak tempat wisata yang unik dan menarik. Lawang Sewu, Kota Lama Semarang, Baturaden, Dataran Tinggi Dieng, Klenteng Sam Po Kong adalah sebagian tempat wisata di Provinsi Jawa Tengah yang menarik untuk dikunjungi. Namun, pernahkah mendengar istilah “Wisata Arsip”?. Program wisata arsip merupakan program yang ditawarkan oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (Barpusda Jateng) untuk mengenalkan arsip kepada masyarakat dengan “cara berbeda”.

Paket wisata arsip yang ditawarkan oleh Barpusda Jateng kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan pengunjung. Untuk siswa Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) paket wisata yang ditawarkan adalah melihat film-film dokumenter mengenai kepahlawanan dan kebudayaan di ruang pemutaran film berkapasitas 50 orang. Film-film yang disajikan dalam paket wisata arsip antara lain Gubernur Dari Masa ke Masa, Mekanisme Pengelolaan Arsip di Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah antara lain Sejarah Kereta Api di Jawa Tengah, Sejarah Batik di Jawa Tengah, Sejarah Wayang Kulit, Jenderal Besar Sudirman, Jendral Gatot Subroto, Pangeran Diponegoro, Sejarah Maritim Jawa Tengah, Sejarah Prambanan, Sejarah Keris Jawa Tengah, Sejarah Borobudur, Cilacap dalam Arsip, Magelang dalam Arsip, Tegal dalam Arsip, Surakarta dalam Arsip, Wonosobo dalam Arsip, Kudus dalam Arsip, Banyumas dalam Arsip, Pekalongan dalam Arsip.

Selain pemutaran arsip film



Badan Arsip dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah



Kepala Badan Barpusda Jateng
(Tengah) Sari Puspita Andriani
Sulistiyowati

dokumenter, pengunjung juga disajikan dengan pameran arsip di Ruang Pamer Arsip. Sedangkan untuk pengunjung siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan mahasiswa di bidang kearsipan, Barpusda Jateng akan memutar film mengenai pengelolaan arsip, otomasi kearsipan,

dan penataan berkas di Barpusda Jateng. Pengunjung juga akan diajak melihat depot arsip statis, proses preservasi arsip, dan menengok ruang visualisasi sistem kearsipan.

Barpusda Jateng memiliki strategi tersendiri dalam mempromosikan Wisata Arsip ke seluruh kalangan masyarakat. “Strategi kami yaitu mengirim surat pemberitahuan kepada sekolah-sekolah, universitas, mempromosikan kepada kabupaten/kota supaya mereka juga mempromosikan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungannya serta menyampaikannya secara lisan apabila kami mendapatkan kesempatan menjadi narasumber di berbagai tempat, pameran provinsi, kabupaten/kota, nasional dan melalui website Badan Arsip dan Perpustakaan



Salah satu paket wisata arsip yang ditawarkan oleh Barpusda Jateng adalah pemutaran arsip film bersejarah di Ruang Pemutaran Film Barpusda Jateng

Provinsi Jawa Tengah” ujar Kepala Badan Barpusda Jateng Sari Puspita Andriani Sulistyowati.

Antusias masyarakat terhadap wisata arsip sangat baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah pengunjung yang datang untuk menikmati wisata arsip. Setiap tahun rata-rata 3500 pengunjung. Tidak hanya dari kalangan pelajar dan mahasiswa, aparaturnya pemerintah juga dapat menikmati paket wisata arsip dan melakukan studi banding untuk mengetahui penyelenggaraan kearsipan di provinsi Jawa Tengah.

Penyelenggaraan kearsipan di Jawa Tengah sendiri telah berjalan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dengan keberadaan kantor arsip yang lebih representatif, sarana dan prasarana kearsipan yang memadai, dan sumber daya manusia di bidang kearsipan yang unggul dan andal. Barpusda Jateng juga telah membangun *Cold Storage* dan memiliki Sistem Jaringan Informasi Kearsipan (SJIK) untuk menghimpun informasi kearsipan di SKPD dan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Tidak mengherankan, pada tahun 2013 Barpusda Jateng memperoleh Akreditasi Lembaga Kearsipan “Kategori A” dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Pencapaian yang diperoleh oleh Barpusda Jateng juga tidak terlepas dari komitmen dan dukungan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap penyelenggaraan kearsipan di provinsi

Jawa Tengah. “Pak Ganjar itu sangat *respect* sekali dengan arsip”, ungkap Kepala Badan Barpusda Jateng.

Guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan, khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Barpusda Jateng terus melakukan peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM Kearsipan dengan mengikutsertakan para arsiparisnya ke berbagai diklat kearsipan atau kediklatan lain yang menunjang profesi kearsipan. Barpusda Jateng juga terus melakukan pembinaan secara *door to door* di SKPD-SKPD yang ada di provinsi Jawa Tengah.

Kedepan, Barpusda Jateng akan melaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana kearsipan khususnya alat-alat preservasi arsip, akuisisi arsip yang lebih difokuskan pada arsip-arsip batas wilayah dan arsip aset, peningkatan SDM Kearsipan dengan menyelenggarakan Diklat Penciptaan Arsiparis Tingkat Terampil, Pengembangan SJIK, Preservasi arsip Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran, visitasi peserta Diklat PIM IV sampai dengan II dan Peningkatan Program Wisata Arsip dengan membangun Diorama Jawa Tengah. (sa)



Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat meninjau ruang otomasi kearsipan. Selain pemutaran arsip film bersejarah, paket wisata arsip yang ditawarkan Barpusda Jateng juga mengajak para pengunjung untuk melihat proses otomasi kearsipan di ruang otomasi kearsipan



Krihanta

KEMAJUAN PESAT PENGELOLAAN ARSIP DI NATIONAL ARCHIVES OF AUSTRALIA

Australia dari segi wilayah merupakan suatu benua yang cukup luas merupakan negara maju dalam berbagai segi kehidupan. Dalam pengelolaan arsip Australia juga dikenal tidak ketinggalan dan banyak ahli dalam bidang kearsipan lahir dari benua ini. Dari segi teori kearsipan Australia dikenal melahirkan teori *Continuum Model* yang menandingi teori *Life Cycle* yang sering dibahas dalam bidang kearsipan (*records management*). Penulis sangat beruntung dapat mengunjungi Arsip Nasional Australia (*National Archives Australia*, NAA) di Canberra dan Sydney dalam rangka magang selama 4 hari (*four-day study program*) dan akan memberi ulasan tentang kemajuan pengelolaan arsip di Australia.

Sejarah singkat Arsip Nasional Australia (*National Archives of Australia-NAA*)

Tahun 1940an seorang sejarawan bernama CEW Bean merasa prihatin terhadap pemusnahan arsip masa peperangan. Bersama dengan

sejarawan, pustakawan dan ahli politik lainnya mereka meminta agar materi Perang Dunia II (*World War II*) dilestarikan untuk generasi yang akan datang. Kemudian dibentuklah Komite Arsip Perang (*War Archives Committee*) yang diketuai Bean yang kemudian menghasilkan pedoman pemusnahan arsip perang (*war archives*). Kemudian komite tersebut berganti nama menjadi *Commonwealth Archives*.

Committee tersebut bertugas mengawasi pemusnahan arsip dan bekerjasama dengan War Memorial dan *Commonwealth National Library* yang ditunjuk sebagai pemelihara arsip pemerintah. Kemudian tahun 1944 ditunjuk Mc Lean sebagai arsiparis (*Archives Officer*) pertama di Australia. Bulan Maret 1961 berdiri *Commonwealth Archives Office* dan secara formal berpisah dari Perpustakaan Nasional Australia. Pada tahun 1972 dibangunlah tempat penyimpanan arsip statis (*repository*) pertama di Villawood dan pembangunan tahap kedua selesai

tahun 1975 dengan menghabiskan dana sebesar \$ 6 juta untuk penyimpanan arsip dari berbagai media. Rencana pembangunan gedung arsip di Canberra akhirnya dibatalkan karena dikhawatirkan meluapnya Danau Burley Griffin terutama hujan deras tahun 1976 maka kemudian dibangun repository permanen di Mitchell, dan semua arsip dari Canberra dipindahkan ke Mitchell tahun 1981.

Kemudian tahun 1975 organisasi ini berubah nama menjadi Australian Archives. Pada tahun 1983 terbitlah undang-undang kearsipan yaitu *Australian Archives Act 1983* yang memberi mandat secara formal dalam bidang kearsipan bagi Arsip Nasional Australia khususnya dalam menyusun standar manajemen kearsipan, melakukan transfer arsip yang memiliki nilai statis (*archival value record*) dari instansi (*agencies*), menyimpan, mendeskripsi dan melakukan preservasi terhadap arsip statis serta menyediakan akses terhadap arsip statis. Pada tahun 1998 *Australian*

MANCA NEGARA

Archives berubah nama menjadi *National Archives of Australia* (NAA).

Pengelolaan arsip (*collection*)

Arsip yang dikelola oleh NAA cukup besar sekitar 40 juta item atau 380.000 meter. Atau 380 km arsip. Koleksi arsip yang dikelola terdiri dari arsip kertas, digital photograph, mikrofilm, audiovisual serta objek. Berbeda dengan Arsip Nasional RI yang tidak mengelola objek maka NAA mengelola objek terkait arsip yang dikelola berupa bukti fisik seperti pecahan gelas, sobekan kain; kopi obyek terkait hak cipta seperti lukisan, patung, mainan dan game; benda milik pribadi seperti tas milik Harold Holt (Perdana Menteri Australia yang hilang saat berenang di Pantai Cheviot 17 Desember 1967).

Arsip yang diterima NAA diolah dan dibuat assesibel dengan menggunakan *Commonwealth Records Series System (CRS System)* yang memungkinkan petugas NAA dan pengguna mengidentifikasi, menemukan kembali dan menggunakan arsip. Pengelolaan arsip dengan CRS system berdasarkan organisasi dan perorangan, i series dan item dengan memegang teguh *principles of Provenance dan Original Order*.

Dalam memasarkan informasi dari arsip yang dimiliki maka NAA sangat giat dalam mengolah arsip dan mengemasnya dalam Guide dengan tema tertentu yang dibutuhkan masyarakat. Guide arsip yang terkait hubungan Australia dengan Indonesia tertuang dalam guide *Near Neighbour* kemudian terkait dengan imigrasi ke Australia tertuang dalam *More People Imperative: Immigration to Australia*; terkait dengan hak cipta dalam guide *A Nation's Imagination: Australia's Copyright Records 1854-1968* dan tema-tema lainnya. Yang menarik adalah guide-guide tersebut banyak yang ditulis dan dibuat oleh orang atau pegawai di luar NAA.

Dalam pengelolaan fisik arsip telah disiapkan sarana yang cukup baik terutama dari segi pemeliharaannya yaitu *repository* di Mitchel Canberra dan di Sydney yang banyak



Ruang penyimpanan arsip di NAA

menyimpan arsip audiovisual serta kantor dan ruang baca di seluruh Australia seperti di Adelaide, Brisbane, Darwin, Hobart, Melbourne dan Perth dan di beberapa lokasi terdapat layanan bersama (*co-located*) dengan arsip negara bagian (*state or territory archival organisations*) sebagai one stop shop bagi pengunjung.

Dalam pemeliharaan keseluruhan koleksi NAA melakukan konservasi dan preservasi terhadap keseluruhan arsip kertas, digital, audiovisual, foto dan objek.

Digitalisasi dan Preservasi

Dalam bidang pengelolaan arsip dan digitalisasi, NAA cukup maju dengan menuangkannya dalam *Digital Transition Policy* dimana setelah tahun 2015 arsip yang tercipta secara digital akan diterima atau ditransfer ke NAA hanya dalam bentuk digital (*records that are created digitally after 2015 will be accepted for transfer to the National Archives in digital formats only*). Langkah berani ini tentu sudah dipersiapkan dengan matang dibawah pimpinan David Fricker yang memiliki latar belakang komputer dan mantan direktur ASIO (*Australian Security Intelligence Organisation*). Kebijakan ini ditujukan dalam rangka efisiensi pengelolaan arsip. Dalam masa transisi dimana arsip masih banyak

diciptakan dalam bentuk kertas atau kebutuhan dan persyaratan hukumnya masih dalam bentuk kertas (*paper base*) jika dimungkinkan dipindai (*scan*) sehingga arsip dalam bentuk kertas tidak lagi tercipta. Kebijakan ini merupakan transisi atau perubahan dari arsip bahan kertas (*paper base*) record management ke *digital information dan record manajemen*. (*digital transition or moving from paper-based records management to digital information and records management*).

Sementara untuk digitalisasi arsip statis telah dimulai sejak 2001, dengan tujuan peningkatan akses dan preservasi. Sampai saat ini lebih dari 26 juta halaman arsip telah digitalisasi dan tersedia untuk akses publik yang dapat diakses melalui *Record Search* yang ada di web NAA. Dilakukan pula digitalisasi proaktif terhadap arsip yang berisiko tinggi seperti arsip foto dengan *vinegar Syndrome*, arsip kertas yang kualitasnya jelek dan sering dipergunakan.

Program digitalisasi dalam rangka akses preservasi merupakan kebijakan pemerintah Australia menghadapi era digital. Untuk kegiatan ini telah tersedia 240 terabytes dan telah digunakan sebanyak 6 *terabytes* untuk *digital records storage*. Untuk itu digitalisasi

ini diperlukan dana yang cukup besar dan NAA menerima dana yang cukup besar pula namun kegiatan dilakukan secara bertahap. Sampai saat ini arsip yang telah didigitalisasi dan tersedia secara online sebanyak 3.500.000 *item photographic* dan 8,333.097 arsip tekstual.

Akses

Aturan akses di Australia sangat jelas terkait dengan *close* dan *open period*. Hampir seluruh arsip *Commonwealth* yang memasuki periode terbuka (*open access period*) sekitar 98 % di-*release* ke publik sementara 1,75% di-*release* dengan informasi yang dikecualikan dihilangkan. Dan hanya 0,25% arsip yang dikecualikan yang tidak dapat diakses oleh umum. Berdasarkan *Archives Act* 1983 arsip *Commonwealth* dapat dibuka setelah 30 tahun dan arsip *Cabinet* setelah 50 tahun, namun berdasarkan amandemen terhadap *Archives Act* yang disetujui oleh Parlemen pada May 2010 maka periode akses terbuka (*open access period*) berubah menjadi 20 tahun untuk arsip *Commonwealth* dan 30 tahun untuk arsip *Cabinet Notebook* yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2011. Kebijakan akses tersebut sangat didukung oleh kebijakan digitalisasi di Arsip Nasional Australia. Sehingga dari kebijakan tersebut setiap 1 Januari NAA merilis Dokumen Kabinet yang memasuki masa periode terbuka (*open access period*).

Namun seperti halnya di setiap negara keterbukaan juga tidaklah seratus persen dimana di Australia juga ada pengecualian (*exemption*) yang tercantum pada *section 33 Archives Act* 1983 khususnya rahasia terkait dengan sekuriti, pertahanan, hubungan luar negeri, rahasia dagang, serta arsip terkait dengan penegakan hukum.

Setiap tahun NAA menerima sekitar 43.000 aplikasi atau permintaan terkait dengan akses arsip yang belum tersedia ke publik. Pada dasarnya semua arsip yang sudah selesai masa periode tertutupnya, tersedia untuk publik namun perlu juga memperhatikan kategori pengecualian (*exemption*) yang tertuang pada pasal



Proses digitalisasi arsip di NAA

33 *Archives Act*, sehingga jika ada permintaan dari masyarakat maka terlebih dahulu diperiksa (*examine*) oleh suatu Tim sebelum dirilis ke masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir ada sekitar 20.000 akses yang belum tertangani (*backlog*) sehingga bulan Oktober NAA membentuk taskforce untuk memeriksa (*examine*) arsip-arsip yang diminta tersebut dan telah menyelesaikan 6.101 dari 20 000 permintaan akses.

Akses secara online juga sangat memudahkan dan sebagian arsip yang masuk dalam periode terbuka telah didigitalisasi. Akses publik dapat dilakukan secara langsung maupun secara *online* melalui *RecordSearch* yang terdiri dari : *Basic search, Advanced search, Name Search, Photo Search* atau *Passenger arrivals index search*. Kemudahan akses terhadap arsip baik yang sudah digitalisasi maupun yang belum, sangat mudah melalui web NAA dan terhubung (*link*) ke aspek-aspek yang terkait baik koleksi, organisasi, peraturan dan standar yang terkait. Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat NAA juga mengadakan pameran (*exhibition*) baik permanen maupun temporer. Pameran permanen terdapat di Canberra *Memory of a Nation* yang merupakan

showcase tentang peristiwa dan tentang masyarakat yang membentuk negara Australia. Sementara pameran secara temporer dilakukan sepanjang tahun di berbagai tempat di Australia.

Usaha meningkatkan akses masyarakat terhadap arsip statis di Australia merupakan salah satu butir rencana yang Tertuang dalam Corporate Plan 5 tahunan NAA butir kelima yaitu: *increasing access to the archival resources of the Commonwealth*.

Dari pengalaman di NAA penulis sangat banyak memperoleh informasi dan pengetahuan di bidang kearsipan. Jika dilihat dari usia dan sarana dan prasarana ANRI sebenarnya lebih memadai dan tidak ketinggalan, namun dari keseriusan pengolahan arsip dan pendayagunaan arsip statis yang dikelola tampaknya NAA lebih pesat perkembangannya dan lebih terarah dalam hal tersebut tampaknya kita harus banyak belajar dari NAA. Keseriusan pengelolaan arsip khusus pengelolaannya dalam arsip digital dan digitalisasi arsip yang dilaksanakan secara terprogram untuk tujuan akses dan preservasi. Semoga paparan pengalaman di atas menjadi masukan yang berharga bagi kita semua.

Ghesa Ririan Mitalia :

MENEMBUS KEBAKUAN: PENGEMBANGAN KEAHLIAN ARSIPARIS SEBAGAI SDM KREATIF

“Film merupakan anugerah seni terbesar yang pernah dimiliki manusia”

- Janji Joni (2007)-

Sebuah kutipan dari salah satu film Indonesia paling laris yang mampu menembus hingga 1 juta penonton ini rasanya tidaklah terlalu berlebihan. Film didiskusikan sebagai situs penting bagi produksi subjektivitas individu dan identitas nasional (Storey, 2010:67). Visualisasi yang ditampilkan pada suatu film terkadang mewakili identitas atau suatu fenomena tertentu pada zamannya. Arsip film menjadi salah satu aset bangsa dan negara karena melalui visualisasi yang ada dalam film dapat dilihat kondisi sosio-kultural suatu bangsa dari masa ke masa.

Menelusur Jejak Konteks Arsip

Film dan Foto

Pengertian arsip audio-visual menurut Peraturan Kepala ANRI No. 23 tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis sendiri adalah arsip yang isi informasinya dapat dipandang dan/atau didengar, seperti foto, film, video, dan audio/rekaman suara. Arsip Audio-Visual juga dikenal dengan Arsip Media Baru salah satunya terdiri atas arsip foto dan arsip film. Khazanah arsip film yang dimiliki oleh ANRI sekitar 70.054 reel,



Poster film Tiga Dara (1950), Salah satu film laris pada masanya. Kopi 35 mm / VHS judul ini dapat diakses dari Koleksi Sinematek Indonesia

sedangkan untuk arsip foto sebanyak 1.663.000 lembar.

Dari berbagai instansi yang telah menyerahkan arsipnya kepada ANRI, terutama untuk arsip foto, tidak semuanya datang dalam kondisi telah diberi caption (keterangan). Banyak di antaranya merupakan foto-foto tanpa keterangan. Tidak jelas peristiwa apa yang diabadikan dalam tiap lembar per lembar foto tersebut. Selain itu, dalam satu album kadang terselip beberapa lembar foto yang tidak

memiliki kesinambungan dengan peristiwa atau kegiatan yang diabadikan. Kondisi ini biasanya banyak ditemui pada arsip-arsip foto yang dihasilkan pada masa republik. Arsip-arsip foto yang dihasilkan pada masa pemerintah kolonial Hindia-Belanda jauh lebih rapi dan lebih baik dalam hal kelengkapan informasi bila dibandingkan dengan arsip-arsip foto masa republik. Sebut saja arsip-arsip foto KIT, NIGIS, dan RVD. Dalam arsip-arsip foto tersebut pada bagian belakangnya telah tercetak dengan rapi berbagai informasi yang melekat dengan arsip yang bersangkutan, seperti nomor arsip, onderwerb, fotografer, dan bahkan juga telah ada caption yang menerangkan mengenai peristiwa dalam foto. Tidak jauh berbeda dengan arsip-arsip foto, arsip-arsip film yang diserahkan kepada ANRI tidak pula disertai dengan dokumen pendukung, seperti script, storyline ataupun skenario.

Ketidaklengkapan informasi pada

arsip foto maupun tidak adanya dokumen pendukung yang menyertai arsip film beresiko membawa arsip-arsip tersebut kehilangan konteksnya. Dalam proses mengolah dan mendeskripsikan arsip-arsip tersebut, arsiparis benar-benar harus memiliki bekal pengetahuan dan informasi yang cukup, agar menghasilkan deskripsi atau informasi yang akurat kepada para pembaca dan menjaga arsip-arsip tersebut tidak keluar dari konteksnya. Kondisi ini sedikit berbeda apabila dibandingkan dengan koleksi arsip film yang tersimpan di Sinematek. Arsip-arsip film yang berada di Sinematek tersimpan bersama dengan kelengkapan dokumen pendukungnya, seperti script, poster filmnya, bahan-bahan literatur, dan bahkan kliping berita mengenai film terkait.

Pemanfaatan Arsip menjadi Suatu Produk Kreatif

Pada tahun 1995, seorang sutradara asal Belanda yang bernama Vincent Monnikendam menghasilkan satu karya film dokumenter yang berjudul *Mother Dao, The Turtlelike*. Film dokumenter ini sangatlah istimewa karena film dengan durasi sepanjang 90 menit ini semuanya dari arsip. Sebanyak kurang lebih 200 arsip film dipergunakan sebagai footage dalam film dokumenter *Mother Dao, The Turtlelike*. Arsip-arsip film tersebut didapatkan dari EYE Film Institute Netherlands, tempat penyimpanan arsip audio-visual di Belanda. Arsip-

arsip film tersebut dihasilkan selama masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, yaitu sekitar antara tahun 1912 hingga 1932 di Indonesia untuk kepentingan propaganda.

Pada masanya, arsip-arsip tersebut dipergunakan sebagai kepentingan propaganda yang ingin menyampaikan keuntungan dari adanya pemerintah kolonial di Hindia-Belanda dengan memperlihatkan kesejahteraan daerah koloninya. Terjadi interpretasi ulang pada masa kini ketika arsip-arsip tersebut dipergunakan sebagai *footage-footage* pada film dokumenter. Arsip-arsip tersebut memperlihatkan bagaimana kondisi Hindia-Belanda, khususnya Pulau Nias di tahun 1912 hingga 1932. *Mother Dao* mampu menghadirkan visualisasi kondisi masyarakat lokal yang menderita di bawah eksploitasi ekonomi yang kejam dari pemerintah kolonial, bagaimana perlakuan orang-orang Belanda yang sebenarnya terhadap daerah koloninya.

Pada tahun 2013 melalui program hibah karya yang diinisiasi oleh Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Indonesia Visual Archive (IVAA) di Yogyakarta dan beberapa organisasi lainnya, sutradara Yosep Anggi Noen bekerja sama dengan Museum Pemerintah Nusa Tenggara Timur mengerjakan satu proyek berjudul *Genre Sub Genre*. Karya ini memanfaatkan koleksi arsip foto yang dimiliki oleh Museum Pemerintah Nusa Tenggara Timur

dan secara kreatif mengolah arsip foto untuk dapat memvisualisasikan kondisi sosio-kultural masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sutradara Yosep Anggi Noen memfokuskan karya filmnya pada pendidikan, transportasi dan leisure. Proyek ini Memfiksikan arsip karena selain memanfaatkan arsip-arsip foto koleksi Museum Pemerintah Nusa Tenggara Timur, sutradara Yosep Anggi Noen juga menampilkan satu scene fiksi yang secara animasi memperlihatkan perahu yang terbuat dari kertas dalam ukuran besar tengah berlayar.

Pemanfaatan koleksi arsip film yang tersimpan pada EYE Film Institute Netherlands dan Museum Pemerintah Nusa Tenggara Timur menjadi film Genre Sub Genre menunjukkan bahwa arsip dapat diolah dan dimanfaatkan secara kreatif. Keduanya mengubah paradigma yang selama ini melihat arsip hanya sumber informasi yang kaku dokumen kuno yang jarang termanfaatkan. *Mother Dao* dan *Genre Sub Genre* mengenalkan kepada kita bahwa arsip dapat dikemas secara kreatif dan menarik tanpa mengurangi substansi isi informasi dari arsip itu sendiri.

Pengembangan Potensi Arsiparis sebagai SDM Kreatif

Arsiparis adalah satu profesi unik yang bergelut di bidang kearsipan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 48 Tahun 2014

tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dijelaskan bahwa yang dimaksud arsiparis adalah seorang PNS yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan yang diangkat oleh pejabat berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, dan satuan organisasi perguruan tinggi negeri.

Salah satu tugas seorang arsiparis adalah mengelola arsip dan menyajikannya sebagai informasi kultural yang siap pakai. Arsiparis dalam mengolah arsip harus berpedoman pada upaya mendukung peningkatan efektivitas pelestarian serta pemanfaatan arsip sebagai memori kolektif bangsa pada skala luas.

Khazanah arsip yang dimiliki oleh ANRI begitu kaya dan beragam. Arsiparis ANRI memiliki kompetensi dan keahlian yang mumpuni dalam mengolah khazanah arsip yang ada. Arsiparis ANRI memiliki pengetahuan khusus di bidang kearsipan, pemahaman akan konsep, teori dan prinsip-prinsip kearsipan, terutama untuk arsip statis. Dengan latar belakang dan bekal pengetahuan khusus di bidang kearsipan tersebut, arsip-arsip film tanpa script dan arsip-arsip foto tanpa caption dapat

dideskripsikan dan disajikan sebagai informasi yang unik kepada masyarakat sebagai pengguna informasi arsip.

Pengetahuan khusus dan kemampuan yang dimiliki oleh arsiparis yang ada di ANRI ditunjang dengan khazanah arsip statis yang kaya dan beragam di ANRI memungkinkan bagi arsiparis untuk mengembangkan kemampuan dan profesional kearsipan di bidang kreatif. Arsiparis tidak lagi hanya sekedar menyajikan informasi isi arsip dalam bentuk yang kaku namun juga dapat mengkreasikannya dan membuat arsip, terutama arsip media baru menjadi menyenangkan bagi masyarakat, sebagaimana yang dilakukan oleh sutradara Vincent Monnikendam dalam *Mother Dao* dan Yosep Anggi Noen dalam Genre Sub Genre.

Arsiparis di ANRI perlu menambah pengetahuan dan kemampuan seta teknik dalam bidang kreatif seperti pembuatan film dokumenter yang secara penuh menggunakan arsip di dalamnya. Pembuatan film dokumenter yang menggunakan arsip dapat dibuat lebih kreatif lagi dengan menambahkan unsur instrumen musik etnik khas Indonesia dan langgam-langgam puisi sebagai pengganti narator sehingga tidak ada kesan kaku di dalamnya. Sebagai contohnya adalah *Mother Dao*. Cara lain dalam memanfaatkan arsip secara kreatif adalah dengan memfiksikan arsip sebagaimana yang dilakukan sutradara Yosep Anggi Noen

pada Genre Sub Genre tanpa harus mengurangi atau menghilangkan konteks substantif isi informasi arsip yang digunakan.

Pengembangan keahlian arsiparis di bidang kreatif ini akan sangat bermanfaat terutama di era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Arsip-arsip dapat dimanfaatkan isi informasinya secara menarik dan kreatif serta terdapat unsur seni di dalamnya jauh dari kesan kaku dan membosankan. Masyarakat bisa mendapat informasi dan bahkan visualisasi secara nyata mengenai sejarah perjalanan bangsa yang terekam dalam arsip dengan cara yang lebih menyenangkan. Selain itu juga akan bermanfaat untuk menumbuhkan minat dan kesadaran masyarakat terhadap arsip-arsip yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia.

Beragamnya khazanah arsip yang tersimpan di dalam Arsip Nasional Republik Indonesia menjadi nilai tambah bagi arsiparis dalam membuat karya kreatif dengan memanfaatkan arsip-arsip yang ada. Penggunaan *footage-footage* sama yang pernah digunakan sebelumnya pada satu karya kreatif bukan masalah karena copyright atau hak cipta tetap berada pada instansi penyimpan dalam hal ini adalah Arsip Nasional Republik Indonesia. Hal ini tentu akan mempermudah arsiparis ketika akan membuat suatu karya kreatif yang memanfaatkan arsip ke depannya.

Yuanita Utami :

SENJA DESEMBER DI TANAH RENCONG

Aku tidak begitu mengerti apa itu pekerjaan arsiparis, tentu tidak seterkenal akan profesi dokter, guru, atau pilot. Ah, apapun itu yg jelas Ayah adalah sosok yg patut aku kagumi, kerja keras dan semangatnya untuk memberikan kehidupan kepada kami sekeluarga telah menghidupkan kebanggaan kami kepadanya.

“Ayo Bunda, jangan telat..hari ini Ayah akan rapat tepat jam 8.” kata Ayah mewarnai hiruk pikuk pagi di rumah mungil kami. Bunda semakin bergegas membereskan meja makan setelah sarapan kami usai. “Iya Yah, ini buru-buru. Rapat sepagi ini, ada persoalan penting apa Yah, tumben” sergah ibu sambil terus mengitari dapur-kamar, kamar-dapur.

Waktu tak lagi mau dihitung. Detik kian melaju tak bisa dihentikan. Aral lalu lintas memuntahkan amarah di tengah asap bakar timbal. Emisi gas tak berperikemanusiaan. Semua tumpah mengiringi langkah pagi menjemput rezeki. Percakapan Ayah-Bunda lenyap seiring kukecup tangan tangan tangguh Ayah..”Assalamualaikum..”.

Tepat tanggal 26 Desember 2004, Hari yg entah kutunggu atau tidak karena tugas liburan sekolah tak dapat dielakkan. Lusa hari, mau tidak mau titik-titik pada soal itu harus sudah terisi! Sayup-sayup terdengar suara dari televesi ramai. Kotak ajaib 14 inch itu mengudarakan berita, memvisualisasikan air bah yg datang mengggulung. Akupun terhenyak sambil menghela napas menyaksikan berita itu.

Riuh rendah suara biola dan senandung lagu tanah rencong terdengar. Tsunami itu datang! Kota Aceh lenyap dari angkasa. Tsunami menyisakan tangis dan sedu sedan. Kepedihan para yatim dan piatu. Bantuan pangan terhambat. Aceh terisolasi. Mereka mencari udara segar di tengah bau kikisan tanah, lembab tiang rumah yg terbuat dr kayu, makin lama..bau mayat segar kemudian mulai menyengat busuk.

“ Apaaa...Ayah ditugaskan ke Aceh?,” kami sekeluarga kaget dengan kabar dari Ayah. kata Ayah “Tidak perlu khawatir Aceh akan aman

tsunami susulan tidak ada dalam prakiraan cuaca.

Baiklah, aku tahu tugas negara bagi Ayah tak bisa ditawar. Bencana tsunami yg melenyapkan barang-barang dan manusia yang terlintas, berdampak pula pada rusaknya dokumen berharga masyarakat Aceh. Kata Ayah, sebagai seorang arsiparis ini adalah hal yang penting. Rakyat Aceh bisa bertarung badik kalo tanah mereka diperebutkan nantinya, sedangkan akta tanah sudah nyaris lebur menjadi bubur kertas terkena sapuan tsunami.

Ayah seorang arsiparis, pantang mundur di segala medan. Ayah pun berangkat. Kami mengantarkan Ayah dengan doa dan sedikit kuikatkan rindu pada saku Ayah, biar Ayah ingat pulang, kembali.

Ujian kami tak berhenti di sini, pada saat itu tugas Ayah bukan hanya mencari dan merestorasi arsip yang ditemukan di Aceh, namun Ayah juga harus menjadi sukarelawan membantu menyelamatkan korban

CERITA KITA

bencana Tsunami dan membersihkan puing-puing bekas bencana. Berbekal ketulusan dalam menolong, semua dapat dijalankan dengan ikhlas dan penuh dengan tanggungjawab. Namun demikian, Tuhan menguji dengan ujian yang lain. Selang beberapa hari di tengah penugasan ayah ke Aceh, kami terputus telewicara. Sama sekali terputus.

Pasca bencana, infrastruktur Aceh dalam proses pemulihan. Demikian halnya signal alat komunikasi pun redup nyala. Sedangkan *handphone* Ayah, mati. Bunda mencoba mendapatkan kabar keadaan Ayah, tidak hanya menghubungi teman satu tim Ayah, tetapi juga menghubungi tim relawan dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terlibat di sana. Nihil, tidak ada kabar.

Lokasi penyisiran arsip yang terkena air bah dipencar. Ayah terpisah dari anggota tim lainnya. Saat itu, tak ada kabar berita kepada kami, hanya firasat mengantarkan kami pada kenestapaan hati. “Le, Ayahmu *ki* mesti...” Bunda menghela napas panjang, tak kuat melanjutkan,

“Bun, Ayah pasti akan menghubungi kita..” ucapku berusaha menenangkan hati Bunda dan aku sendiri.

Di kantor, Bunda malah semakin gundah, ucapan belasungkawa karena Ayah belum ada kabar, sampai pada kabar tak berdasar tentang Ayah pun menghampiri pendengaran Bunda.

Malam itu, hanya gemiricik air yang ada di kolam buatan di teras rumah kami yang mengisi kesunyian malam. Aku mengimami Bunda untuk bertanya kepada Sang Khalik tentang keadaan Ayah.

Aku rasa malaikat malam itu turun saat kami memanjatkan doa, dan disampaikan kepadaNya doa kami. Sesamudera kegundahan sudah tumpah bersama bulir-bulir air mata

Bunda yang cepat-cepat disekanya.

“Ayah, ini Ayah?” aku angkat telepon yang berdering di *handphone* Bunda. Persis nama “Ayah” ada di layar. Bunda tak bergeming sedikitpun, mungkin pikirannya sudah menembus ruang membayangkan dirinya berjumpa dengan Ayah.

Kudapati kabar dari suara Ayah yang masih terdengar lemah. Ayah terkena malaria dan sempat dirawat satu minggu di rumah sakit. Kondisi Ayah tidak memungkinkan memberi kabar kepada siapapun. Aku tak menyimak penuh apa yang diutarakannya. Bagiku yang terpenting, Ayah masih ada.

Setelah ujian demi ujian mampu kita lewati, sudah saatnya Ayah kembali ke pelukan keluarganya, hari itu aku masih ingat sekali, hari Senin pagi kami sekeluarga berangkat ke Halim Perdana Kusuma untuk menjemput Ayah yang pagi itu sudah tiba di bandara, dengan hati haru dan senang semua bercampur menjadi satu.

Ketika itu kami melihat semua arsiparis turun satu persatu dari tangga pesawat sambil senyum terukir di wajah para abdi negara yang secara ikhlas menjalankan tugas negara. dan ketika itu tatapanku berhenti pada seseorang yang baru saja turun sambil berlari menghampiri kami, kami pun berlari menghampiri sosok beliau yang tegap, pandangan penuh cinta dan kerinduan akan keluarga, karena kerinduan yang begitu dalam akan sosok yang berdiri didepanku, dalam pikiranku, benarkah itu Ayah yang selama ini sedang menjalankan pengabdian bagi negaraku? Ya, seperti drama India saja Ayah memeluk kami semua sambil berkata kepada Bunda dan padaku, “Ayah kembali, Sayang..”.

Waktu terus bergulir, Ayah aktif di salah satu instansi pemerintahan. Semua pengalaman Ayah membuatku

menjadi cinta dengan dunia kearsipan, hal itu yang melahirkan semangatku untuk menjadi seorang arsiparis kelak. Meski mimpiku belum terwujud tapi aku masih mempunyai semangat untuk bisa meraih impian itu dan bisa bersama-sama berangkat dengan Ayah ke tempat kerja sambil berkata “Ayah, engkaulah inspirator terhebat dan yang akan aku hormati sepanjang masa”. Restuilah aku untuk meraih cita-cita ini dan meneruskan titahmu menjadi abdi negara seutuhnya.

Bukan emas permata dan harta yang melimpah aku kejar namun pengabdian dan memberikan manfaat untuk negeriku itu adalah hal yang terindah untukku, meski sekarang Ayah belum merestui cita-citaku ini, bahkan sambil bercanda Ayah berkata, “Yakin kamu mau jadi arsiparis? Nanti sahabatmu hanya debu dan bok arsip saja lho..,” sambil tersenyum melihatku. Akan tetapi suatu saat nanti ketika aku sudah mencapainya, aku akan persembahkan keberhasilan itu untuk bumi pertiwi dan mendapatkan semangat itu dari Ayahku yang terhebat.

Ayah meski baktimu masih sebatas sebagai ‘arsiparis’ namun tanpa ada sosok sepertimu, banyak hal yang akan hilang tanpa makna, tak ada rekam jejak yang terikat. Bukan hanya untuk keluarga semoga Ayah juga menjadi panutan untuk para arsiparis muda yang lainnya untuk selalu siap sedia sebagai garda terdepan penyelamatan dokumen penting di negara tercinta.

Selamat ulang tahun Ayahku tercinta, semoga secarik tulisan ini menjadi kenangan dan kado terindah dariku yang kupersembahkan untuk Ayah.

Jakarta, 28 Oktober 2005



R. Yovi Mega Purwono :

SELYANG PANDANG KEGIATAN KEARSIPAN DI KERAJAAN MAJAPAHIT DALAM KITAB NAGARAKRETAGAMA

Sudah bukan rahasia lagi bahwa Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang pernah berjaya di nusantara. Salah satu bukti kejayaan tersebut yaitu adanya bukti kegiatan-kegiatan kearsipan yang rapi, seperti yang terekam dalam Kitab Nagarakretagama, sebuah kitab yang berisi sumber pengetahuan mengenai Kerajaan Majapahit pada waktu pemerintahan Hayam Wuruk atau Rajasanagara (1350-1389).

Patutlah kita berbangga hati karena setelah melalui sidang pada tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan 21 Juni 2013 di Korea Selatan, UNESCO telah menetapkan Kitab Nagarakertagama sebagai *Memory of The World* 2013. Diantara 54 inskripsi dari puluhan negara yang ditetapkan UNESCO sebagai *Memory of The World* 2013, dua diantaranya adalah naskah kuno dari Indonesia, yaitu Kitab Nagarakertagama dan Babad

Diponegoro.

Kitab yang dikarang oleh Mpu Prapanca pada tahun 1365 Masehi dan berbahasa Jawa Kuno ini terdiri dari 98 *pupuh*. Selain berisi tentang penjelasan kota dan wilayah Majapahit, uraian perjalanan ke wilayah-wilayah Majapahit, dan silsilah raja Hayam Wuruk, ternyata Kitab Nagarakretagama juga berisi tentang rekam jejak kegiatan kearsipan pada masa itu.



www.unesco.org



Sebagian dari naskah kuno Nagarakertagama

Sebagian dari naskah kuno Nagarakertagama

Arsip Sebagai Bukti

Pada masa Kerajaan Majapahit telah dikenal tentang pentingnya arsip sebagai bukti hak kepemilikan. Diterangkan bahwa ketika Prapanca menemani rombongan kerajaan meninjau wilayah Singasari, ia menyempatkan diri melancong ke sebuah wihara di Indarbaru dan menanyakan bukti kepemilikan wihara tersebut kepada pengelolanya. Sang pengelola wihara bisa menunjukkan bukti kepemilikan wihara dengan menunjukkan sebuah piagam pengukuh yang telah dianugerahkan raja kepada pengelola wihara tersebut. Seperti tercantum dalam Kitab Nagarakertagama *pupuh* 35 bait 1-4.

Pupuh 35

- *tuhun i datōn nire pasuruhan manimpan anidul / ri kapañanan,*

nulyatutdamargga madulurtikañ ratha daten rin andoh wawañ, uwah i kdu plukh / lawan i hambal antya nikañ pradeçenituñ, jhathiti ri sinhasaripura rajadarmma dinunuñ narendramgil.

- *kunen ika sañ prapañca kari kulwan in pasuruhan pijer lalana, kuti manaran / rindarbaru ri bhuh pradeçanikanañ pradeça hujun, yata pinaran / tinakwanaken ança punpunanika ri sañ sthapaka, likita tinonaken / rasika supraçasti winacamanun / waspada.*
- *ikan i hepit / yathaswa salbak / wukirnya wisayança sañ hyañ kuti, atnah i markkaman / sawah i balunhura sawah muwah riñ hujun, asanikanañ praçasti magawe hyunin kawi madoha sankeñ pura, ri taya nikañ purakrttha t-her ddaridra musirañ kutindarbaru.*

- *karananinaçrumankati huwusnira mpu masgeh bhawisyañ laris, maluy i kaçewakan / datn i sinhasari matatur manankil / mark, nrpati huwus mamuspa ri dalm / sudarmma sakatustaniñ twas ginōñ, hana ni kduñ bhiru ri kacuranganan / mwan i burn lanonyenituñ.*

Terjemahan:

- Sampai Pasuruan menyimpang jalan ke selatan menuju Kepanjangan. Menganut jalan raya, kereta lari beriring-iring ke Andoh Wawang. Ke Kedung Peluk dan Ke Hambal, desa penghabisan dalam ingatan. Segera Baginda menuju Kota Singasari bermalam dib alai kota.
- Prapanca tinggal disebelah barat Pasuruan ingin terus melancong. Menuju Indarbaru yang letaknya di

CERITA KITA

daerah Desa Hujung. Berkunjung di rumah pengawasnya, menanyakan perkara tanah asrama. Lempengan piagam pengukuh diperlihatkan, jelas setelah dibaca.

- Isi piagam: tanah datar serta lembah dan gunungnya milik wihara. Begitu pula dengan Markaman, lading balunghura, sawah hujung. Isi piagam membujuk sang pujangga untuk tinggal jauh dari pura. Bila telah habis kerja di Putusingin, ia menyingkir ke Indarbaru.
- Sebabnya terburu-buru berangkat setelah dijamu bapa asrama. Karena ingat akan giliran menghadap di balai Singasari. Habis menyekar di candi makam, Baginda mengumbar nafsu kesukaan. Menghirup sari pemandangan di Kedung Biru, Kasuranganan dan Bureng.

Blue Print

Pentingnya arsip sebagai “blue print” untuk memperbaiki bangunan yang rusak pun terekam dalam Kitab Nagarakretagama. Ketika rombongan raja sampai di wilayah desa Simpang yang didalamnya terdapat candi makam leluhur yang menaranya rusak, raja berkehendak untuk memperbaikinya. Dibacalah prasasti tentang pendirian bangunan candi makam tersebut untuk mengetahui struktur dan arah bangunannya. Hal tersebut tercantum dalam Kitab Nagarakretagama *pupuh* 61 bait 4 dan *pupuh* 62 bait 1.

Pupuh 61

- sah sanke lodaya sira mananti ri simpin, swecchanambyamahajona ri saṅ hyaṅ darmma, sakniṅ prasanda

tuwi hana dohnya nulwan, na hetunyan / banunen anawetan matra.

- Terjemahan:
- 4. Meninggalkan Lodaya menuju desa Simpang. Ingin memperbaiki candi makam leluhur. Menaranya rusak, dilihat miring ke barat. Perlu ditegakkan kembali agak ke timur.

Pupuh 62

- *mwaṅ tekaṅ parimana tapwa pinatut wyaktinya lawan praçasti, hetunyan tinapan / samapa dinepan / purwwadi sampun tinugwan, ndan saṅ hyaṅ kuti riṅ gurunḡurun inambil / bhumya saṅ hyaṅ suqarmma, gontoṅ wisnu rare kabajradaraneka paṅhli çri narendra.*

Terjemahan:

- Perbaikan disesuaikan dengan bunyi prasasti, yang dibaca lagi. Diukur panjang lebarnya; disebelah timur sudah ada tugu asrama, gurun-gurun diambil sebagai denah candi makam. Untuk gantinya diberikan Ginting, Wisnurare di Bajradara.

Tertib dalam Pengarsipan

Tertib dalam pengarsipan ternyata adalah salah satu kunci dari kejayaan Kerajaan Majapahit. Seperti yang tercantum dalam Kitab Nagarakretagama *pupuh* 73 bait 1-2.

Pupuh 73

- *ndan / nrpa tiktawilwapuraraja mankin atiyatna niti rin ulah, riṅ wyawahara tan hana khasinhin in hati sapöhnin agama tinut, tan dadi paksapata yat aweh wibhuti*

saniruktya riṅ jana kabeh, kirtti giṅönniran wruh in anagatadi tuhu dewamurti sakala.

- *nka tikananḡ sudarmma haji suk ni saṅ tuhatuha nareçwara danu, salwirika turuṅpinahuwusnirenapi rinaksa pinriḡ iniwö, siṅ katayan / praçasti winkas / praçastyana ri saṅ widagda rin aji, sthitya phalanya tanpa tmaha wiwada tumuse satusnira hlem.*

Terjemahan:

- Baginda makin keras berusaha untuk dapat bertindak lebih bijak. Dalam pengadilan tidak serampangan, tapi tepat mengikuti undang-undang. Adil segala keputusan yang diambil, semua pihak merasa puas. Masyhur nama beliau, mampu menembus zaman, sungguhlah titisan Bhatara.
- Candi makam serta bangunan para leluhur sejak zaman dahulu kala yang belum siap diselesaikan, dijaga dan dibina dengan seksama. Yang belum punya prasasti disuruh buat piagam oleh ahli sastra. Agar kelak jangan sampai timbul perselisihan, jikalau sudah temurun.
- Demikianlah selang pandang tentang kegiatan kearsipan di Kerajaan Majapahit yang terekam dalam Kitab Nagarakretagama. Ternyata nenek moyang kita juga telah mengenal kegiatan kearsipan. Terbukti dengan melaksanakan kegiatan kearsipan secara tertib dan konsisten, Kerajaan Majapahit pernah jaya di nusantara dan termashur di dunia.

Suasana kanal di Ibu Kota Majapahit Trowulan dalam poster National Geographic Indonesia, September 2012 (Sandy Solihin/NGI)

ANRI AKUISISI ARSIP TEMPO DAN TOKOH PENDIDIKAN

Jakarta, **ARSIP** - Bertepatan dengan penyeleenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelamatan Arsip Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan Swasta (4/5), Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mustari Irawan menerima arsip yang diserahkan Direktur Utama PT. Tempo Inti Media, Bambang Harrymurti dan Tokoh Pendidikan, H. Basyuni Suriamiharja. Acara dilaksanakan di Ruang Bina Karna Lantai 1, Hotel Bidakara, jalan Jend. Gatot Subroto kav.71-73 Jakarta Selatan.

Arsip yang diserahkan PT. Tempo Inti Media merupakan arsip foto yang mencakup 3.777 folder terdiri dari 2.284.110 ekpose. Adapun media arsip tersebut terdiri atas negatif foto, slide dan kontak print. Sedangkan H. Basyuni Suriamiharja yang juga merupakan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia periode 1970 s.d 1998 menyerahkan arsip tekstual dan audiovisual seperti piagam penghargaan Tokoh Guru Nusantara dari empat negara (Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura).

Dalam sambutan Mustari Irawan saat pembukaan Rakor disampaikan bah-wa melalui kegiatan penyelenggaraan rakor dan serah terima arsip ini diharapkan dapat menciptakan kesepahaman dan menumbuhkan kesadaran bahwa penyelamatan arsip BUMN dan perusahaan swasta menjadi tanggung jawab bersama, sehingga dibutuhkan partisipasi aktif pihak BUMN dan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan penyelamatan arsip statis. Arsip yang diselamatkan ANRI, nantinya dapat digunakan publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan dan ilmu pengetahuan. "ANRI juga terbuka untuk bekerja sama dengan pihak BUMN ataupun perusahaan dalam hal pengelolaan arsip, sehingga bagi perusahaan yang ingin berkonsultasi tentang pengelolaan arsip, kami menyambut dengan tangan terbuka," jelas Mustari.



Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mustari Irawan (kiri) dan Direktur Utama PT. Tempo Inti Media, Bambang Harrymurti (kanan) menunjukkan Berita Acara Serah Terima Arsip TEMPO

Pada kesempatan ini, Bambang dan Basyuni pun memberikan apresiasi kepada ANRI dengan melaksanakan penyelamatan arsip yang nantinya dapat menjadi media pembelajaran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi di era kemajuan teknologi saat ini, diharapkan arsip dapat menjadi media pembelajaran secara online bagi masyarakat. Bambang pun menegaskan, bahwa sudah selayaknya perhatian dunia bisnis terhadap bidang kearsipan menjadi suatu hal yang penting dan utama, karena arsip itu adalah aset perusahaan, di dalamnya terkandung banyak muatan informasi dan menjadi rujukan utama baik dalam pembelajaran maupun pembuktian.

Selain itu, pada kesempatan ini dilaksanakan pula dua sesi diskusi. Sesi I disampaikan materi tentang Kebijakan Penyelamatan Arsip Statis oleh Deputi Bidang Konservasi Arsip, M. Taufik dan materi tentang Strategi Pengelolaan Arsip dalam Rangka Penyelamatan Arsip Media Massa yang Direktur Utama PT. Tempo Inti Media Utama. Selanjutnya diskusi sesi II membahas materi Strategi Pengelolaan Arsip dalam

Rangka Penyelamatan Arsip BUMN yang disampaikan perwakilan PT. Angkasa Pura I dan Penyelamatan Arsip Perbankan yang disampaikan perwakilan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Penyelenggaraan Rakor Penyelamatan Arsip BUMN dan perusahaan sejalan dengan amanat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan serta Pasal 53 ayat (1) dan (6) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pada Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 8 tahun 1997 dijelaskan bahwa dokumen perusahaan tertentu yang mempunyai nilai guna bagi kepentingan nasional wajib diserahkan kepada ANRI berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan. Sedangkan dalam UU 43 Tahun 2009 dalam Pasal 53 ayat (1) dijelaskan bahwa Lembaga Negara tingkat pusat wajib menyerahkan arsip statisnya kepada ANRI. Pasal 53 ayat (6) dijelaskan bahwa perusahaan wajib menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan sesuai tingkatannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (TK)

BEGAWAN PEMASARAN INDONESIA, HERMAWAN KARTAJAYA SERAHKAN ARSIP MARKPLUS KE ANRI



Begawan Marketing Indonesia Hermawan Kartajaya sekaligus Pendiri MarkPlus, Inc. menyerahkan arsip perusahaan MarkPlus kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang diterima langsung oleh Kepala ANRI Mustari Irawan

Jakarta, ARSIP - Bertempat di Main Atrium Kota Kasablanka, Begawan Marketing Indonesia Hermawan Kartajaya sekaligus Pendiri MarkPlus, Inc. menyerahkan arsip perusahaan MarkPlus kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang diterima langsung oleh Kepala ANRI Mustari Irawan. Penyerahan arsip dilaksanakan pada malam perayaan ulang tahun ke-25 MarkPlus, Inc (12/5). Arsip yang diserahkan mengenai kegiatan-kegiatan strategis

perusahaan, strategi marketing dan bisnis, dan pemikiran-pemikiran Hermawan Kartajaya sebagai pakar marketing.

Dalam sambutannya Mustari mengatakan bahwa arsip tersebut akan kami simpan, pelihara, olah, dan sampaikan kepada masyarakat sebagai bagian dalam proses pembelajaran. "Semoga pemikiran Hermawan Kartajaya selama ini memberikan sumbangsih besar terhadap bangsa dan Negara," ujarnya.

Pada usia ke-25, MarkPlus telah berkembang dan memiliki empat bisnis unit yaitu MarkPlus Consulting, MarkPlus Insight yang bergerak di bidang riset pemasaran, MarkPlus Institute sebagai unit pendidikan dan pelatihan ilmu pemasaran dan bisnis, serta Marketeers yang merupakan media dan connecting platform bagi para pemasar atau marketer. (sa)

PUNCAK ACARA HARI KEARSIPAN KE-44, DITUTUP DENGAN MALAM TASYAKURAN

Jakarta, ARSIP - Peringati Hari Kearsipan ke-44, 18 Mei 2015 dengan tema Arsip, Samudera Pengetahuan Titian Masa Depan, ANRI menyelenggarakan berbagai kegiatan di antaranya, Executive Board Meeting International Council on Archives (ICA), Seminar Internasional Preservasi Arsip, Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelamatan Arsip Perusahaan, Musyawarah Kerja Tahunan IAA, Upacara Peringatan Hari Kearsipan, Pameran Arsip Tematis, Lomba Tertib Arsip dan Arsiparis Teladan ANRI, Seminar Nasional Kearsipan Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI), Rakor Penyelamatan Arsip Instansi Strategis Kabinet Indonesia Bersatu, MoU AAI dengan Universitas Indonesia (UI), *Focus Group Discussion* (FGD) Sahabat Arsip, Seminar Internasional Arsip Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Gerakan Non-Blok (GNB) sebagai Memory of the World, Sosialisasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) & Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), dan Lomba Seni Budaya dan Olah Raga.

Puncak acara kemeriahan Hari Kearsipan ke-44 di ANRI ditutup dengan malam tasyakuran di Gedung Arsip Nasional RI, Jalan Gajah Mada, nomor 111. Pada malam tasyakuran, Kepala ANRI Mustari Irawan menyerahkan piagam penghargaan di bidang kearsipan kepada Bupati Badung Anak



Pemotongan tumpeng pada puncak acara kemeriahan Hari Kearsipan ke-44 di ANRI

Agung Gde Agung dan Syahri Mulyo Bupati Tulungagung atas kepedulian, komitmen dan integritasnya yang tinggi di bidang kearsipan dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya arsip dan kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip yang bernilai guna kesejarahan. Pada malam tasyakuran itu, diserahkan pula Sertifikat Akreditasi B kepada lembaga kearsipan Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam sambutan Hari Kearsipan Ke-44, Mustari menyampaikan latarbelakang peringatan Hari Kearsipan. "Hari Kearsipan yang kita peringati setiap tanggal 18 Mei diambil dari penetapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Pokok-

Pokok Kearsipan yang disahkan pada 18 Mei 1971. Dengan demikian, jelaslah bahwa Hari Kearsipan diciptakan untuk menjaga ritme dan keberlanjutan semangat kita dalam membesarkan kearsipan", ujarnya.

Acara tasyakuran dihadiri oleh beberapa Kepala ANRI dari berbagai periode diantaranya, Noerhadi Magetsari (1992 - 1998), Mukhlis Paeni (1998 - 2003), Djoko Utomo (2004 - 2009) dan M. Asichin (2010 - 2013), pegawai ANRI, dan perwakilan Arsip Nasional Belanda. Pada acara itu, dilaksanakan pemutaran film mengenai perkembangan penyelenggaraan kearsipan di Indonesia dan ANRI dari Masa ke Masa. (sa)

PENYELAMATAN ARSIP: 13 LEMBAGA NEGARA SERAHKAN ARSIPNYA KE ANRI



Deputi Bidang Pencegahan PPATK Deche Helmy Hadian menyerahkan arsip PPATK secara simbolis kepada Kepala ANRI Mustari Irawan

Jakarta, ARSIP - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menerima tambahan khazanah arsip dari 13 lembaga negara pada bulan Mei 2015 ini. Arsip dari 13 lembaga negara tersebut diterima Kepala ANRI, Mustari Irawan secara simbolis di sela-sela penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelamatan Arsip Lembaga Negara (4/5) di Ruang Bima Lantai 2, Hotel Bidakara, jalan Jenderal Gatot Subroto kav.71-73 Jakarta Selatan. Penyerahan arsip dari 13 lembaga negara serta pelaksanaan Rakor Penyelamatan Arsip Lembaga Negara dilaksanakan sesuai dengan amanah Pasal 53, 60 dan 61, Undang-Undang

43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Rakor dibuka oleh Kepala ANRI, Mustari Irawan dan diikuti 110 orang peserta yang berasal dari 41 lembaga negara. Tujuan penyelenggaraan rakor ini adalah untuk mendiskusikan strategi pengelolaan arsip khususnya tentang penyelamatan arsip statis yang akan diserahkan serta membahas dan memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi dalam penyelamatan arsip bangsa di tiap lembaga negara.

Dalam sambutannya, Mustari mengungkapkan bahwa penyelamatan arsip statis (bernilai guna sejarah, telah habis masa retensinya dan berketerangan dipermanenkan) harus

menjadi agenda bersama baik bagi ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional dan lembaga negara sebagai pencipta arsip. "Arsip statis ini menjadi bukti sejarah perjalanan bangsa kita sehingga dapat diketahui generasi penerus dan akan terus disimpan selama republik tercinta ini ada," ungkap Mustari.

Selain itu, Staf Ahli Menteri Bidang Kementerian Hukum dan HAM Bidang Sosial, Politik dan Keamanan, Haru Tamtomo yang turut hadir dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan

arsipnya, termasuk pengelolaan arsip yang memiliki kategori statis. “Kami mencoba secara rutin dan berkesinambungan menyerahkan arsip statis ke ANRI,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Pencegahan PPAK yang juga hadir mengemukakan bahwa kesadaran akan pengelolaan arsip itu sudah selayaknya bukan lagi berada di posisi paling bawah. Karena mau tidak mau arsip selalu hadir dalam berbagai bidang seperti, budaya, ekonomi, politik seluruhnya pasti menghasilkan arsip. “Oleh karenanya, PPAK berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan kualitas pengelolaan arsip termasuk penyerahan arsip statis kepada ANRI,” tambahnya.

Penyelamatan arsip bagi lembaga negara ini menjadi suatu hal yang penting, mengingat sejak berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu jilid I dan II serta dimulainya Kabinet Kerja pada Oktober silam telah terjadi perubahan keorganisasian untuk beberapa lembaga negara. Perubahan keorganisasian tersebut di antaranya meliputi penggabungan, pemisahan dan pembubaran lembaga negara.

Sebagaimana disampaikan dalam laporan panitia penyelenggara oleh Kasubdit Akuisisi I, Tato Pujiarto bahwa kegiatan rakor ini merupakan salah satu cara bagi ANRI untuk membuat ajang diskusi menjalin berbagai

| No | Pencipta Arsip | Ringkasan Informasi Arsip yang Diserahkan | Jumlah |
|----|---|---|------------------------------|
| 1 | Kementerian Sekretariat Negara | Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik pada masa Orde Baru | 19 boks |
| 2 | Kementerian Pertanian | Hasil penelitian tentang buah-buahan, struktur organisasi | 6 boks |
| 3 | Kementerian Perhubungan | Penanganan kecelakaan dan Memorandum Saling Pengertian bidang Perhubungan dengan Luar Negeri | 61 boks |
| 4 | Kementerian Kesehatan | Bina gizi, kesehatan ibu dan anak | 1 boks |
| 5 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Penyusunan Undang-Undang bidang komunikasi dan informatika serta Peraturan Menteri | 26 boks |
| 6 | Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) | <i>Personali file</i> pimpinan, koruptor dan sidik jari | 25 boks |
| 7 | Mahkamah Konstitusi | Perselisihan Pemilihan Umum tahun 2014 | 429 boks |
| 8 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | <i>Power Plants</i> di Muria Peninsula wilayah Jawa Tengah | 10 boks |
| 9 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | Arsip foto tentang stasiun pusat satelit cuaca, pusat teknologi dirgantara, stasiun peluncuran roket dan proyek terdeteksinya sumber alam | 1 boks |
| 10 | Badan Informasi Geospasial | Peta dan perencanaan | 65 berkas (tidak dalam boks) |
| 11 | Kementerian Luar Negeri | Memorandum tentang akhir jabatan kepala perwakilan | 1 boks |
| 12 | Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati | Yayasan RSUP Fatmawati, master plane RSUP Fatmawati, 50 tahun RSUP Fatmawati, struktur organisasi | 1 boks |
| 13 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | Arsip kelembagaan | 4 boks |

Tabel Informasi Arsip yang Diserahkan ke ANRI

masuk dan membahas berbagai persoalan dalam upaya penyelamatan arsip di lingkungan lembaga negara. Sedangkan untuk penggabungan, pemisahan dan pembubaran lembaga negara, ANRI akan membahasnya khusus dalam sebuah kegiatan *Focus Group Discussion*.

Selain itu, arsip yang diserahkan oleh 13 lembaga negara ke ANRI merupakan arsip statis yang menjadi identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan

pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Arsip ini pun merupakan aset nasional yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (TK)

DUKUNG TINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, ARSIP PERIZINAN HARUS TERPERCAYA

Jakarta, ARSIP - Dalam menjalankan amanah pembinaan kearsipan di instansi tingkat pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Direktorat Kearsipan Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Workshop Pembinaan dan Pengelolaan Arsip Perizinan di instansi tingkat pusat dan pemerintah daerah. Workshop yang dibuka Kepala ANRI, Mustari Irawan ini diikuti 60 orang peserta yang berasal dari berbagai lembaga negara, Badan Usaha Milik Negara dan beberapa pemerintahan daerah

Dalam sambutannya, Mustari mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan arsip dinamis termasuk di dalamnya arsip perizinan harus sudah terkelola dengan baik untuk mendukung peningkatan dan efektifitas pelayanan publik. “Jangan sampai publik/masyarakat mengalami hambatan karena arsip perizinan belum terkelola dengan baik. Apalagi banyak instansi maupun pemerintah daerah yang saat ini melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dukungan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya akan membantu menciptakan pelayanan publik lebih cepat, lebih baik dan lebih mudah,” jelas Mustari.

Lebih lanjut Mustari pun mengungkapkan bahwa ada empat instrumen yang harus dimiliki tiap



Kepala ANRI Mustari Irawan membuka secara resmi Workshop Pembinaan dan Pengelolaan Arsip Perizinan

pencipta arsip dalam pengelolaan arsip dinamis, yaitu tata naskah dinas, klasifikasi arsip, klasifikasi dan keamanan akses arsip serta Jadwal Retensi Arsip. Keempat instrumen tersebut dibutuhkan guna menciptakan pengelolaan dan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya.

Workshop Pembinaan dan Pengelolaan Arsip Perizinan ini dilaksanakan tak lain karena ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional juga memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kearsipan nasional, termasuk pembinaan tentang pengelolaan arsip perizinan yang baik untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada Kesempatan ini, dilaksanakan pemaparan materi tentang Kebijakan

Pembinaan Kearsipan Nasional oleh Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Andi Kasman. Pengelolaan Arsip Bentuk Khusus/Perizinan disampaikan Direktur Kearsipan Pusat, Sumrahyadi. Pengelolaan Arsip Perizinan di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) disampaikan oleh Kepala Biro Umum BKPM, Kenny Daryat Danang. Pendataan Arsip Perizinan, disampaikan Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Pusat I, Diah Tjaturini dan Penyusunan Daftar Arsip Perizinan disampaikan Kasubdit Pusat II, Suwarto. (TK)

MEGAWATI DUKUNG ANRI AJUKAN ARSIP KAA DAN GNB SEBAGAI MEMORY OF THE WORLD

Jakarta, ARSIP - Presiden ke-5 Republik Indonesia (RI) Megawati Soekarno Putri turut mendeklarasikan dukungannya terhadap arsip Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Gerakan Non Blok (GNB) yang diajukan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai Memory of the World. Dukungannya ini disampaikan dalam pidatonya yang berjudul membangun Memori Kolektif Bangsa-Bangsa: Mendukung Arsip KAA dan GNB sebagai Memory of the World dalam acara Seminar Internasional Arsip KAA dan GNB sebagai Memory of the World (26/5) di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari, gedung C, lantai 2, ANRI, jalan Ampera Raya nomor 7 Jakarta Selatan.

Menurut putri Presiden ke-1 RI ini KAA merupakan peristiwa politik penting yang merubah peradaban dunia. Spirit dasa Sila Bandung bergerak menjadi basis kekuatan moral dan tenaga pembebas bagi bangsa-bangsa untuk merdeka. Demikian halnya terhadap Gerakan Non Blok. Gerakan ini membawa harapan baru agar dunia keluar dari berbagai ketegangan politik akibat persaingan kedua blok besar yang saling bertikai, yakni Blok Barat dan Blok Timur.

“Sejarah juga membuktikan, bahwa ketika kemerdekaan diakui sebagai hak segala bangsa, dan ketika perdamaian dunia ditegakkan



Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri, menyampaikan pidato kebudayaannya dihadapan peserta Seminar Internasional Arsip KAA dan GNB sebagai *Memory of the World*

atas prinsip keadilan, begitu banyak bangsa-bangsa baru merdeka terlahir, dan menjadi satu kekuatan baru yang anti penjajahan. Disitulah peran besar KAA dan GNB dalam sejarah peradaban umat manusia. Di sinilah keseluruhan makna memory of the world itu kita letakkan. Karenanya, generasi yang akan datang, tidak akan pernah kehilangan pijakan, bahwa di dalam sejarah perjuangan kemanusiaan, guna mewujudkan suatu tata dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, ada dua peristiwa maha penting yang menjadi milestone sejarah peradaban dunia, yakni KAA dan GNB. Hal inilah yang mendorong saya pribadi memberikan dukungan

sepenuhnya terhadap upaya ini,” tegas Megawati.

Seminar Internasional Arsip KAA dan GNB sebagai Memory of The World diselenggarakan untuk memperoleh rekomendasi dalam rangka membangun kesadaran masyarakat atas pentingnya arsip KAA dan GNB sebagai warisan dokumenter yang layak dinominasikan sebagai Memory of the World. Seminar internasional diikuti ini 150 peserta yang berasal dari negara pemrakarsa KAA dan penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi GNB seperti Indonesia, Serbia, Mesir, Aljazair, Malaysia, Pakistan, dan negara pemantau seperti Cina dan Belanda, perwakilan Lembaga Kearsipan Provinsi/Kabupaten/Kota,



Foto Bersama Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri, Kepala ANRI Mustari Irawan, Duta Arsip dan para delegasi negara-negara Gerakan Non Blok

Kepala Unit Kearsipan Instansi Pusat, arsiparis, pakar, sejarawan, akademisi, peneliti, dosen, dan jurnalis.

Adapun materi yang dibahas dalam Seminar Internasional Arsip KAA dan GNB sebagai Memory of The World terbagi dalam dua sesi diskusi. Dalam kesempatan ini, dilaksanakan peluncuran buku *Diplomatic Relation: Indonesia-Yugoslavia 1945-1967* yang dilaksanakan atas kerja sama ANRI dengan Arsip Nasional Serbia. Selain itu, dalam kesempatan ini Kepala ANRI, Mustari Irawan mengukuhkan Duta Arsip kepada Muhammad Prananda Prabowo dan Rieke Diah Pitaloka. Penetapan Muhammad Prananda Prabowo

dan Rieke Diah Pitaloka sebagai Duta Arsip akan diwujudkan dalam bentuk sosialisasi kearsipan yang meliputi pengelolaan, penyelamatan, perlindungan, penggunaan arsip dan penyediaan sumber daya dukung serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. ANRI juga akan melaksanakan penandatanganan Executive Program dengan State Archives Administration of China (SAAC).

Selain itu, Kepala ANRI juga memberikan penghargaan bidang kearsipan kepada Mantan Duta Besar Indonesia untuk Serbia, Samuel Samson karena komitmen dan integritas yang tinggi di bidang

kearsipan dan kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip bernilai guna kesejarahan, Kepala Arsip Nasional Serbia Miladin Milosevic dan Kepala Arsip Diplomatik Kementerian Luar negeri Serbia Ranko Milic atas jasanya dalam perlindungan dan penyelamatan arsip hubungan kerja sama bilateral bidang kearsipan antara Indonesia dan Serbia, penelitian dan publikasi arsip hubungan diplomatik Indonesia dan Serbia tahun 1945 s.d 1967 serta Prof. Dr. Ljubodrac Dimic, Akademisi Universitas Beograd dan Aleksandar Rakovic atas jasanya dalam perlindungan dan penyelamatan arsip penelitian dan publikasi hubungan diplomatik Indonesia dan Serbia tahun 1945 s.d 1967. (TK)

ANRI MENYELENGGARAKAN WORKSHOP PENYUSUNAN JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) SUBSTANTIF

Jakarta, ARSIP - Arsip Nasional Republik Indonesia, Direktorat Kearsipan Daerah II mengadakan workshop dengan mengusung tema Workshop Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten Kota/ Kota. Workshop diselenggarakan selama dua hari pada hari Selasa dan Rabu tanggal 9-10 Juni 2015 di Hotel Amoz Cozy Lantai III dengan dihadiri oleh 280 orang peserta yang merupakan perwakilan dari Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Acara dibuka dengan sambutan yang disampaikan oleh Kepala ANRI, Mustari Irawan. Dalam sambutannya, Mustari menjelaskan tentang perlunya JRA dalam Pemerintah Daerah sebagai salah satu pilar tertibnya pengelolaan arsip. "Dengan menggunakan Jadwal Retensi Arsip, maka akan memudahkan dalam penyelamatan arsip daerah. Workshop itu seperti bengkel. Kita harus membangun harus bisa merumuskan hasil dari workshop itu," demikian pungkas Mustari Irawan menutup sambutannya.

Narasumber pada workshop di hari pertama adalah Deputi Pembinaan Kearsipan, Andi Kasman yang membawakan materi Kebijakan



Workshop Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten Kota/ Kota

Pembinaan Pengelolaan Arsip pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya adalah materi mengenai Program Penyusunan JRA Substantif oleh Direktur Kearsipan Daerah II, Asep Mukhtar, Pedoman Retensi dalam Penyusunan JRA Substantif oleh Kepala Pusat Jibang Sistem Kearsipan Rini Agustiani, dan Penyusunan JRA Online oleh Kepala Pusat Data dan Informasi, Widarno. Pada tiap-tiap materi diselingi dengan diskusi dan tanya jawab dengan para peserta workshop.

Workshop pada hari ke dua diisi dengan kegiatan Diskusi Panel yang membahas Penyusunan JRA Substantif dan Fasilitasi Penyusunan JRA Substantif. Acara akhirnya ditutup oleh Direktur Kearsipan Daerah II, Asep Mukhtar dan berpesan pentingnya JRA

substantif dan mendorong terciptanya Jadwal Retensi Arsip Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan serta menjamin pengamanan informasi, terselamatkannya arsip statis sebagai sumber informasi, bukti akuntabilitas kinerja dan memori kolektif bangsa.

Sesuai dengan Pasal 48 Undang-undang nomor 43 Tahun 2009 ayat 1 yang menyatakan mengenai kewajiban memiliki JRA bagi Lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengesahan JRA.

HALAL BI HALAL MENPAN RB YUDDY DENGAN KELUARGA BESAR ANRI

Jakarta, ARSIP - Hari pertama kerja masuk di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Pasca cuti bersama Idul Fitri (22/7), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengunjungi ANRI, di Jalan Ampera Raya Jakarta. Kunjungan Menpan RB Yuddy disambut langsung oleh Kepala ANRI Mustari Irawan beserta jajaran pimpinan dan pegawai ANRI.

Dihadapan pegawai ANRI, Menpan RB Yuddy mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri mohon maaf lahir batin. Pada kesempatan ini, Menpan RB Yuddy juga mengapresiasi pegawai ANRI yang telah aktif bekerja setelah cuti bersama Idul Fitri. Sambil bersilaturahmi dan bercakap-cakap



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengunjungi ANRI, di Jalan Ampera Raya Jakarta didampingi oleh Kepala ANRI Mustari Irawan beserta jajaran pimpinan dan pegawai ANRI

dengan pegawai anri, Menpan RB Yuddy didampingi Kepala ANRI Mustari Irawan sesekali meladeni permintaan foto bersama. Menpan

RB Yuddy juga menyempatkan diri mengunjungi Ruang Baca Arsip dan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa yang dimiliki ANRI. (sa)



SELAMAT ATAS PROMOSI DOKTORAL

Dr. MUSTARI IRAWAN, MPA

Semoga Sukses Selalu dalam Karier dan Keluarga



TEMU TEKNIS PENYUSUNAN INSTRUMEN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SIKD DI LINGKUNGAN BUMN DAN PTN

Jakarta, ARSIP - Bertempat di The Ballroom The Mirah Hotel Bogor, Direktorat Kearsipan Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Temu Teknis Penyusunan Instrumen dalam Rangka Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) (2015/08/04-06). Acara tersebut bertujuan agar pengelolaan arsip dinamis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan BUMN dan PTN dapat berjalan optimal.

Dalam sambutan, Kepala ANRI Mustari Irawan menyampaikan pentingnya penerapan TIK dalam penyelenggaraan kearsipan. "Proses pengelolaan arsip harus dikembangkan secara maksimal mungkin, tidak berhenti kepada pengelolaan arsip dengan basis konvensional", ujarnya. Lebih lanjut, Mustari menambahkan bahwa Arsip Nasional terus berupaya mengembangkan pengelolaan sistem kearsipan sesuai perkembangan zaman.

Pada acara ini, peserta diminta untuk menyusun empat instrumen sebelum menerapkan Aplikasi SIKD di lingkungan BUMN dan PTN. Keempat



Kepala ANRI Mustari Irawan membuka acara Temu Teknis Penyusunan Instrumen dalam Rangka Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

instrumen itu yakni, pertama Pedoman Tata Naskah Dinas, Pedoman Klasifikasi Arsip, Pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan Pedoman Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

Panitia juga menghadirkan para pakar dan praktisi di bidang kearsipan sebagai nara sumber pada acara temu teknis diantaranya Deputy Bidang Pembinaan Kearsipan Andi Kasman yang menyampaikan materi Kebijakan Pembinaan Kearsipan Nasional. Deputy Bidang Konservasi Arsip M. Taufik menyampaikan

materi Kebijakan Penyelamatan dan Pengelolaan Arsip Statis. Direktur Kearsipan Pusat menyampaikan materi Pengantar Implementasi SIKD dengan penguatan Empat Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK). Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan menyampaikan materi Penyusunan NSPK untuk mendukung Penyelenggaraan Kearsipan. Dan terakhir, Kepala UPT Arsip IPB menyampaikan materi Pengelolaan Arsip IPB dengan empat instrumen SIKD. (sa)

EXECUTIVE MEETING PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA: KESERIOUSAN ANRI JAGA KEUTUHAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN ARSIP

Bandung, ARSIP - Sebagai salah satu wujud pembinaan pengelolaan arsip terjaga di lingkungan pemerintahan daerah, Direktorat Kearsipan Daerah II Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan *Executive Meeting* Pengelolaan Arsip Terjaga di Hotel Savoy Homann Bidakara Bandung, jalan Asia Afrika nomor 112 pada 6 s.d 7 Agustus 2015. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan dan keselamatannya yang meliputi arsip kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis.

Executive Meeting Pengelolaan Arsip Terjaga dibuka Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa dan diikuti 160 peserta yang berasal dari 16 provinsi di wilayah Sumatera dan Jawa. Para peserta ini terdiri dari berbagai unsur antara lain: Sekretaris Daerah, Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi



Pembukaan acara Executive Meeting Pengelolaan Arsip Terjaga oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa

pengelolaan wilayah perbatasan, kependudukan, investasi dan penanaman modal, pengelolaan aset, perizinan, penanganan bencana serta Inspektorat dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Dalam sambutannya, Iwa menyampaikan bahwa masalah arsip ini harus menjadi perhatian dan ditangani secara serius bukan hanya khusus yang menangani arsip, tetapi harus oleh kita semua. "Selain itu, kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi juga dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan arsip. "Melalui pemanfaatan teknologi dalam

pengelolaan arsip, kita juga dapat mempunyai back up," paparnya.

Adapun tujuan penyelenggaraan executive meeting ini adalah sebagai saranakoordinasiantaradaerahdengan ANRI dalam hal pengelolaan arsip terjaga, membangun kesepahaman jajaran pemerintah daerah tentang pengelolaan arsip terjaga, memahami dan mengaplikasikan pemberkasan dan pelaporan arsip terjaga serta sebagai sarana bertukar pikiran dan pengalaman antardaerah dalam hal pengelolaan arsip terjaga. Nantinya, para peserta Executive Meeting Pengelolaan Arsip Terjaga diharapkan



Diskusi panel mengenai Arsip Terjaga

dapat melaksanakan pengelolaan arsip terjaga di tiap SKPD sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun pada tahun 2015 ini ANRI juga menargetkan dapat memperoleh daftar dan salinan autentik arsip terjaga tentang perbatasan dari 4 (empat) provinsi yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kesempatan ini turut hadir pula Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Andi Kasman, Direktur Kearsipan Daerah II, Asep Mukhtar Mawardi, Direktur Pengolahan, Azmi dan Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Barat, Tati Iriani yang juga menyampaikan

paparan materi kepada peserta. Usai mendapatkan materi, pada 7 Agustus 2015 peserta melaksanakan diskusi untuk mengidentifikasi arsip terjaga di daerahnya masing-masing sesuai dengan fungsi dan tugas tiap SKPD.

Upaya menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip terjaga harus dilakukan sejak dini yakni pada saat arsip tersebut tercipta pada pencipta arsip. Salah satu langkah yang harus diambil sebagai bagian dari menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip adalah dengan pembuatan daftar, pemberkasan dan pelaporan penyerahan serta penyerahan salinan autentik ke ANRI sebagaimana diatur dalam Pasal 42

dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Adapun pengelolaan arsip terjaga ini diatur dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Daftar, Pemberkasan dan Pelaporan serta Penyerahan Arsip Terjaga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 pencipta arsip wajib memberkaskan, mendata, dan menata fisik arsip terjaga untuk selanjutnya dilaporkan kepada ANRI sesuai dengan mekanisme pemberkasan dan pelaporan, serta menyerahkan salinan autentik dari naskah asli paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaporan dilakukan kepada ANRI. (TK)

ANRI GELAR ANUGERAH BIDANG KEARSIPAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2015

Jakarta, ARSIP - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Dr. Mustari Irawan memberikan anugerah kepada unit kearsipan, Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi (LKPT) dan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) terbaik serta arsiparis teladan tingkat nasional pada 17 Agustus 2015 di Hotel Red Top, jalan Pecenongan nomor 72, Jakarta Pusat. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda rutin yang diselenggarakan ANRI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Adapun peserta yang mengikuti seleksi pemilihan arsiparis teladan sebanyak 56 peserta yang terdiri dari 25 orang arsiparis tingkat keahlian dan 31 orang arsiparis tingkat keterampilan. Selain itu, terdapat pula 4 pengelola arsip di lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang turut mengikuti anugerah pengelola arsip teladan. Dalam pemilihan ini, peserta mengikuti berbagai tahapan tes yang terdiri dari ujian tertulis, wawancara dan presentasi kinerja. Para peserta berasal dari perwakilan provinsi dan instansi pemerintah tingkat pusat.

Kegiatan pemilihan arsiparis dan pengelola arsip teladan tingkat nasional ini merupakan salah satu



Anugerah Kearsipan Tahun 2015

wujud peran serta ANRI dalam memberikan pembinaan terhadap sumber daya manusia (SDM) di bidang kearsipan yang diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas SDM kearsipan khususnya arsiparis yang kompeten, handal, berdedikasi dan berkinerja baik. Selain itu, kegiatan pemilihan arsiparis teladan pun menjadi salah satu ajang untuk memberikan apresiasi kepada arsiparis atas pengabdian dan jasanya terhadap bidang profesi kearsipan. Dengan demikian para arsiparis teladan ini dapat dijadikan contoh keteladanannya untuk meningkatkan pengelolaan arsip.

Pada kategori pemilihan unit kearsipan terbaik diikuti 11 kementerian dan 8 Lembaga

Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang mengikuti seleksi administrasi. Selanjutnya, dilaksanakan verifikasi lapangan dan pada 12 s.d 13 Agustus 2015 sebanyak 4 finalis dari kategori kementerian (terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kesehatan) dan 3 finalis dari kategori LPNK (terdiri dari ANRI, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Mahkamah Konstitusi) melaksanakan penilaian dengan melakukan presentasi di ANRI. Untuk kategori LKPT, sebanyak 3 finalis (terdiri dari Universitas Gajah Mada, Universitas Sebelas Maret dan Universitas Udayana) mengikuti

LIPUTAN

penilaian presentasi dari 7 LKPT yang mengikuti seleksi administrasi.

Untuk pemilihan LKD terbaik dibagi berdasarkan wilayah binaan daerah yang dilaksanakan ANRI. Untuk wilayah binaan I meliputi Indonesia bagian tengah dan timur dan wilayah binaan II meliputi Indonesia bagian barat. Berdasarkan hasil seleksi administrasi dan telah dilakukan verifikasi lapangan, dari wilayah I (Tengah dan Timur) sebanyak 5 provinsi (terdiri dari: Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah) serta 5 kabupaten/kota (terdiri dari: Kab. Badung, Kab. Barru, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Kotawaringin Barat dan Kota Ternate) lolos sebagai finalis LKD terbaik dan mengikuti penilaian presentasi pada 14 Agustus 2015 di ANRI. Sedangkan wilayah II (barat), sebanyak 5 provinsi (terdiri dari: Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Barat) dan 5 kabupaten/kota (terdiri dari: Kab. Bangka Barat, Kab. Purwakarta, Kab. Purworejo, Kab. Sleman dan Kota Cilegon) lolos sebagai finalis LKD terbaik dan mengikuti penilaian presentasi pada 15 Agustus 2015 di ANRI.

Dalam sambutannya, Mustari juga berharap agar para pemenang ini semakin semangat untuk terus meningkatkan kualitasnya dan dapat

| Unit Kearsipan Terbaik Kategori Kementerian | | | |
|---|--|--|-------|
| No | Nama Kementerian | Juara | |
| 1 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI | I | |
| 2 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI | II | |
| 3 | Kementerian Kesehatan RI | III | |
| Unit Kearsipan Terbaik Kategori Lembaga/LPNK | | | |
| No | Nama Lembaga/LPNK | Juara | |
| 1 | Arsip Nasional Republik Indonesia | I | |
| | Mahkamah Konstitusi RI | II | |
| 3 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | III | |
| 4 | Kementerian Luar Negeri RI | Harapan I | |
| LKPT Terbaik | | | |
| No | Nama Perguruan Tinggi | Juara | |
| 1 | Universitas Gajah Mada | I | |
| 2 | Universitas Sebelas Maret | II | |
| 3 | Universitas Udayana | III | |
| LKD Provinsi Terbaik Wilayah I (Tengah dan Timur) | | | |
| No | Nama Provinsi | Juara | |
| 1 | Sulawesi Selatan | I | |
| 2 | Kalimantan Timur | II | |
| 3 | Kalimantan Barat | III | |
| 4 | Sulawesi Tengah | Harapan I | |
| 5 | Nusa Tenggara Timur | Harapan II | |
| LKD Kabupaten/Kota Terbaik Wilayah I (Tengah dan Timur) | | | |
| No | Nama Kabupaten/Kota | Juara | |
| 1 | Kabupaten Badung | I | |
| 2 | Kabupaten Hulu Sungai Utara | II | |
| 3 | Kota Ternate | III | |
| 4 | Kabupaten Barru | Harapan I | |
| 5 | Kabupaten Kotawaringin Barat | Harapan II | |
| LKD Provinsi Terbaik Wilayah II (Barat) | | | |
| No | Nama Provinsi | Juara | |
| 1 | Jawa Timur | I | |
| 2 | Jawa Barat | II | |
| 3 | Sumatera Barat | III | |
| 4 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Harapan I | |
| 5 | Banten | Harapan II | |
| LKD Kabupaten/Kota Terbaik Wilayah II (barat) | | | |
| No | Nama Kabupaten/Kota | Juara | |
| 1 | Kabupaten Sleman | I | |
| 2 | Kabupaten Purworejo | II | |
| 3 | Kabupaten Purwakarta | III | |
| 4 | Kabupaten Bangka Barat | Harapan I | |
| 5 | Kota Cilegon | Harapan II | |
| Arsiparis Teladan Tingkat Keahlian | | | |
| No | Nama Arsiparis | Instansi | Juara |
| 1 | Drs. Bambang Parjono Widodo, M.Si. | Arsip Nasional Republik Indonesia | I |
| 2 | Irwan Permana, S.TP | Provinsi Jawa Barat | II |
| 3 | Lucki Engel Karwul, S.Hum. | Kementerian Pertanian | III |
| Arsiparis Teladan Tingkat Keterampilan | | | |
| No | Nama Arsiparis | Instansi | Juara |
| 1 | Ari Parwanti, S.Sos. | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | I |
| 2 | Ahmad Kurniawan, A.Md. | Arsip Nasional Republik Indonesia | II |
| 3 | Eko Wahyudi, A.Md. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | III |
| Pengelola Arsip Teladan | | | |
| No | Nama Pengelola Arsip | Instansi | Juara |
| 1 | Firman Haris | PT. Bank Mandiri (Persero) | I |
| 2 | Tri Arso Purnomo | Bank Indonesia | II |
| 3 | Siti Fatimah Akradiani | Pembangkitan Jawa Bali | III |

Para pemenang unit kearsipan, LKPT dan LKD terbaik serta arsiparis dan pengeola arsip teladan tingkat nasional tahun 2015

menjadi contoh bagi yang lainnya. Republik Indonesia pada 18 Agustus Rangkaian kegiatan ini diakhiri dengan 2015 yang juga sebagai agenda diikutinya acara silaturahmi para rutin peringatan HUT Proklamasi teladan nasional dengan Presiden Kemerdekaan RI. (TK)

ANRI SELENGGARAKAN PAMERAN ARSIP “AYO KERJA” 70 TAHUN INDONESIA MERDEKA

Jakarta, ARSIP - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Pameran Arsip “Ayo Kerja” 70 Tahun Indonesia Merdeka di Gedung Arsip Nasional RI Jalan Gajah Mada Nomor 111 Jakarta Barat. Khazanah Arsip yang ditampilkan meliputi arsip persiapan kemerdekaan Indonesia, arsip foto pekerja atau pegawai pribumi di masa lampau, arsip mengenai kebijakan ketenagakerjaan dan arsip-arsip penting mengenai berdirinya republik ini.

Kepala Sekretariat Presiden Republik Indonesia Dr. Darmansjah Djumala, M.A. mengapresiasi yang sangat tinggi kepada ANRI yang telah menyelenggarakan pameran “Ayo Kerja”. “Tema “Ayo Kerja” yang telah diangkat oleh ANRI, saya kira sungguh tepat, karena tema ini menjadi ikon dari HUT Kemerdekaan tahun ini. Yang mencerminkan upaya Bapak presiden dan juga Pemerintah Republik Indonesia untuk senantiasa berbuat dan berkerja sehingga kita dapat melakukan yang terbaik bagi bangsa ini”, ungkapnya.

Lebih lanjut Darmansjah menyampaikan makna arsip. “Arsip itu adalah perjalanan peradaban bangsa, arsip adalah the telling picture, the telling document seperti kata orang Let us the picture talk to you artinya biarkan gambar-gambar, arsip-arsip ini bercerita kepada kita sekalian tentang



Pameran Arsip “Ayo Kerja” 70 Tahun Indonesia Merdeka di Gedung Arsip Nasional RI Jalan Gajah Mada Nomor 111 Jakarta Barat



Pembukaan acara Pameran Arsip “Ayo Kerja” 70 Tahun Indonesia Merdeka oleh Kepala ANRI Mustari Irawan didampingi oleh Kepala Sekretariat Presiden Republik Indonesia Dr. Darmansjah Djumala, M.A

peradaban bangsa”, ujarnya.

Acara pameran dibuka oleh Kepala ANRI yang ditandai dengan pemukulan gong. Dalam sambutannya, Kepala ANRI Mustari Irawan mengungkapkan

tujuan diadakannya pameran. “Dengan pameran ini saya berharap, kita bisa belajar tentang sejarah. Yang jauh lebih penting adalah kita bisa menarik pelajaran dari masa lalu. Di sini (pameran) ada arsip masa kemerdekaan dan arsip setelah kemerdekaan yang memberikan

gambaran tentang etos kerja bangsa kita”, tuturnya. Pameran berlangsung mulai tanggal 25-28 Agustus 2015, terbuka untuk umum dan gratis. (sa)

AKREDITASI A UNTUK UNIT KEARSIPAN PT.SEMEN PADANG

Padang, ARSIP - Kamis pagi , tanggal 27 Agustus 2015 merupakan hari yang bersejarah bagi Keluarga Besar PT. Semen Padang (Persero) khususnya Unit Kearsipannya. Karena Unit Kearsipan PT. Semen Padang baru saja mendapatkan Akreditasi Kearsipan dengan nilai A (Sangat Baik). Pada kesempatan itu Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Dr. Mustari Irawan, MPA berkesempatan menyerahkan langsung sertifikat akreditasi kepada Direksi yang diwakili oleh Direktur Keuangan PT. Semen Padang Bapak Tri Hartono Rianto, SE., M.Bus.

Dalam sambutannya Kepala ANRI menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PT Semen Padang atas prestasi yang telah di perolehnya dalam Bidang Kearsipan. "Ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan yang diperoleh BUMN setara Nasional, karena sampai saat ini masih sedikit lembaga negara, PTN dan BUMN yang berani untuk diverifikasi dan di Akreditasi oleh ANRI", kata Kepala ANRI. Tentunya, hal ini menjadi nilai lebih bagi PT Semen Padang. Kedepannya, PT Semen Padang diharapkan dapat menjadi percontohan bagi BUMN-BUMN lainnya di dalam pengelolaan arsipnya.

Akreditasi Kearsipan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk memberikan pengakuan formal oleh



Kepala ANRI Mustari Irawan menyerahkan langsung sertifikat akreditasi kepada Direksi yang diwakili oleh Direktur Keuangan PT. Semen Padang Tri Hartono Rianto

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) terhadap kelayakan dan mutu penyelenggaraan kearsipan oleh unit kearsipan, lembaga kearsipan, serta lembaga penyelenggara jasa dan diklat kearsipan sesuai prinsip, standar dan kaidah kearsipan yang ditetapkan dalam Keputusan dan Sertifikat Akreditasi Kearsipan oleh Kepala ANRI. Dalam kesempatan yang sama Direktur Keuangan PT Semen Padang Tri Hartono Rianto menyampaikan terima kasihnya atas segala bimbingan dan pendampingan dari ANRI sehingga Unit Kearsipan PT Semen Padang mendapatkan Akreditasi A. "Kami akan terus

mempertahankan dan meningkatkan mutu kearsipan di lingkungan PT Semen Padang", pungkasnya.

Selain itu acara yang juga dihadiri oleh Kepala BPAD Provinsi Sumatera Barat dan Asisten Administrasi Umum Bapak Sudirman Gani yang dalam sambutannya juga menyampaikan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PT Semen Padang atas prestasinya, hal ini sangat membanggakan Ranah Minang karena PT Semen Padang merupakan kebanggaan dan unggulan Provinsi Sumatera Barat. (ITG)



KUNJUNGI...
GEDUNG ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DI JALAN GAJAH MADA NO. 111, JAKARTA BARAT

- PAMERAN KELEMBAGAAN ARSIP NASIONAL RI
- PAMERAN ARSIP
- PEMUTARAN ARSIP FILM SEJARAH PERJUANGAN INDONESIA
- PAMERAN BENDA-BENDA BERSEJARAH

Jadwal Berkunjung:
Pameran Arsip, Kelembagaan, & Pemutaran Arsip Film
Dibuka Senin-Jum'at, 9.00-15.00 WIB



UNDUH MAJALAH **ARSIP** DALAM FORMAT DIGITAL



Cara unduh majalah ARSIP dalam format digital:

1. Masuk ke website www.anri.go.id
2. Klik menu "Publikasi"
3. Kemudian pilih "Majalah ARSIP"
4. Unduh file "Majalah ARSIP"
5. Majalah ARSIP tersedia dalam *Portable Document Format (PDF)* dan dapat dibaca menggunakan software Adobe Acrobat